



# ACCESS Tahap II

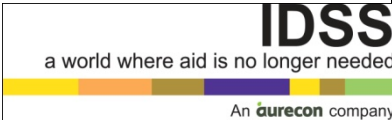
## Laporan Enam Bulanan

Oktober 2010- Maret 2011

[www.access-indo.or.id](http://www.access-indo.or.id)  
ACCESS

## Sanggahan (Disclaimer)

Laporan ini menjelaskan tentang layanan yang disampaikan oleh IDSS Pty Ltd dan dilaksanakan oleh tim ACCESS Tahap II sesuai dengan Cakupan Layanan yang disetujui didalam kontrak 45746 diantara IDSS Pty Ltd dan AusAID. Laporan ini telah dipersiapkan atas nama dan secara eksklusif digunakan oleh AusAID sebagaimana diperlukan untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan yang sedang berjalan. Laporan ini berlaku hanya dan dibuat dalam kaitannya dengan ketentuan didalam perjanjian diantara IDSS Pty Ltd dengan AusAID. IDSS Pty Ltd tidak bertanggung jawab terhadap berbagai penggunaan dan kepercayaan terhadap laporan ini oleh pihak ketiga manapun. Isi dari laporan ini dan rekomendasi yang dibuat mungkin akan digunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan Program

<b>KONTROL DOKUMEN</b>					
					
Rev No.	Tanggal	Rincian Revisi	Penulis	QA	Disetujui Oleh
0	31/03/11	Final document for submission	NJF	NJ	PGB

### **IDSS**

Level 12, 60 Albert Road  
South Melbourne, VIC, 3205  
AUSTRALIA  
Tel: 61 3 8683 1457  
Fax: 61 3 8683 1599

### **ACCESS Phase II**

Jl. Bet Ngandang 1, No.1 xx  
Sanur, 80033  
Bali  
INDONESIA  
Tel: 62 361 288 428  
Fax: 62 361 287 509

## Daftar Isi

Executive Summary.....	i
1 Pendahuluan.....	1
2 Tujuan Program .....	3
2.1 Ringkasan Tujuan.....	3
2.2 Capaian dibandingkan dengan Tujuan .....	3
2.2.1 Tujuan 1.....	4
2.2.2 Tujuan 2.....	6
2.2.3 Tujuan 3.....	9
2.2.4 Tujuan 4.....	12
3 Perkembangan Pelaksanaan Terhadap Lima Wilayah Fungsional ACCESS ....	16
3.1 Wilayah Fungsional 1: .....	16
3.2 Wilayah Fungsional 2: .....	19
3.3 Wilayah Fungsional 3: .....	21
3.4 Wilayah Fungsional 4: .....	24
3.5 Wilayah Fungsional 5: .....	31
4 Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran.....	35
4.1 Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluation /M&E) .....	35
4.2 Pembelajaran Yang Dapat Diambil dari Pelaksanaan Program .....	38
5 Keberlanjutan.....	40
6 Isu-isu Mutakhir.....	41
6.1 Keadilan Gender.....	41
6.2 Lingkungan .....	42
6.3 Anti-Korupsi .....	44
6.4 Kemitraan .....	46
7 Manajemen Resiko .....	47
8 Manajemen Program .....	48
8.1 Perekrutan Staf Program.....	48
8.2 Manajemen Dana Hibah.....	49
8.2.1 Pemrosesan Dana Hibah .....	49
8.2.2 Pengeluaran Dana Hibah .....	50

## Daftar Tabel

Tabel 1: Sumbangan Pemerintah kepada Rencana Aksi Mitra Oktober 2010-Maret 2011 .....	9
Tabel 2: Jumlah Peraturan Pemerintah Daerah Yang Dinegosiasikan Melalui Mitra ACCESS.....	11
Tabel 3: Kebijakan Peraturan yang Dipengaruhi oleh OMS Hingga Saat Ini.....	37
Tabel 4: Daftar Rencana Aksi dengan Wilayah Tematik Manajemen Sumber Daya Alam .....	42
Tabel 5 Resiko yang Diidentifikasi selama Masa Oktober 2010-Maret 2011.....	47

## Daftar Gambar

Gambar 1: Struktur dan Kerangka Kerja ACCESS.....	2
Gambar 2: Perubahan didalam Tingkat Kemiskinan di Lombok Tengah.....	11
Gambar 3: Kepuasan Peserta dengan Kegiatan CB .....	22
Gambar 4: Penerima Manfaat untuk Rencana Aksi Saat Ini.....	24
Gambar 5: Jumlah Rencana Aksi Saat ini berdasarkan Wilayah Tematik.....	25
Gambar 6: Peta Jalan Evaluasi Dampak ACCESS .....	36
Gambar 7: Pemrosesan dana hibah Pada Masa Pelaporan Ini.....	50
Gambar 8: Pemrosesan Dana Hibah Hingga Saat Ini .....	50
Gambar 9: Anggaran Dana Hibah Mitra.....	51

Gambar 10: Anggaran Dana Hibah Proyek .....	51
Gambar 11: Anggaran Dana Hibah Inovatif .....	51

### Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Daftar Istilah .....	Lampiran 1 Hal 1
Lampiran 2: Matrik Pemantauan Perkembangan.....	Lampiran 2 Hal 1
Lampiran 3: Perkiraan Pendanaan Enam Bulanan.....	Lampiran 3 Hal 1
Lampiran 4: Dokumen Yang Dihasilkan Selama Periode Pelaporan ini .....	.....Lampiran 4 Hal 1
Lampiran 5: PGA yang Diterbitkan Pada Periode Pelaporan ini.....	Lampiran 5 Hal 1

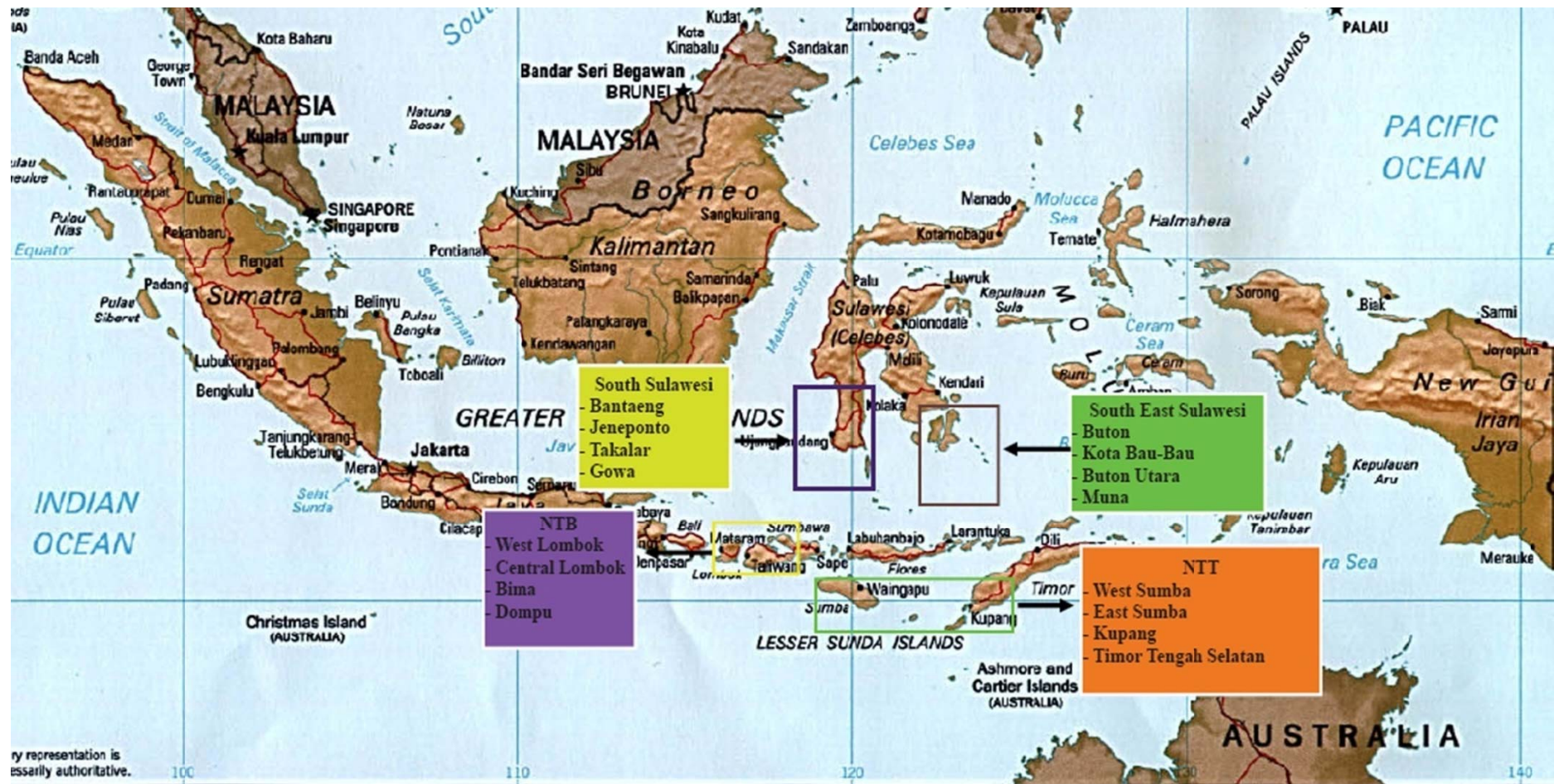
## Singkatan dan Istilah

ACCESS	Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme
ADD	<i>Alokasi Dana Desa</i> (Village Budget Allocation)
AI	Appreciative Inquiry
AIP	Australia Indonesia Partnership (Kemitraan Australia Indonesia)
AIPD	Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (Kemitraan Australia Indonesia Untuk Desentralisasi)
AIPMNH	Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (Kemitraan Australia Indonesia Untuk Kesehatan Ibu dan Anak)
AIFDR	Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (Fasilitas Australia Indonesia Untuk Pengurangan Bencana)
APBD	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i> (District Income and Expenditure Budget)
APBN	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional</i> (National Income and Expenditure Budget)
AUD	Australian Dollar
AusAID	Australian Agency for International Development
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ministry of National Development Planning)
BPM	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat</i> (Community Empowerment Body)
BPMPD/K	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan</i> (Community and Village Government Empowerment Body)
Desa	Village
BUMDes	<i>Badan Usaha Milik Desa</i> (Village Owned Enterprises)
CB	Capacity Building (Pengembangan Kapasitas)
CE	Community Engagement (Interaksi Masyarakat)
CLAPP	Community Led Action and Participatory Process (Proses Aksi dan Partisipatif yang Dipimpin Oleh Masyarakat)
CLM	Coordination and Learning Meeting (Pertemuan Koordinasi dan Pembelajaran)
CPS	Country Program Strategy (Strategi Program Negara)
CS	Civil Society (Masyarakat Sipil)
IMS	Civil Society Index (Indeks Masyarakat Sipil)
CSO	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil/OMS)
PAK	District Citizen Engagement Plan (Rencana Interaksi Masyarakat Kabupaten)
DPRD	<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i> (Local Legislative Council)
DPRRD	Decentralisation, Poverty Reduction, and Rural Development Section (Bagian Desentralisasi, Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan)
DSC	District Stakeholder Committee (Komite Stakeholder Kabupaten)

DSF	Decentralisation Support Facility (Fasilitas Bantuan Desentralisasi)
EMP	Environmental Management Plan (Rencana Manajemen Lingkungan)
<i>Forum KTI</i>	<i>Forum Kawasan Timor Indonesia</i> (Eastern Indonesia Forum)
FMM	Field Management Manual (Manual Manajemen Lapangan)
GOA	Government of Australia (Pemerintah Australia)
GOI	Government of the Republic of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GSI	Gender and Social Inclusion (Penyertaan Gender dan Sosial)
<i>Kabupaten</i>	District
<i>Kabid Litbang</i>	<i>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</i> (Head of Research and Development Division)
<i>Korprov</i>	<i>Koordinator Provinsi</i> (Provincial Coordinator)
<i>KPM</i>	<i>Kader Pembangunan Masyarakat</i> (Village Facilitator)
<i>KPUK</i>	<i>Kelompok Perempuan Usaha Kecil</i> (Women's Small Business Group)
LDG	Local Democratic Governance (Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis)
LG	Local Government (Pemerintah Daerah)
M&E	Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
MEL	Monitoring, Evaluation and Learning (Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran)
MIS	Management Information System (Sistem Manajemen Informasi)
<i>MKPPDes</i>	<i>Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Desa</i> (Consolidation Matrix for Village Planning and Budgeting)
MOHA	Ministry of Home Affairs (Kementrian Dalam Negeri)
<i>MP3</i>	<i>Masyarakat Peduli Pelayanan Publik</i> (Citizens Concerned about Public Service Delivery)
MRG	Monitoring Review Group (Kelompok Review Pemantauan)
<i>Musrenbang</i>	<i>Musyawahar Perencanaan Pembangunan</i> (Development Planning Process)
NGO	Non-Governmental Organisation (LSM)
OHS	Occupational Health and Safety (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
OM	Outcome Mapping (Pemetaan Hasil)
PAMELS	Participatory Monitoring, Evaluation and Learning System (Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran)
PC	Program Coordinator
PCC	Program Coordination Committee
PD	Program Director
PDD	Project Design Document (Dokumen Rancangan Proyek)
<i>Pemda</i>	<i>Pemerintah Daerah</i> (District Government)
PGA	Project Grant Agreement (Perjanjian Dana Hibah Proyek)
<i>PKK</i>	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</i> (Family Empowerment and Prosperity)

<i>PMD</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Community and Village Empowerment) – Directorate General within Ministry of Home Affairs</i>
<i>PNPM</i>	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (National Community Empowerment Program)</i>
<i>Rp.</i>	Rupiah
<i>RPJMDes</i>	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Village Mid-Term Development Plan)</i>
<i>SKPD</i>	<i>Satuan Kerja Perangkat Daerah (Technical Units within each district)</i>
SOS	Scope of Services
STA	Short Term Advisor
STO	Senior Technical Officer
TA	Technical Assistance (Bantuan Teknis)
TKPKD	<i>Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (District Coordinating Team for Poverty Alleviation)</i>
TNP2K	<i>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (National Team for Accelerating Poverty Alleviation)</i>
TOR	Terms of Reference
TOT	Training of Trainers (Pelatihan untuk Para Pelatih)

## Lokasi Program ACCESS Tahap II



## Ringkasan Eksekutif

Pada enam bulan terakhir terlihat ada peningkatan ketertarikan dari GOI dan GOA untuk fokus pada proses, dan dampak dalam penguatan masyarakat sipil dan bekerja bersama warga dan organisasinya. Perkembangan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan personil dalam melihat program, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dari luar.

Perkembangan di Indonesia begitu pula di Australia sekali lagi menyoroti bahwa warga, bila didorong dan disediakan ruang oleh pemerintah, mereka merupakan stakeholder utama di dalam pembangunan. Tanggapan dari orang terhadap bencana di Australia – banjir yang terjadi di Queensland dan Victoria, topan di Queensland, serta kebakaran hutan di Western Australia – menunjukkan bahwa dalam menangani bencana besar pemerintah hanya mampu melakukan hal seperti itu. Akan tetapi dengan bekerja bersama masyarakat dan memahami aset masyarakat yang begitu besar, pemerintah menciptakan sebuah ruang untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa dari tangan masyarakat akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa dan bukti kekuatan.

Di Indonesia, pelaksanaan upaya-upaya yang terkait dengan UU KIP, guna memastikan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan UU Pelayanan Publik, adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta diskusi dan beberapa rancangan dari RUU Desa yang akan menyediakan sejumlah peningkatan arus sumber daya ke desa dan kota dan komunitas untuk mendukung mereka dalam membangun komunitas. Peningkatan jumlah sumber daya yang mengalir ke masyarakat desa dan masyarakat perkotaan untuk mendorong mereka untuk membangun masyarakat mereka, merupakan tanda yang penting dari pengakuan terhadap pentingnya partisipasi dan pemberdayaan orang dan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah dan warga. Sangat menyentuh saat Pak Supto Supono, Direktur *'Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat'* dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam MOHA selama kunjungan lapangan di Lombok yang menyiratkan hubungan diantara masyarakat dan perubahan yang lebih luas sebagai berikut:

---

*"Menangani segala hal di Pusat tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Diperlukan pelibatan masyarakat guna memastikan keberhasilan pembangunan dan pengembangan masyarakat sendiri".*

---

Perkembangan terakhir ini merupakan tanda yang baik bagi relevansi yang meningkat dan sedang berjalan dari dukungan ACCESS terhadap pemberdayaan warga dan penguatan organisasinya secara konstruktif, tetapi secara kritis berinteraksi dengan pemerintah, meningkatkan gagasan aktif warga dan pemerintah yang bertanggung jawab dan tanggap dalam sebuah lingkungan kerjasama dan saling percaya berdasarkan pada aset-aset dan nilai lebih dari tiap pihak yang terlibat.

Bantuan AusAID melalui ACCESS Tahap II meluas hingga 16 kabupaten di empat provinsi mencakup lebih dari 780 desa dan penerima manfaat (langsung maupun tidak langsung) yang berjumlah total 2,471,750. ACCESS telah memberikan 186 dana hibah kepada sekitar 85 OMS (termasuk penyedia layanan nasional, OMS pelaksana lokal dan sejumlah OMS yang terlibat di dalam dana hibah inovatif dan pembelajaran dan berbagi pengetahuan) yang terlibat di dalam kegiatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta di beberapa kegiatan tertentu di tingkat

provinsi. Kegiatan OMS yang didukung dengan dana hibah tersebut hingga saat ini memberikan bantuan kepada 1,001 kelompok warga. Kegiatan OMS yang didukung adalah pengembangan kapasitas fasilitator tingkat desa dan perencanaan dan penganggaran desa, hingga menyusun kerangka kerja peraturan yang mendukung bekerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD pada tingkat kabupaten. Dukungan terhadap Mitra pelaksana akan terus ada dari 12 – 18 bulan guna memastikan perluasan kegiatan mereka di dalam kabupaten mereka.

### Perkembangan pada Tingkat Penerima Manfaat

Perubahan yang signifikan terlihat didalam perilaku dari 1,001 kelompok warga yang terdiri dari 17,080 anggota yang bekerja dengan Mitra ACCESS. Di semua kabupaten, kelompok warga secara meningkat berinteraksi didalam proses pembangunan pemerintah dan secara meningkat berinteraksi dengan penyedia layanan publik. Kelompok-kelompok ini: berkembang menjadi lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan pihak lain didalam mengejar kepentingan mereka; analisa mereka menjadi lebih kritis, mereka menemukan atau menciptakan ruang untuk berinteraksi dengan pemerintah; mereka menjadi lebih aktif didalam organisasi mereka (khususnya perempuan dan kaum miskin); dan kelompok warga (pusat pengaduan, kelompok perempuan, kelompok pertanian, dsb) semakin aktif didalam aksi pembangunan di kabupaten mereka.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan positif ini, dengan daya pendorong kegiatan pengembangan kapasitas dan pembelajaran yang didukung oleh ACCESS. Selama masa ini, sebagai contoh, diadakan pertemuan Direktur lokal, yang membantu menganalisa perubahan pada tingkat penerima manfaat dan mendorong kepemilikan atas kegiatan pengembangan kapasitas. Klinik pendekatan berbasis kekuatan diadakan bersama Mitra untuk membantu menunjukkan penerapan praktis dari pendekatan tersebut di tingkat masyarakat. Pertemuan tematik diadakan selama masa pelaporan ini mengenai Penyediaan Pelayanan Publik dan mengenai Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dan hal ini telah membantu pemerintah daerah, Mitra dan anggota masyarakat untuk merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai utama dan bagaimana mereka menerapkan ini kedalam praktek di masyarakat.

### Perkembangan ditingkat Mitra

Selama enam bulan terakhir, dan berdasarkan pada pemantauan atas perubahan dalam OMS menggunakan alat Review Perkembangan Mitra (Partner Progress Review/PPR), telah terjadi perkembangan yang memuaskan dalam memahami dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi utama baik didalam organisasi mereka dan dalam interaksi mereka dengan kelompok-kelompok warga. Temuan ini didukung oleh hasil-hasil dari survey pendek yang diadakan bersama 63 mitra ACCESS di bulan Januari 2011<sup>1</sup> yang bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang telah terjadi selama tahun sebelumnya, dan faktor-faktor yang menyumbang terhadap perubahan tersebut. Luar biasanya, Mitra ACCESS menanggapi bahwa perubahan yang paling penting adalah nilai-nilai dan perilaku mereka – mereka merasa diri mereka menjadi lebih transparan dan partisipatif, bertindak lebih sebagai perantara bagi organisasi warga dalam mendukung perkembangan mereka, memiliki sikap

---

<sup>1</sup> Survey ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Pertemuan Tahunan Mitra Strategis yang diselenggarakan pada Februari 2011. Survey menanyai Mitra dan staf lapangan ACCESS dengan pertanyaan: Perubahan apa yang telah anda buat baik secara internal dan didalam interaksi anda dengan masyarakat dan stakeholder lainnya selama tahun lalu? Hal ini ditindaklanjuti dengan pertanyaan kedua: Apa yang anda anggap sebagai faktor penting yang membuat perubahan tersebut terjadi?

yang lebih terbuka terhadap interaksi dengan pemerintah. Salah satu faktor yang menyumbang perubahan ini adalah meningkatnya tingkat kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, Mitra memiliki tingkat kepemilikan yang lebih tinggi terhadap proses pembelajaran. Mitra saat ini juga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menerapkan pendekatan GSI dan pendekatan berbasis aset. Karena hal ini, mitra saat ini menggunakan pendekatan berbasis nilai secara lebih konsisten didalam kerja mereka.

Bukti lebih dari pengembangan berbasis aset adalah munculnya inisiatif yang berasal dari warga (tidak didukung oleh proyek), interaksi yang meningkat diantara kelompok warga dan departemen pemerintah (diluar konteks proyek), meningkatnya jumlah perwakilan OMS yang terlibat di dalam proses-proses pemerintah, dan permintaan dari pemerintah daerah kepada fasilitator OMS untuk memfasilitasi proses di tingkat kecamatan dan kabupaten terkait dengan perencanaan tahunan. Dan pula, staf ACCESS juga melihat peningkatan dalam penggunaan pendekatan yang lebih apresiatif untuk perencanaan dan penyelesaian masalah di dalam pertemuan-pertemuan.

### Perkembangan di tingkat Kabupaten dan Pemerintah Provinsi

Dukungan keuangan pemerintah daerah bagi program Mitra ACCESS direfleksikan dengan jelas didalam kontribusi yang kuat dari pemerintah daerah terhadap Rencana Aksi Mitra. Hingga saat ini Mitra telah berhasil dalam meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah hingga 15.8 miliar rupiah (sekitar AUD\$1.98 million), yang terdiri atas 33% dari total anggaran dana hibah bagi Rencana Aksi.

Satu aspek dari dukungan keuangan pemerintah daerah yang perlu mendapat perhatian adalah pencairan dana keuangan mereka secara tepat waktu. Hal ini memerlukan pendekatan yang lembut dengan pemerintah daerah untuk menghindari penundaan dalam pelaksanaan program. Pada satu kasus, Mitra ACCESS, bersama pemerintah daerah, harus merubah rencana pelaksanaan sebagai akibat dari pencairan dana pemerintah yang terlambat.

Ketika Rencana Aksi Mitra telah berkembang, dan tingkat interaksi bersama pemerintah telah meningkat, sebagian Mitra telah berhasil dalam mendapatkan tambahan dana dari departemen pemerintah dan program melebihi sumbangan pada awal Rencana Aksi ditandatangani. Pada sebagian besar contoh, Unit Teknis (SKPD) telah terkesan dengan kesiapan desa untuk mengatasi isu-isu penting bagi SKPD dan dana telah dicairkan langsung kepada masyarakat sebagai hasilnya.

Pada kasus lainnya, pemerintah daerah telah menyiratkan sebuah komitmen untuk menyumbang 'program-bersama' yakni, mereplikasi apa yang telah dilakukan oleh ACCESS dan Mitranya pada wilayah geografis yang lebih luas.

Disamping sumbangan keuangan dari pemerintah daerah, terdapat tingkat interaksi yang meningkat diantara Mitra dan pemerintah daerah disegala tingkat tentang isu-isu diantaranya: partisipasi publik dalam pembuatan keputusan; meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat (khususnya kaum miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya); meningkatkan pelayanan publik; perlindungan perempuan dan anak; dan manajemen lingkungan alami yang berkesinambungan. Interaksi tersebut menghasilkan hasil-hasil yang nyata di semua kabupaten.

Interaksi yang efektif dengan Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan pertukaran pengalaman dan kolaborasi staf pemerintah provinsi di beberapa kegiatan. Pertemuan tematik tentang Penyediaan Pelayanan Publik di Kendari dibuka oleh

Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Pertemuan Tematik Makassar tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dibuka oleh Kepala BAPPEDA, dan sejumlah pegawai pemerintah provinsi dari BAPPEDA dan BPMD Sulawesi Selatan dan dari BAPPEDA NTB juga berpartisipasi selama pertemuan.

#### Perkembangan Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah Nasional dan Lembaga Donor

Selama enam bulan terakhir, ACCESS telah proaktif dalam berinteraksi untuk pengembangan masyarakat yang lebih luas untuk memastikan bahwa pembelajaran dari ACCESS dipresentasikan, didiskusikan, dan akhirnya dipertimbangkan oleh GOI dan lembaga donor dalam mengembangkan program dan kebijakan mereka. ACCESS saat ini sedang mendiskusikan sebuah perluasan proposal dengan AUSAID yang akan memungkinkan kita untuk meningkatkan upaya-upaya pengaruh kita di tingkat nasional.

ACCESS tetap menajalankan konsultasinya dengan PSF untuk mendukung pelaksanaan PNPM, program-program pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan bagi orang-orang dan sangat didukung oleh pemerintah Australia.

Sebagai persiapan dan dalam rangka tindak lanjut, ACCESS terus mendukung aksi pelaksanaan UU Pelayanan Publik dan peraturan pemerintah yang akan datang mengenai penyediaan pelayanan publik melalui koalisi OMS Nasional MP3.

#### Perkembangan Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Program AusAID dan Meningkatkan Profil AusAID

Selama masa pelaporan ini, ACCESS semakin diakui kontribusinya dalam mendukung kebijakan dan pengembangan program AusAID dan mendukung profil AusAID di provinsi tempat ACCESS bekerja.

Selama enam bulan terakhir, ACCESS telah mendukung pengarusutamaan gender dalam AIP dalam dua cara yang signifikan: 1) Dengan mengadakan sebuah lokakarya tentang pengarusutamaan gender dan kepemimpinan perempuan untuk sekitar 30 orang staf AusAID, termasuk konsultan yang berbasis di Canberra dan 2) ACCESS mendukung pengembangan survey tentang peninjauan (*stock taking*) gender terkait dengan penggabungan gender dalam program AusAID.

ACCESS menyumbang pada Review Gaji Konsultan, serta menyumbang pada Review Independen tentang Efektifitas Bantuan dengan cara mengundang salah seorang anggota tim Review selama kunjungan di Lombok.

Selain itu, ACCESS ambil bagian secara aktif pada sejumlah pertemuan Meja Bundar Tim Leader AusAID, serta dalam '*Lokakarya tentang Pemantauan dan Evaluasi mengenai Program Indonesia AusAID*' yang diinisiasi oleh Unit Prestasi dan Kualitas AusAID yang dipimpin oleh Sue Dawson.

Berdasarkan pada lokakarya Kerangka Kerja Hasil-hasil Umum AIP (*Common Results Framework/CRF*) yang dilakukan selama masa pelaporan sebelumnya, ACCESS membantu proses fasilitasi dalam lokakarya CRF yang diselenggarakan di Kupang pada bulan November 2010 dan Tim ACCESS Sumba secara konsekuen berkolaborasi menyusun rencana kerja untuk kerjasama diantara program yang

didukung oleh AusAID di Sumba Timur bersama dengan perwakilan dari AIPMNH dan PNPM.

Sejumlah pemerintah daerah dari kabupaten sasaran ACCESS telah menyetujui untuk ambil bagian dalam survey "*Diagnosa tentang penyusunan kebijakan publik berbasis bukti dibawah desentralisasi*" dimana diselenggarakan sebagai bagian dari "*Revitalisasi Sektor Pengetahuan Indonesia bagi Kebijakan Pembangunan*", sebuah studi yang ditugaskan oleh AusAID dalam kerjasama dengan BAPPENAS.

ACCESS saat ini sedang menyelidiki potensi kerjasama dengan Fasilitas Penanggulangan Bencana Australia-Indonesia (*Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction/AIFDR*) guna memastikan bahwa peta sosial yang disusun secara partisipatif di desa-desa yang didukung ACCESS dapat digunakan oleh lembaga nasional, termasuk bagi pengurangan bencana tetapi juga berpotensi untuk digunakan bagi keperluan lainnya. Tahap pertama adalah mendigitalisasikan peta dan memastikan informasi dapat diumpan balik melalui sebuah sistem yang berkaitan secara mudah.

Alat MKPPDes yang dibuat atas kerjasama dengan AIPD pada masa pelaporan sebelumnya saat ini sedang diuji di lapangan di Bantaeng dan Sumba Barat untuk melacak anggaran dan pengeluaran berdasarkan pada *RPJMDes*.

Meningkatkan profil AusAID bersama Pemerintah Nasional dan Provinsi didukung dengan cara ACCESS mengorganisir sejumlah lokakarya nasional dan seminar dengan perwakilan dari pemerintah nasional dan provinsi. Hal ini menyertakan Pertemuan Tematik dan peran Forum Lintas Aktor untuk menginisiasi perubahan yang diselenggarakan di Bali.

Staf ACCESS dan perwakilan dari pemerintah daerah Jeneponto ambil bagian dalam konferensi internasional tentang 'Tata Pemerintahan dan Pembangunan' di Padang pada bulan Desember 2010 yang diorganisir oleh Deakin University Melbourne, mengambil perhatian pada dukungan AusAID bagi masyarakat sipil.

Pengalaman Program ACCESS dalam menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dalam mendukung tata pemerintahan lokal yang demokratis disoroti oleh STA-nya untuk SBA dan para anggota Inspirit (Mitra Strategis ACCESS) dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Aset dan Kekuatan 2010, *Konferensi Kedua Asia Pasifik Pembangunan Masyarakat Berbasis Aset* yang diorganisir oleh University of Newcastle in December 2010 in Melbourne.

#### Perkembangan dalam Isu-isu Manajemen Program

Manajemen program berada di jalurnya dengan sebagian besar anggaran dana hibah kita dialokasikan bagi kegiatan di 16 kabupaten (untuk Proyek dan Dana Hibah Pengembangan Kapasitas Mitra) serta untuk mendukung kegiatan bagi sharing pembelajaran dan pengetahuan di tingkat Provinsi dan Nasional.

Permintaan untuk memperluas Program menjadi empat kabupaten baru serta untuk mempengaruhi tingkat nasional telah diajukan kepada AusAID untuk direview. Permintaan ini sangat didukung oleh pemerintah daerah di kabupaten baru, dan dukungan dari PMD yang ingin memastikan bahwa pembelajaran dan pengalaman yang didapatkan, bermanfaat bagi masyarakat luas.

Strategi manajemen resiko dan keberlanjutan direview selama masa ini dan diperbaharui berdasarkan pada pengalaman pelaksanaan dan perubahan konteks di dalam kabupaten ACCESS.

## 1 Pendahuluan

Pembangunan selama enam bulan terakhir, tidak sedikit apresiasi dari stakeholder utama dalam Program, cukup mempengaruhi dinamika disekitar Program dan semakin membuka kesempatan bagi ACCESS untuk lebih secara efektif menyumbangkan pengalamannya kepada Program Australia Indonesia (*Australia Indonesia Program/AIP*) secara umum dan Bagian Desentralisasi, Pembangunan Pedesaan dan Pengurangan Kemiskinan (*Decentralisation, Poverty Reduction and Rural Development/DPRRD*) pada khususnya.

AusAID, melalui direktur baru untuk bagian DPRRD, secara jelas mengindikasikan arahan dua sisi:

1) *Untuk memastikan bahwa upaya-upaya AusAID dimasa yang akan datang berdasarkan keberhasilan yang telah terbukti, dan bahwa program-program yang ada memberikan kontribusi yang baik dalam praktek-praktek, alat dan pengalaman bagi dasar pengetahuan ini.*

ACCESS merupakan sebuah Program yang dianggap sukses dalam memberdayakan warga, menguatkan organisasinya dan menciptakan mekanisme bagi interaksi konstruktif dengan pemerintah daerah pada tingkat yang berbeda, mengakibatkan peningkatan dasar partisipasi orang, target yang lebih baik pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatnya penyediaan pelayanan. Sejak kelahirannya pada 2002, ACCESS telah mendapatkan pengetahuan yang cukup dan fokus pada berbagi pengetahuan membuka kesempatan bagi ACCESS untuk berkolaborasi secara lebih intensif dan menyumbang pada inisiatif yang didukung oleh AusAID seperti halnya PNPM, PSF, TNP2K dan program-program seperti halnya AIPD, AIPMNH, dan AIFDR.

2) Memastikan bahwa mitra nasional, Direktur *Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat* beserta stafnya mengembangkan kepemilikan yang lebih kuat terhadap Program.

Hal ini akan dilakukan dengan cara semakin melibatkan staf PMD dalam arahan Program sesuai dengan tugas utama dan fungsi mereka seperti yang dijelaskan dibawah Direktorat. Tugas utama tersebut termasuk kerja yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, pekerjaan pedesaan, mengembangkan budaya dan tradisi setempat, menguatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

Arahan dua sisi bagi Program didukung baik oleh GOI maupun GOA. Pendekatan seperti itu akan lebih bermanfaat dari pertukaran pengetahuan dan upaya-upaya kolaboratif yang terpadu, yang pada akhirnya akan membantu efektifitas bantuan. ACCESS ada untuk mendukung berbagai pengalaman dan meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, yang akan memungkinkan perluasan upaya-upaya mempengaruhi dan lobi-lobi GOI dari dalam. Sejumlah modal perlu untuk dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hal ini dapat diambil dalam cakupan pelayanan dan anggaran ACCESS saat ini.

Laporan ini menyebutkan tentang perkembangan selama enam bulan terakhir untuk pelaporan periode Oktober 2011 hingga Maret 2011 dibandingkan dengan Tujuan Program dan lima wilayah fungsional seperti yang disebutkan dalam Cakupan Pelayanan (*Scope of Services/ SOS*).

Gambar 1: Struktur dan Kerangka Kerja ACCESS



## 2 Tujuan Program

### 2.1 Ringkasan Tujuan

ACCESS bertujuan untuk berkontribusi pada perubahan yang akan memberdayakan warga dan organisasinya untuk berinteraksi aktif dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan dampak pembangunan daerah di 16 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia. Program berkontribusi melalui tujuan berikut dibawah ini:

1. OMS mitra menggunakan pendekatan yang inklusif dan pendekatan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang partisipatif dan rasa percaya diri warga untuk Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis.
2. OMS mitra secara rutin bekerjasama satu sama lain pada peningkatan tata pemerintahan demokratis di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
3. OMS mitra secara rutin berinteraksi dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan penyediaan pelayanan yang berpihak pada kaum miskin.
4. Program pemerintah dan program lembaga donor menggunakan contoh pembelajaran dan praktek-oratek baik dari ACCESS.

### 2.2 Capaian dibandingkan dengan Tujuan

Bab berikut menjelaskan perkembangan program terhadap Tujuan Program selama masa pelaporan periode Oktober 2011 – Maret 2011. Selama masa ini, telah terjadi perubahan cukup penting di semua tujuan. Disamping itu, saat Program berkembang dan saat Mitra ACCESS melaksanakan program mereka (lihat pada dokumen ini sebagai Rencana Aksi) dua hal telah terjadi:

1. Terdapat sebuah pertemuan normal terkait tujuan-tujuan program, pendekatan system yang sesuai, dimana keberhasilan pada satu tujuan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap perubahan positif pada hal lainnya.

Oleh karena itu, contoh yang diberikan pada bab dibawah ini mencerminkan perubahan yang terjadi di banyak wilayah. Sebagai contoh, sebuah Mitra ACCESS bekerja untuk mengembangkan kemampuan dalam menggunakan pendekatan partisipatif dan pendekatan berdasarkan kekuatan bersama masyarakat yang mereka layani (Tujuan 1) guna memberdayakan masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih sukses dengan pemerintah (Tujuan 3). Kelompok-kelompok warga tersebut melihat bahwa agar mampu benar-benar mempengaruhi pemerintah mereka perlu untuk bekerja dengan kelompok lainnya di desa lain untuk menciptakan masa yang kritis (Tujuan 2). Hasil dari upaya-upaya yang mempengaruhi program lembaga donor lainnya untuk menggunakan pendekatan yang sama di kabupaten tempat mereka bekerja (Tujuan 4). Jadi satu contoh sebenarnya dapat ditempatkan dibawah semua Tujuan, tergantung pada dimana penekanannya.

2. Disaat Mitra ACCESS melaksanakan programnya, banyak hasil yang positif yang dihasilkan dan dirasakan di 16 kabupaten sasaran.

Laporan ini tidak bertujuan mendaftar seluruh capaian tersebut, tetapi untuk mengidentifikasi kecenderungan di seluruh kabupaten. Karenanya, saat daftar dari contoh-contoh cukup banyak maka, contoh-contoh tersebut telah dipilih untuk menguraikan kecenderungan yang jelas.

## 2.2.1 Tujuan 1

**Mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggunakan nilai-nilai partisipatif dan pendekatan inklusif untuk menguatkan kapasitas dan rasa percaya diri warga bagi tata pemerintahan lokal yang demokratis**

Selama enam bulan terakhir, ACCESS telah membuat perkembangan yang cukup penting dalam capaian dari Tujuan 1. Hingga saat ini ACCESS memberikan sekitar 162 kegiatan pengembangan kapasitas kepada Mitra pada area mendorong nilai-nilai pendekatan partisipatif.

Informasi yang termuat dalam laporan tiga bulanan Mitra dan dalam 32 Review Perkembangan Mitra (*Partner Progress Reviews/PPR*) yang diselenggarakan bersama Mitra ACCESS dan para penerima manfaat menunjukkan bahwa lebih dari 90% Mitra telah membuat perkembangan yang memuaskan dalam meresapi dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi utama didalam organisasi mereka dan dalam interaksi mereka dengan kelompok-kelompok warga. Temuan tersebut didukung oleh hasil dari penelitian jangka pendek yang diadakan dengan semua 63 Mitra ACCESS pada Januari 2011<sup>2</sup> yang bertujuan menentukan perubahan apa yang telah terjadi selama tahun sebelumnya, dan faktor-faktor yang menyumbang pada perubahan tersebut. Mitra ACCESS menanggapi bahwa perubahan yang paling penting adalah dalam perilaku dan nilai-nilai mereka – yang lebih partisipatif, lebih mampu dalam pendekatan Penyertaan Gender dan Sosial (GSI), lebih berbasis aset, lebih transparan, lebih terbuka pada interaksi dengan pemerintah, dan bertindak lebih sebagai perantara bagi kelompok warga. Salah satu faktor utama perubahan ini adalah meningkatnya kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, Mitra memiliki tingkat kepemilikan yang lebih tinggi atas proses pembelajaran. Mitra saat ini sedang menggunakan pendekatan berbasis nilai secara lebih konsisten di dalam kerja mereka.

Pendekatan ACCESS sedang digunakan secara konsisten oleh Mitra dan sedang dipahami oleh para penerima manfaat. Sebagai contoh, pendekatan berbasis kekuatan yang didorong oleh ACCESS sedang digunakan secara lebih sistematis di tingkat masyarakat dan dengan stakeholder lainnya. dalam banyak pertemuan dan diskusi yang terjadi di tingkat masyarakat, pendekatan apresiatif - mencari faktor-faktor keberhasilan dan kesuksesan – sedang digunakan. Contoh yang baik dari hal ini, termasuk pekerjaan *Kampung Pelayanan Publik yang sedang dijalankan di Jeneponto*, dan dalam interaksi *Gawe Rapah* antara departemen pemerintah dan kelompok masyarakat di Lombok Barat. *Gawe Rapah* dan *Kampung Pelayanan Publik* merupakan forum pertemuan tradisional yang sepenuhnya didanai secara mandiri dimana warga lokal dan pemerintah daerah berinteraksi dengan fokus pada warga yang memberikan umpan balik kepada pemerintah, seperti halnya memunculkan keluhan mereka tentang penyediaan pelayanan publik. Sukses dari forum tersebut dikarenakan pendekatan apresiatif yang digunakan, dimana tidak terlalu konfrontatif dengan pemerintah.

Didalam melaksanakan program mereka ditingkat desa, Mitra ACCESS mendorong masyarakat untuk menggunakan aset lokal. Sebagai contoh, di desa Pao dan desa

---

<sup>2</sup> Survey ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Pertemuan Tahunan Mitra Strategis yang diselenggarakan pada Februari 2011. Survey itu menanyakan kepada Mitra dan staf lapangan ACCESS dengan pertanyaan: Perubahan apa yang anda buat baik secara internal maupun didalam interaksi anda dengan masyarakat dan stakeholder lainnya selama tahun lalu? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan: Apa yang menurut anda faktor penting yang membuat perubahan itu memungkinkan untuk terjadi?

Meredekaya di Gowa, masyarakat membangun aula untuk sekolah lapangan petani dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Di Jeneponto, Mitra ACCESS Pattiro Jeka telah mendorong anggota masyarakat memberikan penginapan kepada rakyat selama kegiatan lintas desa, seperti halnya pertemuan Pelayanan Publik Desa yang mereka organisir, dimana dihadiri oleh warga, pegawai pemerintah, anggota pusat pengaduan dan DPRD.

Strategi GSI ACCESS diterima oleh Mitra ACCESS dan masyarakat, dengan tingkat

*Saya merasa senang dengan pendekatan CLAPP-GSI karena sekarang pemerintah desa mulai memperhatikan kami. Sebelumnya kami tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, meskipun saya miskin. Pada masa lalu, hanya orang kaya yang mendapat manfaat dari inisiatif desa. Sekarang saya disertakan dalam pertemuan desa ini dan bila dimasa depan hal-hal tertentu tidak berubah, paling tidak saya dapat membuat pemerintah mampu menjawab. (Dg. Lu'mu-warga dari Borong Palala, Gowa)*

partisipasi perempuan dalam kegiatan Mitra mencapai 60% pada masa pelaporan ini. Hasil berikut dari studi Kepemimpinan Perempuan yang diadakan oleh Kapal Perempuan selama masa pelaporan sebelumnya, ACCESS telah memberikan pengembangan kapasitas tambahan di wilayah kepemimpinan perempuan guna membantu Mitra dalam memastikan bahwa partisipasi perempuan sebenarnya berakibat pada sumbangan yang signifikan dalam mengatasi ketidakadilan sosial. Hingga saat ini, Mitra di Sulawesi Selatan dan Bima telah mengembangkan sebuah Panduan Pembelajaran bagi OMS tentang bagaimana untuk menggabungkan kepemimpinan perempuan ke dalam program masyarakat. Hal itu memberikan alat yang efektif guna

memastikan partisipasi perempuan yang adil tidak hanya pada kegiatan, tetapi juga di wilayah pembuatan keputusan dan peran kepemimpinan.

Terdapat perubahan yang signifikan pula disoroti pada perilaku kelompok warga dimana Mitra ACCESS bekerja. Di seluruh kabupaten, kelompok warga menggunakan pendekatan dan nilai-nilai demokratis di dalam kegiatan dan interaksi mereka. Kelompok-kelompok ini: membangun rasa percaya diri yang lebih untuk berinteraksi dengan pihak lain dalam mengejar kepentingan mereka; mereka menjadi lebih kritis; mereka menemukan atau menciptakan ruang tempat mereka berinteraksi dengan pemerintah; mereka menjadi lebih aktif di dalam organisasi mereka (khususnya perempuan dan kaum miskin); dan kelompok warga mulai mengambil tindakan di semua kabupaten. Sebagai contoh:

- Pusat Pengaduan di Jeneponto, Lombok Barat dan Bantaeng, secara aktif terlibat dalam memastikan bahwa terdapat mekanisme yang jelas untuk mengajukan keluhan hingga tingkat kabupaten.
- Di Jeneponto, para anggota GP3A telah semakin aktif dalam mengkritisi anggota dewan mereka dan memperjuangkan dalam organisasi untuk keputusan yang lebih baik pada proses distribusi air dan pembayaran bagi kaum miskin.
- Kelompok ekonomi (BUMDes, koperasi, kelompok petani), dan kelompok pelayanan publik (pusat pengaduan, kelompok orang tua dan kelompok kesehatan) berpartisipasi dalam proses Musrenbang, bukan sebagai warga perorangan tetapi sebagai anggota konstituen yang terorganisir guna mempengaruhi perencanaan dan kebijakan.
- Di Takalar, forum kesehatan desa mengkritisi pelayanan bidan lokal dan hampir dibawa ke pengadilan oleh suami bidan (seorang polisi) untuk alasan fitnah. Pada akhirnya forum dapat menunjukkan bukti lemahnya pelayanan dan kasus tersebut dicabut dan bidan itu meminta maaf.

- Di Kupang, sebuah kelompok ekonomi perempuan, Noelbaki, secara sukses berjuang memastikan bahwa perempuan dan kaum miskin dilibatkan dalam proses pembangunan desa.
- Di Lombok Tengah, kelompok petani perempuan di empat desa telah sukses dalam memperjuangkan ijin dengan departemen kehutanan untuk mengelola hutan masyarakat di wilayah Mareje Bonga. Tiga belas kelompok desa juga sukses dalam mendapatkan 1.5 juta rupiah dari pemerintah daerah untuk pengeluaran operasional.
- Di Buton, 12 kelompok ekonomi di 12 desa telah membangun dana simpan pinjam mereka sendiri dan dana tersebut telah dipinjamkan kepada para anggotanya berdasarkan pada kriteria dan aturan yang disetujui yang dibuat oleh kelompok itu sendiri.
- Di Kupang dan TTS, warga semakin banyak menggunakan teknologi telepon genggam untuk memecahkan permasalahan dengan penyedia pelayanan publik.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan positif ini, dengan daya dorong utama pengembangan kapasitas dan alat yang berhubungan, dan kegiatan pembelajaran yang didukung oleh ACCESS. Selama masa ini, sebagai contoh, sejumlah pertemuan Forum Direktur diadakan, dimana membantu fokus Mitra pada 'gambar besar' dan mendorong kepemilikan atas kegiatan pengembangan kapasitas. Klinik pendekatan berbasis kekuatan diadakan bersama Mitra guna membantu menunjukkan penerapan praktis dari pendekatan tersebut. Pertemuan tematik tentang Pelayanan Publik diselenggarakan di Kendari pada November 2010 dan tentang Perencanaan dan Penganggaran diselenggarakan di Makassar pada Januari 2011 dan hal itu telah membantu Mitra dan anggota masyarakat untuk merefleksi dan mengartikulasikan nilai-nilai utama dan bagaimana cara mereka menerapkan hal itu didalam praktek.

Faktor pendukung lainnya termasuk diantaranya:

- Mitra semakin melihat perannya sebagai perantara dengan masyarakat dan kelompok warga sebagai fokus pada aksi dan advokasi. Pemahaman ini berakibat pada lebih banyak kegiatan yang bertujuan pada pemberdayaan masyarakat dan kelompok warga untuk berjuang sendiri dan dalam bekerjasama dengan kelompok warga lainnya.
- Program Mitra mulai memberikan hasil, memberikan umpan balik positif tentang konsep partisipasi, pendekatan berbasis kekuatan, penyertaan gender dan sosial, pengorganisasian dan pemberdayaan. Umpan balik ini telah menghasilkan rasa bangga dalam kerja dan motivasi yang kuat organisasi Mitra untuk lebih menggunakan pendekatan ini dimasa depan. Setelah didapatkan hasil yang baik, Mitra mendapatkan apresiasi baru dari pemerintah dan stakeholder lainnya dan diminta untuk menyumbang secara lebih rutin dan sistematis pada diskusi kebijakan.
- Konsistensi dan Mitra Strategisnya dalam menggunakan prinsip-prinsip ini merupakan sebuah faktor penting dalam mendukung Mitra lokal untuk mengambil dan menggunakan nilai-nilai tersebut kedalam praktek.

Kedepannya, fokus akan ada pada konsolidasi pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai, khususnya di tingkat masyarakat.

### 2.2.2 Tujuan 2

***OMS Mitra secara rutin berkolaborasi satu dengan yang lain dalam meningkatkan tata pemerintahan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.***

ACCESS memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dalam mencapai Tujuan 2. Khususnya pada organisasi warga, dengan dibantu oleh Mitra ACCESS, mengidentifikasi wilayah kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih sistematis di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kegiatan ini terjadi di seluruh 16 kabupaten. Di delapan kabupaten ACCESS yang lama<sup>3</sup>, kolaborasi telah dikuatkan kedalam jaringan dan kelompok resmi, sementara di delapan kabupaten baru<sup>4</sup>, kebutuhan atas aliansi telah diidentifikasi dan proses konsolidasi sedang berjalan. Begitu pula, Mitra ACCESS bekerja secara bersama, khususnya melalui Forum Lintas Aktor (FLA) guna memastikan bahwa masing-masing menyumbang pada keseluruhan sukses dari Pertemuan Apresiasi Kabupaten(PAK).

Hingga saat ini, 1,001 kelompok warga telah terbentuk, diantaranya:

- 46 BUMDes
- 327 Pusat Masyarakat
- 195 Kelompok Ekonomi
- 162 Kelompok Petani/Nelayan
- 20 Kelompok Lingkungan
- 54 Kelompok Manajemen Sumber Daya Alam
- 68 Kelompok Pelajar/Orang Tua
- 22 Kelompok Isu-Isu Sosial
- 40 Kelompok Pengguna Air
- 29 Kelompok Muda-Mudi
- 38 Kelompok Fasilitator Desa

Salah satu stakeholder yang paling aktif yang membentuk aliansi berada ditengah fasilitator desa (*Kader Pembangunan Masyarakat*). ACCESS saat ini mendukung 3,491 fasilitator desa (54 persen perempuan) dalam 16 kabupaten sasaran. Contoh dari jaringan yang efektif oleh fasilitator desa pada masa pelaporan ini diantaranya:

- Di Sumba Barat, 68 fasilitator desa – 34 laki-laki dan 34 perempuan – dari 23 desa bertemu untuk berbagi cerita sukses, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan dan untuk mendiskusikan bagaimana untuk menjaga para fasilitator dimasa depan. Salah satu rekomendasi pertemuan adalah untuk membentuk sebuah asosiasi fasilitator desa.
- 165 fasilitator desa di Bantaeng mengorganisir diri mereka sendiri kedalam sebuah Forum untuk Pembelajaran Bersama untuk mempromosikan pengembangan orang yang lebih memiliki kemampuan untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.
- Di Gowa, 36 fasilitator desa telah membentuk sebuah aliansi untuk mempromosikan isu-su kesehatan publik, khususnya cara untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak.
- Di Buton, fasilitator desa telah menjadi lebih percaya diri dalam memperjuangkan 'satu desa-satu rencana' yang didukung oleh pemerintah. Pada Januari 2011, fasilitator desa dan kepala desa bersama-sama mendiskusikan secara langsung dengan masing-masing SKPD tentang bantuan yang mereka perlukan dari SKPD. Sebuah perjanjian juga telah dicapai dalam diskusi antara fasilitator dan kepala desa dan PNPM di kecamatan Siontapina bahwa semua program PNPM akan menggunakan rencana desa yang didukung oleh ACCESS (*RPJMDes*) sebagai dasar pendanaan.

<sup>3</sup> NTB – Lombok Barat, Lombok Tengah; NTT –Sumba Timur , Sumba Barat; Sulsel - Bantaeng, Jeneponto; Sultra - Buton, Muna

<sup>4</sup> NTB – Bima, Dompu; NTT-Kupang, TTS; Sulsel - Takalar, Gowa; Sultra – Kota Bau-Bau, Buton Utara

Contoh spesifik dari kelompok warga lainnya yang bekerja selama masa pelaporan ini termasuk diantaranya:

- Di Lombok Tengah, 13 kelompok usaha perempuan (KPUK) yang mewakili sekitar 200 anggota di 10 desa berkumpul bersama untuk mempromosikan nilai-nilai demokratis dalam pembangunan ekonomi melalui pelibatan dirinya dalam perencanaan desa untuk mewakili kepentingan perempuan.
- Di Buton, kelompok warga yang didukung oleh Mitra ACCESS Sintesa telah membentuk sebuah Aliansi Kelompok Nelayan dan Petani dengan jumlah total anggota 376 (173 laki-laki dan 203 perempuan). Tujuan dari Aliansi adalah untuk meningkatkan posisi tawar mereka sesuai dengan pasar dan pemerintah dan untuk mempromosikan kemandirian melalui peningkatan akses terhadap dana investasi.
- Di Lombok Barat, sebuah forum pertemuan tradisional yang dinamakan *Gawe Rapah* diorganisir oleh 12 pusat pengaduan dari 12 desa yang mencakup 6 kecamatan. Selama tiga hari sekitar 300 warga bertemu dengan staf departemen pemerintah dan mengadakan diskusi pada wilayah permasalahan – sebagian besar tentang penyediaan pelayanan publik. Pertemuan tersebut dihargai dan didukung oleh pemerintah daerah (Bupati, SKPD, Kepala Desa).
- Di Bantaeng, sebuah aliansi anggota pusat masyarakat dari 25 desa memantau pemerintah dan mendorong terbentuknya Komisi Penyediaan Pelayanan Publik di tingkat kabupaten.
- Di Sumba Barat, empat Pusat Sumber Daya Warga dari empat desa menyajikan hasil penelitian mereka tentang kualitas pelayanan penyediaan air bersih kepada dewan air lokal, pemerintah, DPRD dan media.
- Di Lombok Tengah dan Lombok Barat, Asosiasi Mareje Bonga dan Mitra ACCESS Konsepsi berturut-turut bekerja dengan kelompok warga untuk mereview prosedur operasional mengenai bagaimana untuk mengelola hutan daerah di seluruh desa untuk memastikan sebuah pemahaman dan aplikasi yang sistematis dari proses dan prosedur tersebut.
- Di Kupang, sebuah aliansi Kelompok Ekonomi Kecil Perempuan telah muncul untuk mempromosikan memiliki lokasi usaha bersama. Mereka juga memperjuangkan Musrenbang perempuan dan alokasi dari anggaran desa (ADD) di 10 desa.
- Fasilitator desa di Bantaeng juga telah secara aktif bekerja dengan pemerintah daerah dan PNPM dalam pembentukan Musrenbang perempuan sebagai tambahan proses perencanaan desa.
- Mitra ACCESS YAJALINDO di Bantaeng berkolaborasi dengan OMS lainnya dalam penyusunan peraturan tentang perencanaan dan penganggaran dan rancangannya telah dikirimkan kepada DPRD untuk didiskusikan.
- Di Jeneponto, direktur dan staf dari semua Mitra ACCESS bertemu setiap bulannya untuk mendiskusikan cara mencocokkan program mereka dan untuk mendiskusikan isu-isu strategis dan bagaimana untuk memecahkan isu-isu tersebut dalam mempromosikan tata pemerintahan demokratis.

---

*Forum masyarakat di Lombok merupakan contoh yang bagus dari kemungkinan sukses didalam berkolaborasi dengan Pemerintah dan OMS dan menunjukkan apa yang memungkinkan bila masyarakat dan organisasinya diberi ruang yang cukup untuk berbagi dan belajar dari pengalamannya dan mengkolaborasikannya kedalam (Dan Hunt, AIPD Deputy Director selama kunjungan ke Sekretariat Gawe Rapah)*

---

Faktor yang paling penting yang mendukung Mitra ACCESS dalam upaya pembentukan jaringannya telah menjadi pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya jaringan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Mitra mulai melihat terdapat isu-isu kepentingan umum di seluruh desa, kecamatan dan kabupaten bahkan provinsi dan bahwa kolaborasi mengenai isu-isu dapat berakibat pada hasil-hasil yang nyata. Pemahaman ini telah menjadi unsur utama dalam review PAK dan kerja yang telah dilakukan oleh Mitra Strategis ACCESS, Yappika tentang penyebarluasan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di tiap kabupaten.

Mitra ACCESS juga mulai mengakses mitra strategis nasional dan regional, seperti halnya jaringan MP3 tentang penyediaan pelayanan publik, dan melihat pengaruh yang dapat ditawarkan kepada mereka. Forum Direktur diadakan pada Oktober 2010, umpan balik dari Penilaian Pengembangan Kapasitas dan pertemuan Tematik yang diselenggarakan selama masa pelaporan ini telah menyumbang pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mitra di semua tingkatan didalam mengembangkan rasa kepercayaan yang lebih besar dan membangun aliansi.

Pada masa yang akan datang, ACCESS, bersama Mitra Strategisnya, akan membantu Mitra untuk memfokuskan upaya mereka pada tujuan Program secara keseluruhan. Mitra yang baik dapat melihat 'gambar besarnya' maka, mereka akan lebih mampu dalam mengidentifikasi kolaborasi strategis.

### 2.2.3 Tujuan 3

***Mitra OMS secara rutin berinteraksi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan penyediaan pelayanan yang berpihak pada kaum miskin***

ACCESS Tahap II telah membuat perkembangan yang cukup signifikan dalam mencapai Tujuan 3. Dukungan pemerintah untuk program Mitra ACCESS adalah sangat tinggi, dicerminkan dalam sumbangan yang solid dari pemerintah daerah terhadap Rencana Aksi Mitra. Hingga saat ini Mitra telah berhasil mempengaruhi kontribusi dari pemerintah daerah hingga 15.8 miliar rupiah (sekitar \$1.98 juta), terdiri dari 33% dari total; anggaran dana hibah bagi program mereka. Tabel 1 menunjukkan kontribusi total dari pemerintah bagi program Mitra untuk masa pelaporan saat ini. Sumbangan dalam program Mitra melampaui 37%.

**Tabel 1: Sumbangan Pemerintah kepada Rencana Aksi Mitra Oktober 2010-Maret 2011**

Mitra	Judul Proyek	Sumbangan ACCESS	Sumbangan Pemerintah Daerah
Yayasan Karaeng Opu	Program untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis	431.350.000	480.475.000
Yayasan Jalarambang Indonesia	Program untuk Meningkatkan Lembaga Kebijakan Publik dan Warga untuk Mendukung Pembangunan Lokal yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Di Kabupaten Bantaeng	899.465.000	1.114.465.000
Jaringan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Manajemen BUMDes yang Demokratis, Transparan, Partisipatif dan	430.677.500	250.000.000

Mitra	Judul Proyek	Sumbangan ACCESS	Sumbangan Pemerintah Daerah
	Mempromosikan Kebebasan Warga		
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Jeneponto Hijau dan Bersih	467.912.500	1.245.455.250
Aliansi Koperasi Tani Assamaturu	Usaha Ekonomi Produktif Berdasarkan Pada Potensi Lokal	486.590.000	269.365.000
Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Buton	Meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai upaya untuk meningkatkan akses warga pada pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan murah di Kotamadya Bau-Bau	666.500.000	311.725.000
Yayasan Mitra Turatea	Menguatkan Kapasitas Kaum Miskin dan Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Inklusif.	708.197.500	308.980.000
<b>Total</b>		<b>3,622,780,000</b>	<b>2,135,525,250</b>

Disaat Rencana Aksi Mitra berkembang dan tingkat interaksi dengan pemerintah meningkat, beberapa Mitra telah berhasil mendapatkan tambahan dana dari departemen pemerintah dan program melebihi jumlah dana awal yang disetujui. Pada saat Rencana Aksi ditandatangani. Sebagai contoh, selama masa pelaporan ini di Sumba Barat, dua jaringan Kelompok Tani dari desa Bondotera dan Manukuku telah menerima masing-masing Rp.205 juta dari departemen kehutanan untuk mendukung kerja mereka dalam manajemen sumber daya alam (*resource management/NRM*). Pada kedua contoh, dana ini telah diberikan langsung kepada masyarakat. Di Bantaeng, Pemerintah Daerah telah memberikan Rp.100 juta kepada tiap BUMDes sebagai dana untuk kegiatan ekonomi.

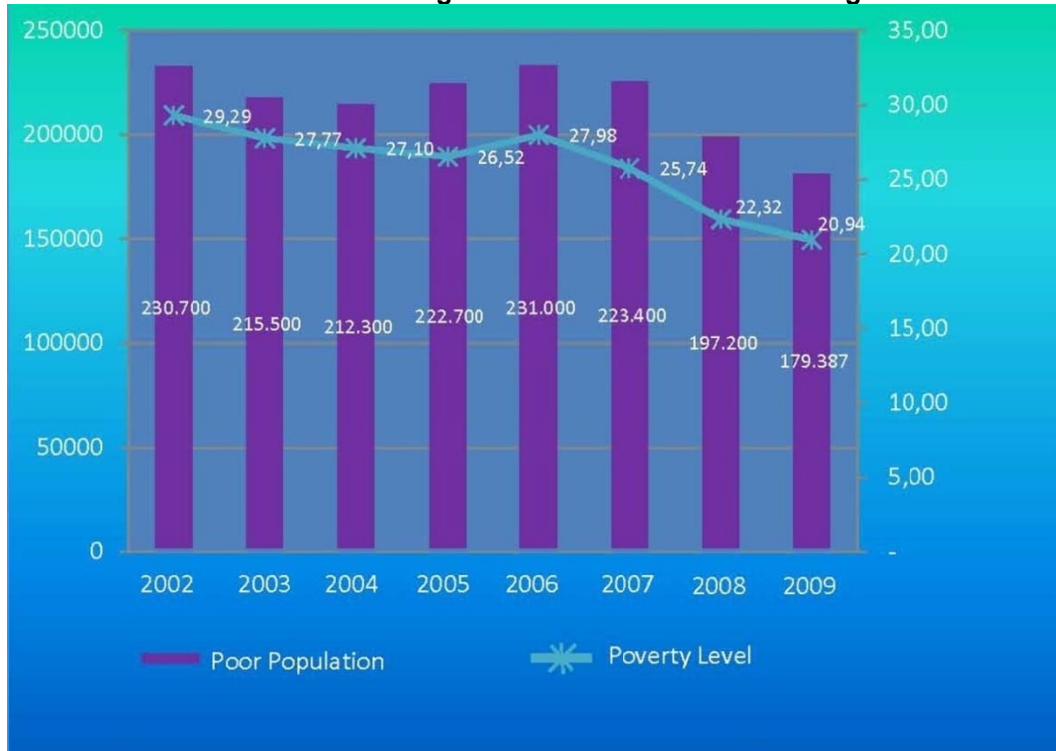
*Apapun keadaan dimasa lalu, jelas bahwa OMS memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama seperti halnya pemerintah bila sampai pada pemberdayaan dan pembangunan desa. Karena hal seperti itu cocok bila pemerintah dan OMS bekerjasama untuk mengoptimalkan pembangunan kabupaten. (Bp.M.Jafar Kepala BAPPEDA Bima)*

Apa yang membuat capaian dalam Tujuan 3 bersifat penting adalah meningkatnya interaksi Mitra dengan pemerintah daerah disegala tingkatan mengenai isu-isu: partisipasi publik dalam pembuatan keputusan; meningkatnya peluang ekonomi bagi masyarakat (khususnya kaum miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan); meningkatnya pelayanan publik; perlindungan perempuan dan anak; dan manajemen yang berkelanjutan atas lingkungan alam. Interaksi ini menghasilkan hasil yang nyata di seluruh kabupaten. Di NTB sebagai contoh, Kepala

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, H. Soedaryanto, pada sesi pleno Musrenbang bagi Lombok Utara pada Maret 2011 menyebutkan perubahan dalam tingkat kemiskinan di Lombok Tengah (lihat Gambar 2) dan menyatakan:

“Pengembangan strategi pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang bekerjasama dengan OMS dan Mitra ACCESS menghasilkan pengurangan tingkat kemiskinan hingga 3% antara 2007 dan 2008 dengan kecenderungan seperti ini yang terus berlanjut. Saya meminta pemerintah Lombok Utara untuk menggunakan model yang sangat ekstrem ini dalam melawan kemiskinan”.

**Gambar 2: Perubahan didalam Tingkat Kemiskinan di Lombok Tengah**



Terdapat tingkat kepercayaan yang lebih tinggi yang sedang berkembang diantara pemerintah dan OMS lokal. Rasa kepercayaan yang meningkat ini, berkembang melalui interaksi yang positif, membuka ruang baru bagi OMS untuk berjuang secara lebih efektif, terlibat dalam komite dan komisi, dan mendapatkan persetujuan bagi usulan peraturan. Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, 176 peraturan pemerintah daerah (termasuk pada tingkat desa dan kabupaten) telah sukses dilobi hingga saat ini oleh Mitra ACCESS dan OMS lokal.

**Tabel 2: Jumlah Peraturan Pemerintah Daerah Yang Dinegosiasikan Melalui Mitra ACCESS**

Kabupaten	Wilayah Tematik				Total
	NRM	Perencanaan	Pelayanan Publik	Ekonomi Lokal	
Buton	3	-	3	-	6
Bantaeng	-	24	2	46	72
Jeneponto	-	17	-	-	17
Sumba Barat	6	49	-	-	55
Lombok Barat	-	20	4	-	24
Lombok Tengah	2	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>176</b>

Di kabupaten sasaran lainnya, banyak peraturan berbentuk rancangan peraturan, sebagai contoh:

- Di Kotamadya Bau-Bau, pemerintah desa telah merancang peraturan desa guna memastikan prinsip-prinsip partisipasi dan penyertaan gender sebagai bagian dari proses Musrenbang.
- Di Buton Utara, Mitra ACCESS Yakiin dan FLA telah menyiapkan dan menyajikan sebuah lembar akademik dan rancangan peraturan tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif kepada DPRD untuk didiskusikan menuju formulasi sebuah 'Perda'.
- Di Muna, Mitra ACCESS Lambu Ina telah meyakinkan 10 desa untuk membuat sebuah peraturan desa untuk mempromosikan laki-laki sebagai kader Pos Kesehatan, untuk menghilangkan asumsi bahwa Pos Kesehatan hanya untuk perempuan saja.
- Di TTS, Mitra ACCESS SSP telah membuat sebuah lembar akademik dan sedang menghasilkan sebuah rancangan peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan untuk didiskusikan dengan DPRD.
- Di Kupang, Mitra ACCESS INCREASE telah membantu pemerintah desa di sepuluh desa untuk merancang peraturan desa terkait dengan penyediaan pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan.
- Di Sumba Timur, 31 peraturan pemerintah desa telah dirancang terkait dengan rencana desa yang disusun dengan cara-cara yang partisipatif dengan bantuan dari Mitra ACCESS.

Salah satu faktor utama dari hasil yang luar biasa telah merubah persepsi Mitra terhadap arti interaksi. Hal ini didukung oleh intervensi pengembangan kapasitas oleh Mitra Strategis ACCESS, khususnya dalam pelatihan advokasi, yang memungkinkan Mitra untuk mengembangkan strategi yang nyata bagi interaksi. Hal ini berpusat pada peningkatan peran kelompok masyarakat dalam proses, kemasam yang efektif dari pesan-pesan penting, dan interaksi yang lebih intensif dengan para pembuat keputusan. FLA juga merupakan unsur dalam memfokuskan perhatian pada isu-isu dan menyediakan akses kepada Mitra pada para pembuat keputusan dalam wilayah kebijakan utama.

Di bulan yang akan datang, perhatian perlu diberikan terhadap kualitas produk (pendukung) legislatif yang dihasilkan oleh Mitra guna memastikan bahwa pemerintah daerah di segala tingkatan dan DPRD yakin terhadap nilai dari produk tersebut.

#### **2.2.4 Tujuan 4**

##### ***Program pemerintah dan program lembaga donor menggunakan pembelajaran dan contoh praktek yang baik dari ACCESS***

Selama masa pelaporan ini, ACCESS telah membuat perkembangan yang sangat baik dan telah berada pada jalurnya untuk mencapai Tujuan 4. Pendekatan dan metode menjadi titik referensi baik bagi program GOI dan GOA. Selama enam bulan terakhir, ACCESS telah proaktif dalam berinteraksi dengan pengembangan masyarakat yang lebih luas untuk memastikan bahwa pembelajaran dari ACCESS disajikan, didiskusikan dan akhirnya dipertimbangkan dalam pengembangan baik program maupun kebijakan.

##### **Mempengaruhi Kebijakan AusAID**

ACCESS terus berinteraksi aktif dengan personil AusAID dalam program Indonesia. Interaksi tersebut bertujuan untuk mengembangkan kesadaran terhadap nilai-nilai pendekatan, metodologi dan alat-alat ACCESS, dan membantu para pembuat

keputusan di AusAID untuk membuat kebijakan yang mencerminkan perilaku yang baik.

Selama periode ini ACCESS menerima kunjungan anggota Tim Review AusAID yang melihat pada efektifitas dan keterkaitan Program di Lombok 2011. ACCESS juga memberikan masukan di sejumlah Diskusi Meja Bundar Para Tim Leader (*Team Leader Round Table Discussions*) dan memberikan masukan ke dalam Kerangka Kerja Pemberian Upah Konsultan akhir-akhir ini.

Berdasarkan pada lokakarya Kerangka Kerja Hasil-Hasil Umum AIP (*AIP Common Results Framework/CRF*) yang diselenggarakan sebelum masa pelaporan ini, ACCESS membantu proses fasilitasi dalam lokakarya CRF yang diadakan di Kupang bulan November 2010 dan Tim ACCESS Sumba secara terus-menerus berkolaborasi menyusun sebuah rencana kerja untuk kerjasama antara program yang didukung oleh AusAID di Sumba Timur dengan perwakilan dari AIPMNH dan PNPM.

Pada bulan Maret 2011, ACCESS mendukung sebuah lokakarya pengarusutamaan gender dan kepemimpinan perempuan bagi 30 staf AusAID, termasuk konsultan gender yang berbasis di Canberra (lihat pada bab 6.1 untuk informasi lebih lanjut mengenai lokakarya tersebut).

#### Kolaborasi dengan Program AusAID lainnya

ACCESS telah bekerja dengan program AusAID lainnya untuk melembagakan CRF. Serta, pada tingkat pelaksanaan, ACCESS telah menyumbang pada perilaku yang baik di program lainnya. Beberapa contoh termasuk diantaranya:

- AIPD telah menyatakan keinginannya dalam menggunakan pendekatan ACCESS untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam kerjanya di Lombok Tengah.
- ACCESS saat ini sedang beroperasi dengan AIFDR guna memastikan bahwa peta sosial yang dibuat secara partisipatif yang didukung oleh ACCESS dapat digunakan oleh lembaga nasional, termasuk untuk penanggulangan bencana tetapi juga berpotensi untuk digunakan bagi keperluan lainnya. Langkah pertama adalah mendigitalisasikan peta dan memastikan informasi dapat diberi masukan melalui sebuah sistem berkaitan dengan mudah.
- Salah satu Mitra lokal ACCESS, Mitra Turatea terlibat dalam evaluasi Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia di Jeneponto, membantu dalam penggunaan teknik partisipatif dalam pengumpulan data di tingkat desa.
- ACCESS berkolaborasi dengan AIPMNH di Sumba dalam memfasilitasi proses RPJMDes dan memperjuangkan peraturan tentang program kesehatan dan anggaran bagi perempuan dan anak.
- Mitra ACCESS Partners dan satf ACCESS telah memberikan masukan pada substansi dari peraturan daerah kabupaten yang baru mengenai kesehatan ibu hamil dan anak bersama AIPMNH di Sumba Barat dan Sumba Timur.
- Alat MKPPDes dibuat dalam kerjasamanya dengan AIPD saat ini sedang dicobakan di Bantanege dan Sumba Barat di tingkat desa dan kecamatan untuk melacak anggaran dan pengeluaran berdasarkan pada RPJMDes. Telah diantisipasi sebelumnya berdasarkan hasil hingga saat ini, uji coba tersebut akan diperluas.

### Kolaborasi dengan Program Nasional dan Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Nasional (Pusat)

ACCESS tetap berkonsultasi dengan PSF untuk mendukung pelaksanaan PNPM yang merupakan program yang dipimpin pemerintah Indonesia untuk pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat, yang sangat didukung oleh pemerintah Australia.

Serta, ACCESS terus mendukung aksi pada penerapan hukum tentang pelayanan public melalui koalisi OMS dengan MP3. Beberapa contoh kolaborasi dengan program nasional pada masa pelaporan ini termasuk diantaranya:

- Pegawai dari Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan BAPPENAS mengunjungi Mitra ACCESS di Sulawesi Selatan, saat pelantikan pilot proyek nasional terpadu bagi pembangunan desa (Pandu Gerbang Kampung) sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mendukung penggunaan teknik pemetaan kesejahteraan yang dibuat oleh ACCESS di tiga desa percontohan.
- ACCESS berdiskusi secara rinci dengan MP3 mengenai kerja advokasi terkait dengan pelaksanaan UU Pelayanan Publik 25/2009 termasuk bagaimana untuk bekerja dengan ombudsman nasional yang baru ditunjuk. ACCESS telah meminta persetujuan dari AusAID untuk mendukung inisiatif tersebut.
- Pemerintah daerah Dompu dan Sumba Barat telah mengajukan tanggapan mereka untuk mengambil bagian dalam survey "Diagnostik pada perumusan kebijakan berbasis bukti publik dibawah program desentralisasi" (*Diagnostic on evidence-based public policy formulation under decentralisation*) dimana diselenggarakan sebagai bagian dari 'Revitalisasi Sektor Pengetahuan Indonesia untuk Kebijakan Pembangunan', sebuah studi yang ditugaskan oleh AusAID dalam kerjasamanya dengan BAPPENAS.
- ACCESS terus bekerja secara erat dengan PNPM di semua wilayah tetapi khususnya dalam mengembangkan cara untuk melakukan pendekatan satu desa-satu rencana di sejumlah wilayah. Meningkatkan fokus kerjasama untuk menjaga kualitas RPJMDes dengan cara menambahkan nilai yang mendukung paling tidak proses minimal. Mitra kami PIAR di kabupaten Kupang telah diminta oleh PNPM untuk bekerja dengan mereka untuk pembuatan RPJMDes.

### Mempengaruhi Program Pemerintah Provinsi

Selama masa pelaporan, ACCESS telah memiliki interaksi dengan pegawai pemerintah provinsi. Staf pemerintah provinsi dan DPRD secara aktif berpartisipasi dalam Pertemuan Tematik mengenai Penyediaan Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kendari (pertemuan itu dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Pertemuan Tematik mengenai Perencanaan dan Penganggaran secara Partisipatif dilakukan di Makassar. Pada pertemuan ini, staf pemerintah provinsi dari BAPPEDA dan BPMD Sulawesi Selatan dan dari BAPPEDA NTB ikut berpartisipasi pula. Beberapa hasil yang cukup menarik adalah seperti dibawah ini:

- Beberapa provinsi telah mengindikasikan ketertarikan dalam menggunakan pendekatan ACCESS dan Sulawesi Selatan, NTB dan NTT telah secara resmi meminta tambahan kabupaten untuk disertakan sebagai bagian dari wilayah sasaran ACCESS. ACCESS telah menerima permintaan resmi dari

pemerintah tersebut untuk menambahkan empat kabupaten<sup>5</sup> pada Program. Usulan tersebut saat ini sedang dipertimbangkan oleh AusAID dan MOHA.

- BPMD dan BAPPEDA di NTB dan Sulawesi Selatan telah mengumpulkan anggaran untuk pertemuan koordinasi mereka dimana pendekatan ACCESS akan dibicarakan.
- Mitra ACCESS, Mitra Turatea, dibantu oleh VSO, sedang bekerja dengan BAPPEDA di empat kabupaten di NTT tentang pemetaan sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif.
- Mitra ACCESS LBI di Gowa telah diminta oleh pemerintah provinsi untuk mereplikasi pendekatannya terhadap manajemen sumber daya alam di wilayah resapan Walanae dan Cenranae di kabupaten Wajo.

### Mempengaruhi Pemerintah Tingkat Kabupaten

Selama enam bulan terakhir, banyak contoh pemerintah daerah di kabupaten sasaran ACCESS menggunakan dan memperluas pendekatan dan metodologi ACCESS. Beberapa contoh diantaranya:

- Setelah studi banding ke Bantaeng untuk melihat pengembangan BUMDes, BAPPEDA di Takalar telah menyiapkan satu desa sebagai percontohan bagi pengembangan *BUMDes*.
- Di Dompu, kepala daerah, telah berjanji untuk mereplikasi pendekatan perencanaan dan penganggaran di semua kecamatan yang belum didukung oleh Program dengan menggunakan dana APBD.
- Di Lombok Tengah, Mitra ACCESS AMB sedang bernegosiasi dengan departemen kehutanan untuk mereplikasi pendekatannya di wilayah yang dilindungi lainnya di Lombok Tengah.
- Di Sumba Barat, pemerintah setuju untuk mengujicobakan MKPPDes yang akan melacak pengeluaran di tingkat desa.
- Di Sumba Barat, setelah pelatihan SKPD dalam penggunaan Pemetaan Hasil (*Outcome Mapping/ OM*) selama masa pelaporan sebelumnya, empat anggota FLA telah ditunjuk sebagai bagian dari tim pemerintah untuk menyusun visi lima tahun bagi kabupaten.
- Bupati Kupang telah memutuskan untuk menggunakan pendekatan ACCESS untuk pemilihan fasilitator desa, memperkuat keseimbangan gender diantara mereka. Bupati telah setuju bahwa fasilitator akan dipilih oleh warga desa sendiri.
- Di Bima dan Dompu, pemerintah daerah mempercayai fasilitasi dari perencanaan partisipatif terhadap 10 organisasi mitra ACCESS. Di Bima, lima Mitra mendapat undangan dari *BPMD* untuk memfasilitasi Musrenbang. Di Dompu, *BPMD* mengeluarkan surat keputusan meresmikan pengaturan.
- Bupati baik dari Dompu dan Kupang saat ini aktif sebagai anggota FLA dan ambil bagian dalam review PAK. Kedua Bupati tersebut secara resmi telah meminta untuk selalu diberi informasi mengenai perkembangannya.

---

*Bupati Kupang bangga dengan pendekatan ACCESS yang bersifat dari bawah keatas dan melibatkan semua unsur masyarakat. Yang paling mengesankan bagi Bupati adalah Mitra ACCESS direkrut dari desa oleh karena itu menanamkan kepemilikan pembangunan desa ditengah desa itu sendiri (Winston Rondo, Direktur CSO CIS)*

---

<sup>5</sup> Pulauan Selayar di Sulawesi Selatan; Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah di NTT; dan Lombok Utara di NTB

Kemampuan Mitra ACCESS untuk mampu menunjukkan hasil-hasil yang nyata di lapangan, yang memiliki penerapan langsung bagi pemerintah di segala tingkatan, telah menyumbang terhadap suksesnya ACCESS dalam mempengaruhi pemerintah. Mitra ACCESS menjadi semakin baik dalam menjelaskan 'perilaku yang baik' mereka dan pendekatan ACCESS dan hal ini telah menjadikan lebih mudah dalam meyakinkan pihak dari luar mengenai kegunaan dan penerapan yang mudah dari pendekatan ini. Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pegawai nasional (pusat), AusAID dan program dari pemerintah daerah dan pemerintah lainnya juga telah menyumbang terhadap Program. Mitra Strategis ACCESS mampu dan mau mendorong nilai dan pendekatan Program pada berbagai lingkungan pergaulan tempat mereka bekerja diluar ACCESS dimana menghadirkan kesempatan baru bagi Program untuk mempromosikan kerjanya dan mempengaruhi pihak lainnya.

---

*Saya sangat tertarik dengan kerja-kerja yang dilakukan ACCESS di TTS, khususnya didalam pelatihan fasilitator desa untuk menyusun rencana desa (RPJMDes) dengan keterlibatan masyarakat. Ini merupakan pendekatan baru karena disebagian besar kasus hal itu dilakukan oleh para elit. Kami juga sangat tertarik dengan pendekatan berbasis asset karena pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih mandiri. (Rai Fernandes, Bupati TTU)*

---

nasional (pusat), AusAID dan program pemahaman yang lebih baik terhadap

---

*Saya benar-benar terkesan dengan pendekatan yang digunakan ACCESS dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana desa (RPJMDes) di kabupaten lainnya di Sumba. Pendekatan ACCESS benar-benar mendorong pemberdayaan masyarakat (Drs. Umbu Pateduk, Bupati Sumba Tengah)*

---

dari pemerintah daerah dan pemerintah lainnya juga telah menyumbang terhadap Program. Mitra Strategis ACCESS mampu dan mau mendorong nilai dan pendekatan Program pada berbagai lingkungan pergaulan tempat mereka bekerja diluar ACCESS dimana menghadirkan kesempatan baru bagi Program untuk mempromosikan kerjanya dan mempengaruhi pihak lainnya.

Pada masa yang akan datang ACCESS akan memulai kerja lebih lanjut dalam melaksanakan dan menulis studi kasus dan cerita sukses dari Para Mitra untuk membantu dalam mengartikulasikan dampak yang muncul dan pendekatan Program apakah dapat diterapkan.

### **3 Perkembangan Pelaksanaan Terhadap Lima Wilayah Fungsional ACCESS**

Sejumlah kegiatan Program utama diidentifikasi selama tahap rancangan ACCESS. 21 kegiatan utama tersebut dikelompokkan dalam lima Wilayah Fungsional, yang merupakan bagian dari penyampaian kontrak untuk Program dan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab Program serta stakeholder lainnya. Perkembangan terhadap indikator capaian dan kegiatan dijelaskan dibawah ini, sementara perkembangan terhadap indikator capaian dan kegiatan bagi lima Wilayah Fungsional untuk masa pelaporan Oktober 2010 – Maret 2011 disajikan dalam Matrik Pemantauan Perkembangan (Progress Monitoring Matrix) pada Lampiran 2.

#### **3.1 Wilayah Fungsional 1:**

##### **Untuk menyediakan sumber daya dan mengatur programm.**

Tim manajemen dan administrasi telah berada pada jalur semestinya dalam hal penyediaan sumber daya dan pengaturan Program. Kegiatan utama berikut diselenggarakan selama masa pelaporan:

### **Identifikasi dan interaksi fisik dan sumber daya manusia:**

*ACCESS dan AIPD berbagi kantor di BAPPEDA tidak hanya membuat koordinasi menjadi semakin mudah, tetapi akan memberikan sebuah kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman antara satu dengan lainnya (Bayu, Kabid.Litbang, BAPPEDA)*

Upaya-upaya lebih lanjut pada pengharmonisan dibawah bendera AIP dilaksanakan dengan berkantornya ACCESS dan AIPD dalam satu kantor di gedung BAPPEDA di Mataram, Lombok.

Pengadaan peralatan kantor terus berlanjut pada masa pelaporan ini berdasarkan pada kebutuhan sesuai dengan protokol pengadaan barang ACCESS.

Pada bulan November 2010, terdapat pertemuan puncak Program Officer (PO) di Bali yang bertujuan mempertemukan semua Program Officers dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi diantara provinsi, untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dan untuk menyusun sebuah strategi kerja yang terpadu. Kegiatan ini dirancang untuk menanggapi laporan MRG sebelumnya yang mencatat bahwa sebagian staf memiliki akses langsung yang kurang terhadap keputusan strategis yang diberikan sifat yang berpindah dari manajemen Program.

ACCESS membantu Kelompok Review Pemantauan ketiga oleh AusAID dan MOHA ke Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober 2010 dimana mereka mengunjungi pegawai pemerintah di tingkat kabupaten, termasuk Bupati Buton Utara, desa-desa, FLA (termasuk review PAK di Buton Utara) dan dengar pendapat publik mengenai rancangan peraturan daerah di Buton dan Buton Utara. Tim tersebut juga menghadiri pertemuan tematik tentang Pelayanan Publik di Kendari diakhir kunjungan mereka.

Selama masa pelaporan ini, satu Pertemuan Koordinasi dan Pembelajaran (*Coordination and Learning Meeting/CLM*) dilakukan di Bali pada bulan Desember 2010 diikuti oleh dua CLM tingkat provinsi yang diadakan di NTB dan Sulawesi Selatan. CLM dilakukan untuk mendiskusikan isu-isu pengembangan program dan manajemen, dan sebagai sebuah kesempatan bagi pengembangan kapasitas dan berbagi pembelajaran. CLM dirancang untuk memastikan ketaatan pada Strategi Program dan untuk memastikan bahwa semua Tim Provinsi memiliki pandangan yang jelas tentang kontribusi mereka pada hasil yang diharapkan dari Program.

Program menyediakan dukungan sekretariat bagi pertemuan kelima Komite Koordinasi Program (*Program Coordinating Committee/PCC*) yang diselenggarakan pada bulan Januari 2011. Selama pertemuan PCC diluahkan untuk mengakrabkan diri dengan Direktur *Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat* yang baru dan orang *AKLN* yang ditunjuk dari Depdagri. Program juga menerima kunjungan lapangan sebagai tindak lanjut Direktur dan staf dari *PMD* ke Lombok pada bulan Februari 2011.

Lokakarya Perencanaan Tahunan bagi APY4 diselenggarakan pada bulan Februari 2011, mempertemukan staf yang berbasis di Bali, Koordinator Provinsi dan para PO. Lokakarya tersebut dilakukan untuk menilai perkembangan hingga saat ini dan merencanakan tahun anggaran berikutnya, menyiapkan sasaran yang jelas untuk pelaksanaan.

Sebuah review Kesehatan dan Keamanan Kerja (*Occupational Health and Safety /OHS*) dilaksanakan kantor Sulawesi Tenggara selama masa pelaporan dengan tidak ada ketidaktaatan serius yang dilaporkan.

Penilaian staf diselenggarakan untuk enam anggota staf selama masa pelaporan (untuk informasi lebih lanjut mengenai pengembangan staf lihat bab 8.1).

Sebuah usulan bagi penambahan sumber daya sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap permintaan GOI untuk perluasan Program di empat kabupaten baru di NTB, NTT dan Sulawesi Selatan yang diajukan kepada AusAID untuk dipertimbangkan pada bulan Maret (lihat bab 2.2.4 untuk lebih rincinya).

**Prosedur Pembuatan dan pengelolaan, sistem manajemen dana hibah, program website:**

Memperbarui database untuk mengelola program dana hibah terus berlanjut selama masa pelaporan. Hal ini termasuk pembaruan bulanan system *MIS*, *ERSULA* dan pembaruan harian dari Sistem Manajemen Dana Hibah, *GIFTS*. Pelatihan penyegaran untuk masukan data *ERSULA*, khususnya data yang terkait dengan M&E, dilakukan di semua kantor provinsi, terkecuali Sumba dimana direncanakan untuk masa pelaporan berikutnya.

Website ACCESS juga diperbarui setiap bulannya selama masa pelaporan.

Tim Keuangan ACCESS memulai audit Rencana Aksi pada masa pertengahan program. Sejumlah 33 audit telah dilakukan selama masa pelaporan ini (lihat lebih jelasnya pada bab 6.3).

Semua laporan kontrak kepada AusAID, termasuk laporan dana hibah bulanan, Tabel Pelanggaran Keuangan, laporan enam bulan, PAMELS Yang Telah Direvisi dan catatan hasil PCC diajukan pada tanggal semestinya.

Tantangan utama yang dialami selama masa pelaporan di Wilayah Fungsional 1 termasuk:

- Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Kerangka Kerja Hasil Umum setelah lokakarya NTT pada bulan November 2010 telah mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian revisi PAMELS yang terakhir.
- Sementara perekrutan staf baru dapat dikelola dengan efektif dan efisien, tetapi masih membutuhkan waktu bagi staf baru untuk membiasakan diri mereka dengan Program. CLM tingkat provinsi diselenggarakan untuk membantu staf baru dalam menyesuaikan dengan cepat pada strategi dan pendekatan Program.
- Beban kerja yang penuh merupakan sebuah tantangan yang selalu ada bagi staf dan manajemen. Komunikasi yang meningkat dan jumlah inisiatif koordinasi strategis yang lebih banyak seperti halnya Pertemuan PO yang diselenggarakan selama masa pelaporan dan CLM tingkat provinsi telah membantu tim provinsi dalam melakukan perencanaan terfokus dan lebih strategis.
- Meskipun mencoba untuk mengakomodasi semua Program AIP di tempat yang sama merupakan cara yang efektif dalam melakukan lebih banyak kerjasama dan pertukaran diantara Program, memang menjadi jelas bahwa kantor AIP NTB yang disediakan oleh BAPPEDA Provinsi menjadi semakin kecil untuk mengakomodasi semua Program. Program AIPD adalah memobilisasi dan meningkatkan jumlah staf untuk ditempatkan di kantor NTB. Program INDII serta perwakilan AusAID Regional untuk Nusa Tenggara, juga berencana untuk bertempat dikantor yang sudah penuh sesak ini. Kurangnya ruang berdampak langsung pada *modus operandi* ACCESS, yang terfokus pada penciptaan ruang dan kesempatan bagi Para Mitra, pemerintah daerah

dan warga untuk datang dan bertemu. Ruang kantor saat ini tidak dapat menampung hal itu, dan pula telah dipenuhi oleh jumlah staf yang telah ada disana.

### 3.2 Wilayah Fungsional 2:

#### **Berinteraksi dengan Masyarakat Sipil (Civil Society/CS) dan Pemerintah Daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama**

Selama masa pelaporan, Wilayah Fungsional 2 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tujuan utama dari Wilayah Fungsional 2, seperti yang dijelaskan pada laporan sebelumnya, adalah untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif dimana organisasi Mitra dapat melaksanakan Rencana Aksi mereka untuk mempromosikan peningkatan tata pemerintahan lokal yang demokratis. Lebih dari itu, memfungsikan FLA yang berpotensi untuk menjadi motor aksi yang berkelanjutan dalam mengejar tujuan tata pemerintahan lokal yang demokratis. Guna menjalankan peran, FLA harus memiliki rasa kepemilikan yang tinggi atas konsep tata pemerintahan demokratis dan bagaimana hal ini dapat didorong di kabupaten tetangga mereka.

Perkembangan telah terjadi terhadap kegiatan sistem utama selama masa pelaporan ini seperti dibawah ini:

#### **Identifikasi kabupaten dan interaksi progresif dengan stakeholder kabupaten untuk menyempurnakan interaksi (berdasarkan pada PAK) dan membangun hubungan kepercayaan dan nilai-nilai bersama**

Staf ACCESS dan, pada tingkat yang lebih besar daripada yang sebelumnya, Mitra lokal mengidentifikasi 'juara' baru dalam pemerintah daerah dan DPRD. Interaksi diintensifkan melalui diskusi tentang isu-isu penting dan promosi peraturan. Kelompok masyarakat lokal sekarang juga berinteraksi dengan pemerintah dan pelan-pelan tapi pasti membangun ketertarikan dan orang yang aktif yang lebih luas lagi dengan visi bersama bagi tata pemerintahan lokal yang demokratis. Proses review rencana tahunan kabupaten memberikan sebuah forum yang penting bagi diskusi dan pendalaman pemahaman perubahan demokratis.

#### **Pembentukan FLA di tiap kabupaten**

Selama masa ini, ACCESS menggunakan empat strategi utama untuk mendukung konsolidasi FLA (*multi stakeholder forums/DSC*) di semua kabupaten. Strategi ini termasuk:

- Memastikan bahwa forum fokus pada tujuan akhir peningkatan partisipasi dan kontribusi warga dalam tata pemerintahan demokratis dengan menggunakan review PAK untuk memfokuskan ulang.
- Pengidentifikasian dan mendukung motivator utama yang melihat FLA sebagai perubahan demokratis.
- Pengidentifikasian isu-isu penting dimana FLA dapat bertindak sebagai penghubung dengan pemerintah dan sebagai kendaraan bagi advokasi tentang isu-isu kebijakan dalam hak-hak mereka sendiri.
- Menggunakan hasil Indek Masyarakat Sipil (IMS) untuk meningkatkan pemahaman kondisi masyarakat sipil secara internal serta kesempatan interaksi secara eksternal untuk menajamkan fokus PAK.

Strategi ini telah digunakan untuk efek yang baik secara keseluruhan, ACCESS mencatat bahwa sepuluh FLA berfungsi secara efektif, dua masih dalam proses konsolidasi (TTS dan Muna) dan empat (Gowa, Takalar, Jeneponto dan Sumba Timur) masih kesulitan untuk menemukan identitas yang khusus.

Pada bulan November 2010, diselenggarakan pertemuan nasional perwakilan FLA di Bali. Pertemuan itu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mendorong motivator utama dari OMS maupun pemerintah. Serta, anggota FLA terlibat dalam Pertemuan Tematik yang diselenggarakan selama masa laporan ini (tentang Pelayanan Publik diadakan di Kendari pada bulan November 2010 dan tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif diselenggarakan di Makassar pada bulan Januari 2011). Kegiatan tersebut telah membantu FLA menemukan peran mereka dalam mempromosikan tata pemerintahan lokal yang demokratis.

Di semua kabupaten kecuali empat kabupaten yang disebutkan diatas, FLA bertemu secara rutin dengan 49 pertemuan yang diadakan pada masa pelaporan ini. Pertemuan FLA lebih banyak terfokus pada perkembangan isu-isu, daripada berbagi secara umum, hal ini menunjukkan forum tersebut tumbuh menjadi semakin dewasa. Sebagai contoh:

- Di Dompu dan Bima, FLA telah bertemu delapan kali selama masa tersebut dengan fokus utama pada peningkatan perencanaan dan penganggaran partisipatif dan meningkatkan proses Musrenbang di semua tingkatan. Salah satu hasil dari ini adalah bahwa terdapat kesepakatan untuk menggunakan fasilitator Mitra yang dilatih oleh ACCESS dari tingkat desa hingga kabupaten.
- Di Lombok Barat, FLA telah bertemu empat kali dengan fokus pada penguatan kerja pengentasan kemiskinan di kabupaten. FLA dari Lombok Barat dan Lombok Tengah mengadakan sebuah lokakarya kecil pada bulan November dengan mengundang media, DPRD, OMS, warga dan departemen pemerintahan daerah. Tujuan dari pertemuan adalah untuk mendiskusikan komposisi dan peran Tim Koordinasi Kabupaten untuk Pengentasan Kemiskinan (TKPKD). Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk merevitalisasi TKPKD dan di Lombok Tengah, untuk memiliki perwakilan OMS, anggota DPRD, dan tim departemen pemerintah .
- Di Bau-Bau, FLA bertemu tujuh kali untuk mendiskusikan berbagai topik termasuk diantaranya: standar minimum bagi pelayanan kesehatan publik; persiapan untuk hari HIV & AIDS Internasional; peningkatan pelayanan dan penggunaan pendekatan berbasis kekuatan.
- Di Buton, FLA bertemu sebanyak lima kali untuk mendiskusikan diantara topik lainnya: temuan penelitian mengenai pengelolaan hutan Labusango; rancangan peraturan mengenai pelayanan pendidikan; Rencana Aksi Yasinta mengenai kesehatan kehamilan dan anak dan persiapan untuk Musrenbang.
- Di Sumba Barat, FLA bertemu sebanyak lima kali dengan fokus pada pengembangan posisi bersama pada pembukaan tambang baru di Sumba Tengah. Kertas posisi mereka telah dipublikasikan di Koran *Pos Kupang*. Selain itu, anggota FLA melakukan kunjungan lapangan untuk mendidik masyarakat setempat mengenai isu-isu pertambangan dan membahas undang-undang tentang eksplorasi pertambangan dan produksi.
- Di Sumba Timur, FLA telah mempromosikan masyarakat untuk lebih terpusat pada pendekatan untuk pembangunan dengan menggunakan kerangka kerja OM. FLA mengambil kesempatan untuk mempengaruhi *Bupati* untuk menggunakan pendekatan ini dalam pengembangan rencana strategis lima tahun untuk Sumba Timur (*RPJMD*).
- Di Gowa dan Takalar, dua kabupaten dimana FLA telah berjuang untuk mengkonsolidasikan, Forum Direktur yang terdiri dari Mitra ACCESS menyusun sebuah agenda resmi untuk merevitalisasi FLA dan menjadikannya lebih aktif dan relevan.

Di semua kabupaten, Mitra Strategis ACCESS, Yappika, telah bekerja dengan FLA (atau tim pendukung FLA) untuk menggunakan hasil IMS karena berarti pemahaman yang lebih baik dan mengkonseptualisasikan Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK). Hal ini berujung pada pengembangan strategi komunikasi di tiap kabupaten untuk menjelaskan secara lebih baik arah dari Rencana dan strategi yang digunakan terhadap pencapaian hasil.

---

*Review PAK telah menjadi proses yang sangat dinamis, dan kesempatan telah diberikan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan mengartikulasikan visi mereka tanpa batasan. Hasilnya, saya merasa lebih dekat dengan masyarakat saya sendiri dan memahami dengan lebih baik prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan pada skala yang kecil saya akan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dan pendekatan inklusif tersebut dalam pertemuan dalam kerja saya sendiri sebagai kepala PKK (Wa Ode Farida Bahardin, Ketua PKK Muna)*

---

Review PAK telah diselenggarakan di tujuh kabupaten pada tahun ini dengan lima yang dilaksanakan pada masa pelaporan ini – Buton, Buton Utara, Bau-Bau, TTS dan Kupang. Review sisanya direncanakan selama masa pelaporan berikutnya sebelum mulainya APY4. Review PAK, dikuatkan oleh pertemuan FLA Nasional dan kerja IMS, disamping tidak merubah visi kabupaten, telah menajamkan fokus dan membangun keinginan yang diperbaharui dalam kerja forum multi stakeholder dan

rencana mereka. Di Dompu dan Kupang, Bupati telah bergabung dalam FLA dan terlibat aktif dalam pertemuan dan diskusi tindak lanjut.

Secara umum, FLA mendapatkan rasa percaya diri di sebagian besar kabupaten dan lebih baik dalam menentukan peran mereka, tidak sebagai organ ACCESS, tetapi lebih sebagai anggota yang memiliki komitmen terhadap ‘perilaku masyarakat’ yang mendorong tata pemerintahan lokal yang demokratis.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian FA2 termasuk dukungan aktif dari tim ACCESS di tiap kabupaten, mendorong forum untuk menemukan peran dan mandatnya sendiri. Energi yang sangat besar telah dimasukkan kedalam revitalisasi FLA dan komitmen ini mulai menampakkan hasilnya. Meningkatnya keterlibatan pemerintah daerah dan anggota DPRD di dalam FLA telah membuka pintu kantor pemerintahan dan telah memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk menunjukkan capaian-capaian program di lapangan dan mempromosikan Rencana Kabupaten secara lebih luas.

Hambatan utama di beberapa wilayah masih mengenai tingkat kepemilikan. Di wilayah dengan latar belakang ketergantungan yang kuat terhadap proyek, dimana forum dilihat sebagai inisiatif ACCESS dan tidak berkaitan dengan tujuan akhir tata pemerintahan demokratis, FLA telah kesulitan untuk menentukan peran untuk dirinya sendiri. Fokus selama periode pelaporan berikutnya adalah untuk mendorong perluasan FLA ke masyarakat yang lebih luas yang memiliki perhatian terhadap tata pemerintahan lokal yang demokratis dan untuk meluaskan kelompok ini menuju kearah akar rumput.

### **3.3 Wilayah Fungsional 3:**

#### **Mengembangkan kapasitas lembaga lokal untuk memenuhi fungsi dalam demokrasi desentralisasi.**

Selama enam bulan terakhir, terdapat perkembangan yang baik dalam Wilayah Fungsional 3 dan semua kegiatan telah berada pada jalurnya dalam mendukung perubahan yang positif dalam organisasi Mitra dan masyarakat yang mereka layani.

Mitra melaporkan perubahan positif baik dalam interaksi dengan masyarakat yang mereka layani maupun dengan stakeholder lainnya. Survey pendek diadakan dengan semua 63 mitra dan staf lapangan ACCESS sebelum pertemuan Mitra Strategis Tahunan di bulan Februari 2011. Mitra ACCESS merasakan bahwa telah terjadi perkembangan yang baik dan bahwa Mitra Strategis memberikan pelayanan yang berharga. Selama masa pelaporan ini terdapat tekanan yang meningkat pada bantuan teknis yang berarti penyampaian dukungan Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building/CB*).

Kegiatan penting yang diselenggarakan selama masa ini termasuk diantaranya:

#### Rencana CB Kabupaten dan Provinsi:

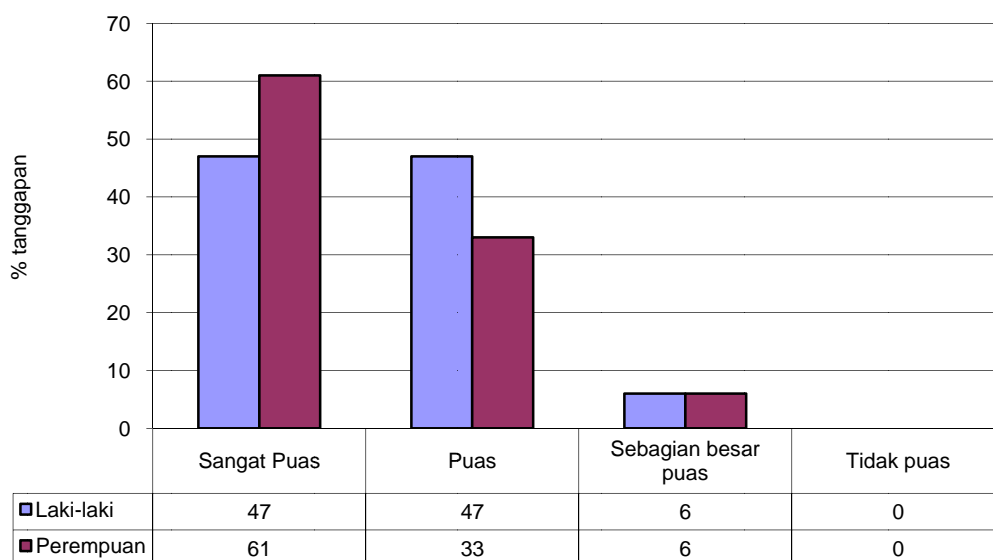
Berdasarkan pada Penilaian Kapasitas yang dilakukan pada bulan Mei 2010, 16 rencana CB telah dibuat oleh staf ACCESS sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan. Pada bulan Oktober dan November 2010, hasil dari penilaian CB disampaikan kepada Forum Direktur di kabupaten masing-masing untuk didiskusikan guna mendapatkan umpan balik. Forum ini memiliki tujuan yang khusus untuk meningkatkan rasa kepemilikan CB sebagai bagian dari proses pembelajaran keorganisasian baik dalam tiap organisasi maupun diantara organisasi OMS. Survey CB yang disampaikan diatas mengindikasikan bahwa sebagian besar Mitra melihat refleksi internal terstruktur dan proses pembelajaran sebagai salah satu alasan untuk sukses didalam pengembangan kapasitas baru.

#### Mengelola sebuah program CB yang berdasarkan pada kebutuhan:

Disepanjang masa pelaporan, kegiatan CB terus berlanjut seperti yang telah direncanakan. Dua belas PGA bagi Mitra Strategis saat ini ada, dengan tiga PGA yang telah ditandatangani. Dibawah PGA ini, 14 *Task Notes* dikeluarkan untuk mengadakan 45 kegiatan CB di masa enam bulan ini, termasuk Sembilan masukan Bantuan Teknis, enam pelatihan di dalam kelas, dan 30 lokakarya. Jumlah total peserta 926 orang (55.4% perempuan).

Para peserta menyiratkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dalam CB yang mereka terima (lihat Gambar 3) dengan 94 persen laki-laki dan perempuan yang merasa puas bahwa pelatihan telah memenuhi maksud dan tujuan pelatihan.

**Gambar 3: Kepuasan Peserta dengan Kegiatan CB**



Lebih dari 95 persen Mitra mencatat, selama pertemuan pemantauan Review Perkembangan Mitra (*Partner Progress Review/PPR*) dan didalam survey CB, bahwa kegiatan CB yang didukung oleh ACCESS memiliki dampak yang penting pada kerja mereka baik di tingkat internal maupun di tingkat masyarakat.

Klinik pendekatan berbasis kekuatan diorganisir bagi semua Mitra ACCESS pada periode ini. Klinik tersebut dirancang untuk memungkinkan Mitra untuk menerapkan pendekatan tersebut dalam kerja yang mereka lakukan bersama kelompok-kelompok warga.

Pertemuan Mitra Strategis Tahunan diselenggarakan selama empat hari di bulan Februari 2011, dengan dihadiri oleh 12 Mitra Strategis. Menurut Mitra Strategis faktor-faktor sukses dalam pendekatan CB untuk memperdalam pembelajaran dan membawa perubahan diantaranya:

- Pengembangan kapasitas terfokus secara geografis (berdasarkan kabupaten)
- Sebuah ruang diciptakan untuk pembelajaran kreatif dan dialog diantara Mitra lokal (termasuk warga) berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip.
- Penggunaan cerita sukses sebagai bahan pembelajaran, alat pemberdayaan, kegiatan promosi, kegiatan advokasi dan bahan penyebarluasan.
- Mengembangkan kemitraan strategis dengan orang-orang penting dan organisasi guna mempromosikan keberlanjutan kerja pemberdayaan dengan warga dan promosi tata pemerintahan lokal yang demokratis.

Strategi ini akan terus dikembangkan oleh staf ACCESS dalam proses Perencanaan Tahunan di tingkat provinsi dan membentuk dasar bagi diskusi dengan Mitra.

### **Menciptakan ruang dan memberikan kesempatan untuk munculnya pemimpin muda dan perempuan yang potensial:**

Terms of reference (ToR) bagi Studi Kepemudaan disiapkan selama masa pelaporan sebelumnya dan Pusat Studi Populasi dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada telah dipilih untuk mengadakan studi tersebut. Hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding waktu yang diperkirakan sebelumnya untuk menyelesaikan negosiasi kontrak dengan Universitas, dan karena hal itu, terdapat penundaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun demikian, studi masih akan dilaksanakan selama APY3.

Gita Pertiwi telah memberikan bantuan di sejumlah kabupaten kepada pemimpin perempuan yang terpilih mengenai isu-isu yang terkait dengan peningkatan peran mereka dalam organisasi dan masyarakat mereka. Kerja ini akan terus berlanjut hingga masa pelaporan berikutnya.

Faktor utama kesuksesan dalam Wilayah Fungsional 3 adalah terkait dengan pendekatan yang berdasarkan nilai-nilai yang digunakan oleh ACCESS. Staf serta Mitra Strategis berkomitmen terhadap nilai-nilai dasar tata pemerintahan demokratis dan konsisten terhadap penerapan nilai-nilai ini dalam kerja yang dilakukan bersama Mitra ACCESS. Hal ini memungkinkan fokus pada 'gambar besar' perubahan yang merupakan kontribusi Mitra ACCESS melalui pelaksanaan Rencana Kabupaten.

Tantangan yang terus-menerus bagi ACCESS dan Mitra Strategisnya adalah meneruskan komunikasi yang efektif dan rutin guna memastikan bahwa perubahan yang diharapkan dapat dicapai. Penyebaran Program secara geografis dan rencana

kerja mandiri untuk tiap kabupaten membuat koordinasi menjadi sebuah unsur penting dalam penyampaian Program CB.

### 3.4 Wilayah Fungsional 4:

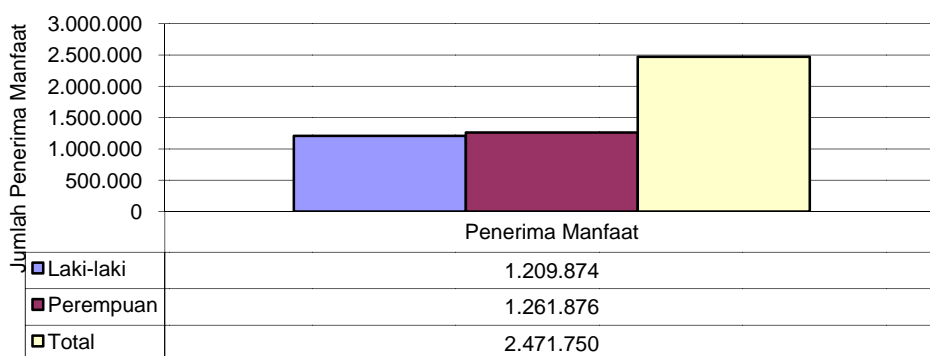
#### Mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya pengembangan diri yang mandiri.

Secara keseluruhan, ACCESS telah membuat perkembangan yang baik dan telah berada pada jalurnya di Wilayah Fungsional 4 dengan 63 Mitra yang saat ini sedang pada tahap program mereka di seluruh kabupaten.

#### Membantu OMS melaksanakan Rencana Aksi dan memberikan bantuan pendampingan dan manajemen lokal:

Saat ini terdapat 63<sup>6</sup> dana hibah untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Mitra. Terjadi 7 penambahan dari yang sebelumnya. Dana hibah untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi yang mencakup 781 desa dengan lebih dari seribu kelompok warga yang menerima bantuan di desa tersebut bersama sekitar 2,471,750 penerima manfaat Program (lihat Gambar 4).

**Gambar 4: Penerima Manfaat untuk Rencana Aksi Saat Ini**



Kerja yang sangat berat telah dilaksanakan oleh staf ACCESS untuk mendapatkan Mitra Program dan dana hibah yang mendukung kegiatan mereka i. Upaya yang terkoordinasikan oleh tim provinsi, administrasi dan tim keuangan dan *technical officers* membantu Mitra untuk menghasilkan rencana baru serta menjaga pemantauan pada 63 Rencana Aksi yang sedang dikembangkan.

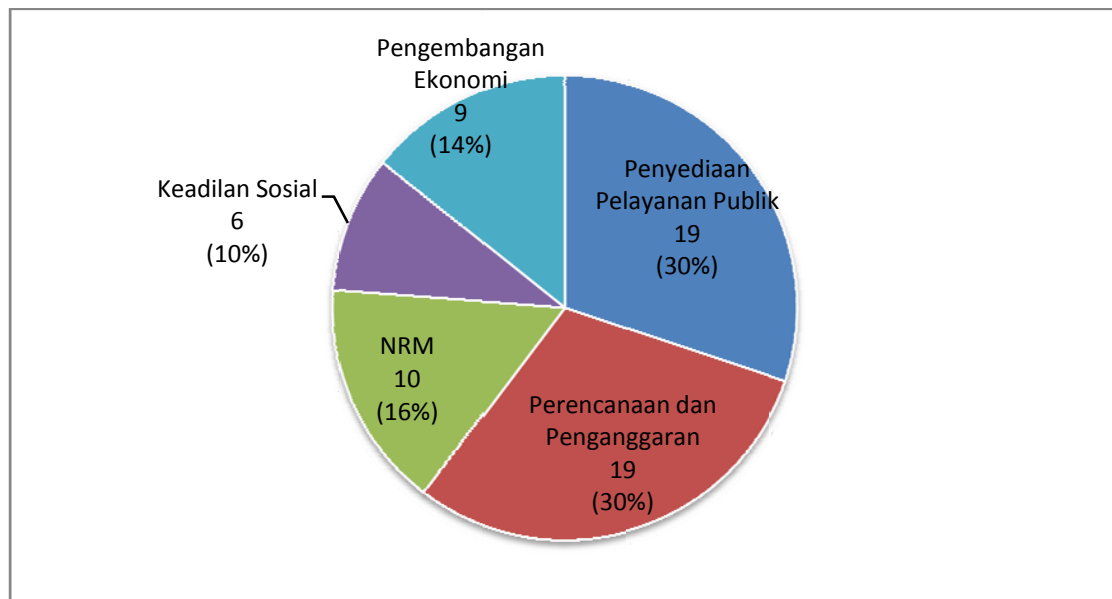
Secara umum, Laporan Perkembangan Mitra tiba secara teratur, jila tidak sedikit terlambat. Tim provinsi secara rutin memberikan umpan balik pada laporan tersebut, termasuk mengingatkan ketepatan dalam mengirimkan pelaporan. Serta, laporan keuangan ditinjau setiap bulannya dan diberikan umpan baliknya secara tertulis.

Semua program Mitra yang didukung masuk ke dalam lima wilayah tematik (lihat gambar 5): penyediaan pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran

<sup>6</sup>70 PGA untuk Rencana Aksi telah diterbitkan hingga saat ini. Meskipun demikian, satu Rencana Aksi di Lombok tidak berlanjut akibat dari manajemen keuangan yang buruk. 69 PGA sisanya, enam Rencana Aksi di Sulawesi Selatan telah diperbarui. Dari sisi kontrak, pembaharuan ini dianggap sebagai PGA baru, meskipun memang merupakan kontrak untuk program yang sama. Karena itu, pembaruan tidak dianggap sebagai Rencana Aksi yang terpisah untuk kepentingan laporan ini.

partisipatif, pengembangan ekonomi lokal, manajemen sumber daya alam dan keadilan sosial. Perkembangan pada wilayah ini didiskusikan berikut ini.

**Gambar 5: Jumlah Rencana Aksi Saat ini berdasarkan Wilayah Tematik**



Penyediaan Pelayanan Publik – Saat ini terdapat 19 dana hibah untuk meningkatkan akses ke pelayanan umum bagi kaum miskin, perempuan, kelompok terpinggirkan lainnya, dimana empat telah disetujui selama masa pelaporan ini.

Terdapat beberapa variasi dalam rincian Rencana Aksi Mitra yang mendukung peningkatan pelayanan publik, tujuan umum dan strategi yang muncul memberikan kegunaan dalam mempromosikan peningkatan pelayanan publik. Program ini juga



**Penimbangan bayi pada Posyandu yang telah direvitalisasi di Muna**

menunjukkan bahwa peningkatan penyediaan pelayanan publik, khususnya kepada kaum miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya merupakan kunci meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan mengakhiri korupsi. Disaat sebagian Mitra menyebutnya Pusat Masyarakat dan Pusat Pengaduan, semua Rencana Aksi di wilayah ini mencari ruang untuk melakukan dialog dan negosiasi antara pemerintah dan warga mengenai pelayanan yang mereka harapkan, menjadi hak mereka, dan dijamin dibawah Undang-Undang Pelayanan Publik Th 25/2009. Tidak hanya melakukan fungsi 'pusat' itu sebagai tempat dimana warga dapat mengajukan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima, tetapi juga bertindak sebagai mediator antara penyedia layanan pemerintah dan warga, negosiator bagi penyelesaian keluhan, memperjuangkannya kepada pemerintah

daerah, menjadi sumber informasi mengenai persyaratan dan hak-hak atas pelayanan. Tujuan umum dari semua inisiatif ini adalah untuk memastikan penyediaan pelayanan yang efektif dan akuntabel yang tepat sasaran.

Lima pelayanan utama yang telah diidentifikasi oleh Mitra adalah – kesehatan, pendidikan, administrasi publik, pelayanan segala keperluan (air dan listrik) dan kebutuhan pelayanan khusus. Strategi yang digunakan oleh kelompok ini fokus pada:

- Menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dengan cara mengenalkan partisipasi, pendekatan berbasis kekuatan, diskriminasi positif (bagi kaum miskin, perempuan dan lainnya yang memiliki kebutuhan khusus), dan sistem akuntabilitas (contoh, melalui ‘pusat pengaduan’)
- Mempromosikan dan menyebarluaskan konsep dan praktek penyediaan pelayanan yang berkualitas kepada pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten
- Konsolidasi gerakan bagi pelayanan publik yang berkualitas melalui kolaborasi antara desa, kabupaten dan bergabung dengan jaringan nasional.

Strategi-strategi tersebut berhasil pada tingkat masyarakat dan kabupaten. Seperti yang telah disampaikan dalam bagian Tujuan, seluruh kelompok ini melakukan tindakan di desa dan masyarakat mereka sendiri dan sebagian besar hadir dalam jaringan lokal untuk berbagi pembelajaran dan melakukan advokasi di tingkat kabupaten.

Pada bulan November 2010, Sebuah lokakarya nasional diadakan di Kendari mengenai Penyediaan Pelayanan Publik. Lokakarya ini menghadirkan semua mitra ACCESS yang bekerja pada isu ini, pelaku utama masyarakat sipil di tingkat nasional yang bekerja dibidang pelayanan publik, pegawai pemerintah dari kabupaten, provinsi dan tingkat nasional (pusat). Lokakarya itu dirancang untuk berbagi pembelajaran, merancang strategi dan menyusun rencana untuk aksi bersama di tiap provinsi. Rencana Aksi ini memiliki potensi untuk membantu kelompok dari jaringan luar desa mereka pada isu-isu pelayanan publik.

Pembangunan Ekonomi Lokal – Sembilan Rencana Aksi saat ini sedang dilaksanakan di wilayah pembangunan ekonomi lokal yang dipimpin oleh masyarakat



**Pengembangan usaha kecil di Desa Banyuanyara di Takalar**

dimana tiga diantaranya baru untuk masa ini. Rencana Aksi ini bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya perempuan dan kaum miskin, terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan juga mempengaruhi lingkungan kebijakan di tingkat desa dan kabupaten.

Rencana Aksi tersebut saat ini sedang dilaksanakan dan terbukti sukses dalam mengorganisir warga

dalam kelompok ekonomi, merancang strategi yang lebih baik untuk kegiatan ekonomi, memperjuangkan pendanaan dan dukungan, dan menemukan pasar bagi produk-produknya.

Kelompok pengembangan ekonomi ini tidak hanya belajar untuk melakukan usaha secara lebih baik lagi, tetapi juga belajar mengenai bagaimana untuk mempengaruhi kebijakan dari bawah ke atas. Banyak kelompok (*BUMDes* di Bantaeng, JARPUK di Lombok dan Kupang, dan asosiasi nelayan di Buton, koperasi di Jeneponto, diantaranya) menggunakan proses resmi Musrenbang untuk meningkatkan perhatian (dalam bentuk kemampuan teknis dan pendanaan) bagi kegiatan ekonomi. Kelompok usaha kecil perempuan di 10 desa didukung oleh kerja JARPUK Ina Fo'a di kabupaten Kupang, memperjuangkan Musrenbang perempuan untuk mendahului proses Musrenbang umum sehingga isu-isu perempuan dapat terartikulasikan secara jelas dan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk didukung.

Sembilan dari Rencana Aksi fokus pada Pengembangan Ekonomi Lokal khususnya dengan kelompok perempuan. Melalui Rencana Aksi ini Mitra ACCESS bekerja dengan 207 kelompok ekonomi khusus perempuan. Sebagai contoh, ASPPUK di NTB telah melatih 1,100 anggota perempuan dari 114 kelompok untuk mengembangkan usaha kecil.

ACCESS melihat OMS yang bekerja pada isu-isu ekonomi, membuat perkembangan yang baik di kegiatan ekonomi dan mengaitkan kerja kelompok dengan isu tata pemerintahan yang demokratis.

Manajemen Sumber Daya Alam – Saat ini terdapat 10 Rencana Aksi dalam wilayah tematik manajemen sumber daya alam yang dipimpin oleh masyarakat dengan dua Rencana Aksi disetujui dalam masa pelaporan ini.

Terdapat lima strategi utama yang digunakan oleh semua Mitra ACCESS yang bekerja di wilayah tematik ini:

- Memunculkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penggunaan sumber daya alam dan konservasi yang berkelanjutan.
- Pengembangan kapasitas pada kegiatan ekonomi alternative, khususnya penggunaan aset lokal, metode konservasi, penguatan keorganisasian (termasuk transparansi dan akuntabilitas), pengembangan jaringan dan advokasi.
- Pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan berbagai kelompok masyarakat seperti pengguna air, petani hutan, koperasi dan kelompok lokal dan kelompok pariwisata.
- Advokasi bagi perubahan kebijakan dari desa hingga kabupaten, termasuk membangun kesadaran publik dan melobi pemerintah desa dan kabupaten. Tujuan dari kerja advokasi beragam tergantung pada isu-isu tertentu. Sebagian contoh, termasuk menyusun peraturan desa mengenai penggunaan hutan, peraturan mengenai konservasi air melalui daerah resapan, perencanaan ruang untuk konservasi, akses jangka panjang dan berkelanjutan terhadap hutan bagi kaum miskin dan perempuan melalui ijin hutan yang berdasarkan pada masyarakat.
- Perluasan dampak melalui upaya-upaya seperti halnya radio masyarakat, pembuatan film dan bahan-bahan pelatihan, pertemuan sharing diantara kelompok penerima manfaat, diskusi dengan pemerintah dan DPRD melalui forum berbagai stakeholder, FLA.

Sebagian perkembangan yang sangat bagus telah terjadi dalam kerja yang dilakukan oleh kelompok ini. Semua kelompok aktif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara-cara yang melindungi lingkungan hidup. Sebagai contoh, SINTESA di



**Pertanian rumput laut di Buton sebagai sebuah alternative sebagai penebang liar.**

Buton telah meyakinkan sebuah leompok penebang liar untuk merubah profesinya menjadi pentani rumput laut, dan membantu 12 desa untuk memulai dana simpan pinjam mandiri dengan menggunakan uang mereka sendiri. Di Dompu, YBC telah membantu kelompoknya untuk mendirikan sebuah pusat untuk pemasaran bersama dari hasil-hasil alam (sebagai contoh, kacang mete). Dan pula, banyak dari kelompok ini sekarang aktif melobi pemerintah untuk kebijakan yang mengatur

tentang konservasi sumber daya alam dan penggunaan yang berkelanjutan (lihat pada bab 6.2 untuk lebih jelasnya).

Cerita sukses ini datang hampir dari semua kabupaten yang mendorong interaksi masyarakat dalam management keberlanjutan sumber daya alam untuk menuju perubahan demokratis.

Partisipasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran – Saat ini terdapat 19



**Pendayagunaan lahan di Desa Wa Ode Angkalo di Buton Utara telah dimasukkan kedalam RKPDes tahun 2011**

Rencana Aksi di wilayah perencanaan dan penganggaran partisipatif yang mencakup 422 desa. Dengan menggunakan pendekatan dan metodolog CLAPP-GSI, Mitra ACCESS telah membuat 210 RPJMDes, 67 RKPDes dan 38 APBDes hingga saat ini. Serta, di semua kabupaten terdapat lebih dari 108 peraturan pemerintah (Perdes) telah ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan RPJMDes.

Mitra juga memperjuangkan pemerintah kabupaten dan bersama program lainnya untuk RPJMDes agar satu-satunya keputusan tentang perencanaan dan investasi pembangunan. Prinsip-prinsip ACCESS, termasuk GSI dengan fokusnya pada penyertaan kaum miskin, perempuan dan pihak yang terpinggirkan, proses yang dipimpin oleh masyarakat, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi merupakan inti dari kerja advokasi Mitra. Di Sumba Timur sebagai contoh, mitra ACCESS berdialog dengan PNPM dan AIPMNH dan

dengan pemerintah desa dan kabupaten mensistematiskan RPJMDes sehingga bahwa semua rencana memiliki tingkat analisa dan informasi yang sama.

Masyarakat melalui pendekatan CLAPP-GSI, didorong, tidak hanya untuk memperjuangkan anggaran (termasuk memperjuangkan peningkatan ADD) untuk pelaksanaan rencana itu, tetapi juga menggunakan aset lokal untuk memperluas sebesar mungkin untuk melaksanakan rencana dan melalui demonstrasi komitmen ini mempengaruhi pendanaan dari sumber-sumber lainnya. Selain itu, warga didorong untuk 'menjaga' RPJMDes melalui proses Musrenbang hingga tingkat kabupaten.

Secara umum, terdapat pengakuan yang meningkat dari nilai pendekatan ACCESS dengan pemerintah daerah yang memperluas pendekatan hingga ke kecamatan yang baru di Dompu, menggunakan fasilitator yang dilatih oleh ACCESS di Bima, Kupang, Buton Utara, Jeneponto, Bantaeng dan Sumba, dan mendiskusikan peraturan baru yang diusulkan oleh Mitra ACCESS di Bantaeng, Buton, Sumba Utara, Sumba, Bima dan Dompu.



**Warga di desa O'of di TTS mengadakan pemetaan aset desa sebagai bagian dari proses perencanaan desa.**

Pertemuan tematik tentang Perencanaan dan Penganggaran diselenggarakan di Makassar pada Januari 2011 disemangati peserta dari pemerintah, DPRD, mitra dan masyarakat tidak hanya untuk mengidentifikasi faktor sukses dan mengembangkan sebuah rencana aksi, tetapi juga untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang meresmikan komitmen mereka terhadap rencana aksi.

Keadilan Sosial – Saat ini terdapat enam Rencana Aksi di wilayah keadilan sosial. Sebuah perkembangan yang cukup bagus telah terjadi selama masa pelaporan pada enam Rencana Aksi ini. Sebagai contoh, FP2KK di kabupaten Dompu (tujuh desa di satu kecamatan), dan SSP di kabupaten TTS (10 desa di dua kecamatan) bekerja secara erat dengan pemerintah daerah pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. FP3M di dompu telah diminta oleh istri Bupati untuk mereplikasi pendekatan mereka dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Sapie.

Di TTS, kelompok pusat masyarakat bekerja dengan SSP telah mengadakan



**Seorang anak berumur enam tahun yang berasal dari Desa Tuafanu di TTS menderita kekurangan gizi dengan berat badan hanya 5 kg dan tidak mampu untuk berjalan.**

pertemuan masyarakat bagi perempuan dalam persiapannya untuk Musrenbang. LEMBARA di Takalar telah membentuk enam kelompok warga dan sedang bekerja untuk menyediakan pendidikan politik praktis kepada perempuan, kaum muda dan anak-anak guna meyakinkan desa dan pemerintah kabupaten untuk membuat peraturan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, memberikan akses dalam proses perencanaan, penganggaran dan memastikan pelayanan dan program tersedia dan dapat diakses oleh kelompok-kelompok tersebut.

Animasi di kabupaten TTS menyelesaikan isu mengenai keamanan pangan di 10 desa dan kelompok yang mereka dukung saat ini memperjuangkan DSC demi peningkatan anggaran bagi perlindungan perempuan dan anak-anak dan lobi untuk pengarusutamaan gender dalam

program pembangunan sektoral.

Apa yang dilihat ACCESS di wilayah keadilan social adalah bahwa kelompok yang kritis dan terorganisir dapat mengambil tindakan dan melalui aksi mereka menyemangati pemerintah untuk lebih memperhatikan isu-isu penting.

Pemantauan mitra secara terus-menerus oleh staf ACCESS dalam pelaksanaan Rencana Aksi mereka dan tingkat komitmen yang tinggi dari Mitra dalam melaksanakan rencana mereka telah berakibat pada suksesnya di Wilayah Fungsional ini.

Masih terdapat sejumlah tantangan terhadap pelaksanaan Wilayah Fungsional 4 dimana ACCESS perlu untuk memfokuskan perhatian guna mencapai perubahan yang lebih mendalam dan tahan lama. Hal ini termasuk diantaranya:

- Perlunya meningkatkan kapasitas teknis dari banyak Mitra dalam penanganan isu-isu yang kompleks. Memperdalam pemahaman dari isu-isu yang bersifat teknis seperti halnya manajemen sumber daya alam, penyediaan pelayanan public, dan pengembangan ekonomi lokal akan terus menjadi prioritas bagi Mitra Strategis.
- Meneruskan isu-isu tentang bagaimana membantu Mitra dalam berurusan dengan jadwal pemerintah yang kaku tetapi menjadi sebuah tantangan. Meskipun berbagai pemerintah daerah telah memberikan (seringkali berjumlah besar) dana kontribusi kepada banyak Rencana Aksi, seringkali

sulit bagi Mitra untuk menyesuaikan kegiatan mereka dengan jadwal dan persyaratan yang kaku dari proses pemerintahan. Sebagai contoh, seperti halnya Buton, kontribusi dana dari pemerintah belum keluar sehingga Mitra harus mejadwalkan ulang rencana kerja mereka.

### 3.5 Wilayah Fungsional 5:

#### **Mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan dan perilaku baik secara internal maupun eksternal.**

Wilayah Fungsional 5 menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pelaporan ini. Kegiatan penting yang dilaksanakan selama masa pelaporan dijelaskan di bawah ini.

#### **Menjaga database bagi kegiatan yang didanai oleh dana hibah dan kegiatan CB:**

Data dalam ERSULA telah diperbarui oleh kantor provinsi setiap bulannya baik dana hibah Proyek serta untuk CB. Laporan bulanan dari ERSULA dibagikan kepada pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya. Setiap tiga bulan, pemeriksa kualitas akan memeriksa data dan itu akan dilakukan oleh STO-MEL dan umpan balik diberikan kepada tim provinsi.

#### **Secara partisipatif memantau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah:**

Pemantauan bulanan secara rutin terhadap semua kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah dilakukan oleh staf provinsi ACCESS. Selain itu, sebanyak 32 PPR enam bulanan telah dilaksanakan pada masa pelaporan ini yang melibatkan 468 laki-laki dan 493 perempuan. Para peserta datang dari staf Mitra, perwakilan masyarakat dan pegawai pemerintah. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Mitra, mencerminkan pada perkembangan organisasi Mitra terhadap pencapaian milestone<sup>7</sup> dan keduanya berkaitan dengan perubahan dalam organisasi mereka sendiri serta mencerminkan pada perubahan yang terjadi di tingkat penerima manfaat utama (lihat juga pada bab 2.2.1 dan bab 3.3). Umpan balik dari peserta masyarakat sangat berguna untuk memeriksa silang dan meningkatkan informasi dari Mitra.

#### **Mendukung FLA untuk menganalisa dan mereview proses dan perubahan local didalam kebijakan dan perilaku tata pemerintahan:**

Mitra Strategis ACCESS, Yappika, telah membantu seluruh kabupaten dalam mengembangkan rencana komunikasi mereka untuk penyebarluasan hasil-hasil IMSIMS. Dalam lokakarya, para peserta mampu untuk mengidentifikasi informasi penting mengenai tata pemerintahan lokal yang demokratis dan mengembangkan media untuk penyebarluasannya. Media ini termasuk berbagai poster yang ditargetkan, leaflet, kalender, lembar fakta, dan ringkasan kebijakan. Direncanakan bahwa dimasa berikutnya, Yappika akan membantu FLA dalam memperdalam kemampuannya menganalisa perubahan dalam perilaku tata pemerintahan dengan menggunakan indicator IMS (lihat bagian 3.2 untuk lebih jelasnya).

Review PAK diadakan di lima kabupaten<sup>8</sup> pada masa pelaporan ini (lihat pada bagian 3.2 untuk lebih jelasnya).

#### **Memantau perubahan didalam kekuatan Masyarakat Sipil:**

ACCESS menggunakan dua alat untuk memantau perubahan kekuatan masyarakat sipil di kabupaten – PPR dan IMS. PPR mengukur hal lain berupa derajat kolaborasi

<sup>7</sup> Berkenaan dengan penanda perubahan.

<sup>8</sup> Buton, Muna, Buton Utara, Kupang, TTS

diantara OMS dan sejauh mana kolaborasi tersebut menguatkan dari waktu-ke waktu. Selama masa pelaporan, PPR, mengindikasikan tingkat kerjasama yang sangat baik diantara OMS, khususnya di tingkat akar rumput, untuk berbagi pembelajaran, mengembangkan strategi dan mengambil tindakan bagi perubahan sosial (lihat bagian 2.2.2 untuk lebih jelasnya).

IMS digunakan untuk memberikan sebuah indikator perubahan kekuatan masyarakat sipil dan tingkat pengaruh yang dimiliki melalui interaksi mereka dengan stakeholder lainnya. ACCESS saat ini bekerja dengan Yappika untuk menggunakan indikator IMS karena mereka menerapkannya terhadap penguatan OMS secara berkelanjutan sebagai masukan dalam proses PAK (lihat pada kegiatan diatas untuk perkembangan pada IMS pada periode pelaporan ini).

### **Mengadakan penelitian CSS dan analisa kebijakan:**

Pada periode pelaporan ini, Gita Pertiwi mengadakan sebuah studi mengenai peran perempuan dalam manajemen ekonomi rumah tangga di desa dan hasilnya dipresentasikan kepada para stakeholder (termasuk diantaranya Departemen Koperasi BAPPEDA, Departemen Pertanian, dan Kantor Pemberdayaan Perempuan) dalam seminar di semua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Temuan utama dari studi tersebut adalah lemahnya aset-aset rumah tangga yang dikendalikan oleh perempuan dan penggunaan berbagai aset yang diorientasikan terhadap pendidikan dan kesehatan daripada untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Kesepakatan dicapai di Bau-Bau untuk menggunakan hasil studi dalam merancang program dimasa depan dan Departemen Pertanian telah setuju untuk berkontribusi pada kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan petani perempuan. Mitra ACCESS telah menanggapi pada penelitian itu dengan cara mereview kegiatan mereka untuk memastikan kegiatan pengembangan ekonomi memiliki strategi yang khusus untuk mencapai perempuan, mengidentifikasi dan menggunakan aset-aset mereka secara baik dan keberagaman kegiatan ekonomi mereka untuk meningkatkan aset-aset.

Studi mengenai revitalisasi pelayanan kesehatan masyarakat terpadu melalui pos kesehatan (*Posyandu*) di Sulawesi Tenggara menggunakan metodologi 'penyimpangan positif' (sebuah bentuk pendekatan berbasis kekuatan) sedang berjalan.

Kontrak untuk studi mengenai peran kaum muda di Bima dan Kupang oleh Pusat Studi Populasi dan Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada yang direncanakan pada masa pelaporan sebelumnya telah selesai dan studi akan mulai pada bulan April 2011.

ACCESS telah menerima dan saat ini mendiskusikan dua konsep paper untuk studi Penguatan Masyarakat Sipil. Konsep paper tersebut merupakan adaptasi dan inovasi perluasan dampak dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif dan pengembangan ekonomi lokal dari IRE dan konsep paper lainnya berupa perilaku terbaik dalam perencanaan dari bawah ke atas guna meningkatkan partisipasi perempuan di Takalar, Gowa, Makassar, Pare-Pare dan Bone, di Sulawesi Selatan oleh YKPM.

Seluruh publikasi dan studi yang telah selesai dimasukkan ke dalam website ACCESS. Semua daftar publikasi dihasilkan oleh ACCESS untuk masa pelaporan ini dapat ditemukan dalam Lampiran 4.

**Mengadakan penilaian dampak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang buka-tutup (open-ended):**

Selama periode ini alat untuk penilaian dampak (sebuah survey tata pemerintahan dengan pemerintah dan DPRD, penilaian dampak masyarakat, dan PPR final bagi perubahan keorganisasian OMS) telah disempurnakan. Rencana pelaksanaan untuk penilaian disiapkan oleh MEL Advisor pada periode pelaporan ini dan sedang didiskusikan.

**Berbagi Pembelajaran dan menyebarkan metode dan alat di kabupaten dan antara stakeholder program dan program lainnya.**

ACCESS menyiapkan sejumlah media pada periode pelaporan ini guna membantu dalam berbagi pengalaman mengenai pendekatan dan metodologi ACCESS untuk tujuan berbagi pembelajaran di tingkat kabupaten.

- Tiga ribu kopi dari tiap edisi Bulletin ACCESS, edisi V Oktober 2010 (Manajemen Sumber Daya Alam) dan edisi VI Januari 2011 (Pengembangan Ekonomi Lokal) disebarluaskan pada periode ini ke desa-desa, OMS, fasilitator desa, lembaga donor dan lembaga pemerintah.
- ACCESS mendukung publikasi 1000 kopi *Panduan Praktis Untuk menciptakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Tinggi dan Adil* oleh MP3 dan didistribusikan oleh ACCESS kepada semua Mitra dan departemen pemerintah yang relevan.
- Studi yang diadakan di Sumba selama masa pelaporan sebelumnya mengenai pelaksanaan *RPJMDes* (Suara Warga) diterbitkan (500 kopi) pada periode pelaporan ini dan didistribusikan kepada Mitra ACCESS dan badan pemerintah selama Pertemuan Tematik yang diadakan di Makassar.
- KAWANUSA, dengan bantuan dari ACCESS, mempublikasikan 1000 kopi buku *'Komunikasi Rakyat: Sebuah Panduan Dasar bagi Organisasi Masyarakat Sipil'* selama masa pelaporan ini. Buku tersebut merupakan hasil dari kegiatan pengembangan kapasitas yang disediakan kepada mitra ACCESS mengenai media komunikasi. Kopi dari buku itu disebarluaskan kepada pengorganisir masyarakat di seluruh kabupaten ACCESS pada masa pelaporan ini.

**Berbagi Pembelajaran dengan pemerintah pusat dan daerah dan program lainnya:**

Selama enam bulan sebelumnya, ACCESS telah proaktif dalam berinteraksi dengan pemerintah di semua tingkatan guna memastikan bahwa pembelajaran dari ACCESS disajikan, didiskusikan dan akhirnya dipergunakan dalam menyusun program dan kebijakan pemerintah.

Di tingkat Internasional

ACCESS dipilih oleh *Konferensi Internasional Mengenai Pembangunan dan Tata Pemerintahan*, yang diorganisir oleh Universitas Deakin, Melbourne bekerjasama dengan sejumlah universitas dari Padang, pada bulan Desember 2010 di Padang, Sumatera Barat, agar membuat presentasi yang berjudul *'Menanamkan Demo Kembali Di dalam Demokrasi: Merubah peran warga dalam pembuatan keputusan'* dan untuk merancang sebuah lokakarya yang fokus pada penggunaan *Appreciative Inquiry* dalam pembuatan rencana kabupaten yang berjudul *'Menguatkan Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis'*. ACCESS mengundang pejabat pemerintah daerah dari Jeneponto untuk menjadi bagian dari tim ACCESS pada konferensi tersebut. Sumbangan ini menerima tanggapan yang sangat baik dari para peserta dan terdapat permintaan sebelumnya dari peserta internasional untuk salinannya dalam bahasa Inggris.

ACCESS juga diundang untuk menyajikan pengalamannya dalam menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dalam mendukung tata pemerintahan lokal yang demokratis pada *'Pertemuan Puncak Kekuatan dan Aset-Aset 2010, Konferensi Asia Pasifik Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset yang ke-2'* yang diorganisir oleh Universitas Newcastle pada bulan Desember 2010 di Melbourne. Program Dukungan Seminar Internasional AusAID memberikan bantuan kepada delegasi dari Inspirit, satu Mitra Strategis ACCESS, untuk menyajikan, dalam kerjasamanya dengan STA ACCESS untuk SBA, sebuah makalah yang berjudul *'Fasilitasi Vibran – Melepaskan Kreativitas dalam Penerapan Pendekatan Berbasis Kekuatan'*. Presentasi tersebut disambut dengan sangat baik.

#### Pada Tingkat Nasional:

ACCESS membuat sejumlah presentasi selama periode pelaporan ini, termasuk sebuah presentasi pada pertemuan Nasional PNPM terkait dengan target kemiskinan. ACCESS juga berpartisipasi dalam konferensi nasional Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) dan menyajikan produk dan publikasi ACCESS. Lebih dari 100 perangkat dibagikan kepada peserta yang tertarik termasuk gubernur provinsi, BAPPEDA, perwakilan dari kabupaten, pejabat pemerintah dan lembaga donor.

Pertemuan Tematik diselenggarakan pada periode pelaporan yang dihadiri oleh beberapa pejabat tingkat pusat dan tertarik untuk memperhatikan kerja yang telah dilakukan.

Untuk membiasakan diri dengan Direktur PMD yang baru dengan Program, ACCESS memfasilitasi sebuah kunjungan lapangan bagi staf utama dari PMD ke Lombok pada Februari 2011.

#### Pada Tingkat Provinsi

Sejumlah inisiatif tingkat provinsi telah didiskusikan dalam laporan ini (lihat khususnya pada bagian 2.2.4) terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh ACCESS untuk berbagi pembelajaran dengan pemerintah daerah. Pertemuan Tematik yang diadakan pada periode pelaporan ini telah sukses dalam menyemangati dan meyakinkan pejabat pemerintah provinsi terhadap nilai pendekatan Program dan mulai mencari cara bagaimana untuk menggunakannya pada kondisi tertentu.

#### Dengan Program Lembaga Donor

ACCESS terus berkolaborasi erat dengan AusAID dan program lembaga donor lainnya. Selama masa ini, ACCESS memiliki sejumlah diskusi dengan Oxfam Australia tentang bagaimana mendukung organisasi perempuan dan gerakan perempuan di NTB dan NTT melalui Koalisi Perempuan Indonesia.

ACCESS mengundang KINERJA (USAID) untuk mempresentasikan kepada staf ACCESS untuk melihat dimana terdapat kemungkinan wilayah untuk bekerjasama.

ACCESS berkolaborasi dengan sebuah inisiatif PSF di Sulawesi Selatan, Lombok Barat dan Sumba mengenai penelitian dalam penilaian kapasitas pemerintah daerah sebagai bagian dari persiapan bagi sebuah program nasional.

ACCESS sedang berkolaborasi dengan sejumlah program AusAID programs, termasuk AIPD, AIPMNH dan AIFDR. Contoh dari kolaborasi ini dapat ditemukan dalam bagian 2.2.4.

## **Mendukung evaluasi independen dan eksternal mengenai perubahan dalam tata pemerintahan demokratis di Indonesia dan efektifitas program**

Sebagian kabupaten ACCESS, termasuk Sumba Barat dan Dompu secara tidak langsung dan Bantaeng secara langsung terlibat dalam survey yang disebutkan sebelumnya diatas tentang 'Diagnostik pada perumusan kebijakan berbasis bukti publik dibawah program desentralisasi' yang dilakukan sebagai bagian dari *Revitalisasi Sektor Pengetahuan Indonesia untuk Kebijakan Pembangunan*, sebuah studi yang ditugaskan oleh AusAID bekerjasama dengan BAPPENAS. Studi ini juga melihat pada keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam mempengaruhi kebijakan.

Kegiatan Wilayah Fungsional 5 sukses karena pendekatannya lebih terarah untuk mempengaruhi. Sementara staf ACCESS akan selalu tanggap terhadap kesempatan *ad hoc* yang datang, Penyempurnaan Rencana Mempengaruhi telah membuat staf menjadi lebih baik dalam memfokuskan upaya-upaya mereka untuk mendapatkan dampak yang maksimal. Hal ini, digabung dengan fakta bahwa Mitra mulai menunjukkan pengalamannya dalam cara yang lebih resmi dan menggunakan media informatif, bersifat membantu ACCESS dalam mengarahkan pengaruhnya secara lebih baik lagi.

### **4 Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran**

Komitmen yang terus-menerus dari AusAID terhadap peningkatan sistem M&E-nya untuk meningkatkan guna menguatkan pembuatan keputusan berdasarkan bukti yang ditunjukkan melalui pengorganisasian '*Lokakarya tentang Pemantauan dan Evaluasi mengenai Program AusAID Indonesia*' diselenggarakan oleh Unit Kinerja dan Kualitas AusAID dan dipimpin oleh Sue Dawson pada bulan November 2010.

Arahan yang disiapkan dalam lokakarya ini menunjukkan fokus yang jelas pada pemantauan berbasis bukti dan memberikan bukti atas pencapaian dan dampak, khususnya di tingkat penerima manfaat utama, termasuk kaum miskin, perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Menariknya, lokakarya itu juga menyoroti bahwa pemantauan berdasarkan bukti tidak hanya persoalan memberikan gambar yang secara kuantitatif terbukti, tetapi bahwa masih terdapat ruang untuk pemantauan perubahan yang lebih kualitatif. Dicatat pula, bahwa AusAID masih lebih memilih perubahan kualitatif tersebut dijadikan kuantitatif untuk menunjukkan kecenderungan dalam cakupan dan kedalaman.

#### **4.1 Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluation /M&E)**

Masukan dari lokakarya M&E AusAID digunakan dalam mereview Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran Partisipatif ACCESS (*ACCESS Participatory Monitoring Evaluation and Learning System (PAMELS)*) yang telah direvisi pada bulan Maret dan diajukan ke AusAID untuk direview.

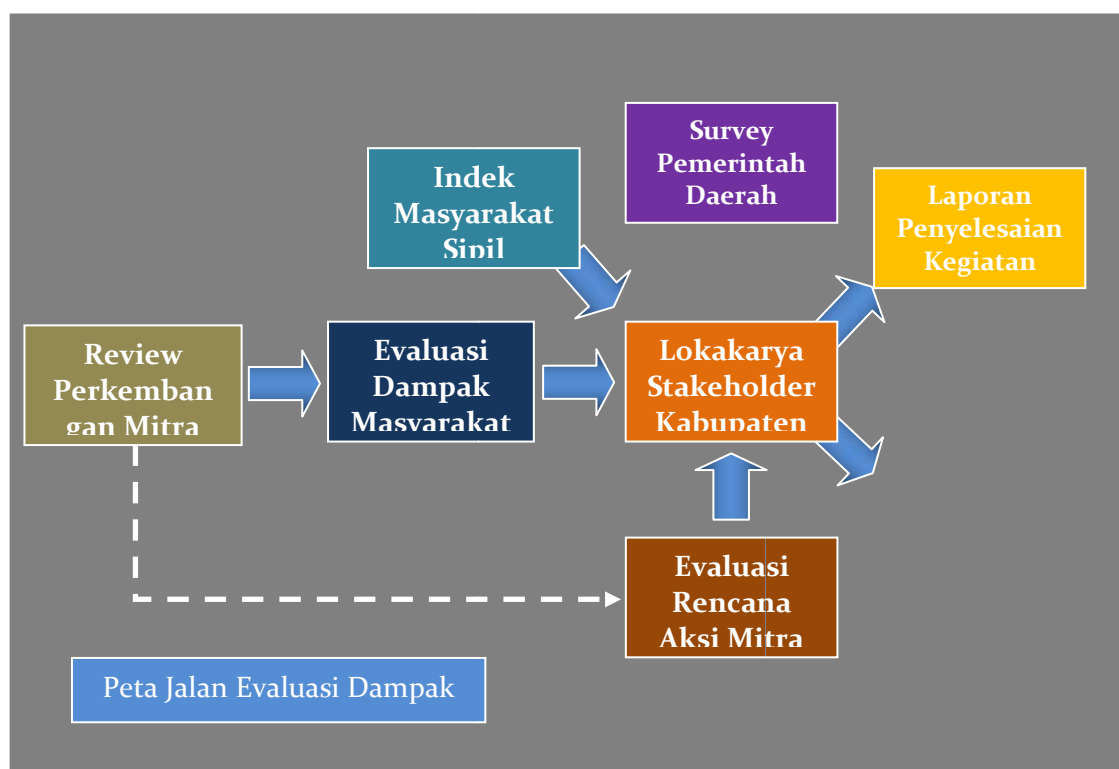
Sebagai bagian dari pengembangan lebih lanjut dari rencana MEL, ACCESS telah membuat sebuah peta bagi M&E (lihat gambar 6 halaman sebaliknya) yang akan memandu Program melalui berbagai milestone MEL dan akan memastikan data berdasar bukti yang cukup dikumpulkan untuk membuat sebuah keputusan pada

suksesnya Program<sup>9</sup>. Latihan khusus akan dilakukan bersama masyarakat (Penilaian Dampak Masyarakat) dan pemerintah/DPRD daerah (Survey Pemerintah Daerah), serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam Indeks Masyarakat Sipil.

Database ERSULA, Sistem Manajemen Informasi bagi penyimpanan data pemantauan dan evaluasi dari Rencana Aksi Mitra, dan GIFTS, database manajemen dana hibah, memberikan informasi yang diperlukan bagi tinjauan umum dan pemantauan proses dana hibah dan hasil-hasil.

Seperti yang telah dilaporkan dalam laporan ini, ACCESS terus memberikan masukan dan arahan terhadap Kerangka Kerja Hasil-Hasil Umum yang diluncurkan oleh Unit desentralisasi AusAID. Pada saat ini semua program di bawah DPRRD menunggu laporan akhir dan Rencana Kerja hasil dari lokakarya CRF yang dilakukan di Kupang pada November 2010 sebelum kerja selanjutnya dapat dilaksanakan. ACCESS mencatat bahwa diperlukan lebih banyak diskusi mengenai pelaporan tentang indikator bagi Manajemen Keuangan Publik dan Penyediaan Pelayanan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengumpulan data, khususnya fokus pada AIPD di indikator yang pertama dan kontak AIPMNH mengenai kesehatan pada indikator yang kedua.

**Gambar 6: Peta Jalan Evaluasi Dampak ACCESS**



Hasil-hasil terhadap CRF untuk indikator Penguatan Masyarakat Sipil pada periode ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Utama 1: Kebijakan peraturan yang dipengaruhi oleh OMS**  
memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih atau

<sup>9</sup> Untuk informasi yang lebih mendalam tentang masing-masing alat yang berbeda maka, latihan perlu diadakan sebagai bagian dari proses evaluasi bagi ACCESS, mohon lihat pada PAMELS, yang dapat ditemukan pada website ACCESS.

peningkatan alokasi anggaran atau untuk proses pembuatan keputusan perencanaan dan penganggaran

Capaian hingga saat ini:

Mitra OMS ACCESS telah berhasil dalam mengadakan 176 kebijakan peraturan, dengan sembilan diantaranya terkait secara khusus dengan penyediaan pelayanan public di wilayah kesehatan dan/atau pendidikan (lihat Tabel 3).

**Tabel 3: Kebijakan Peraturan yang Dipengaruhi oleh OMS Hingga Saat Ini**

Kabupaten	Wilayah Tematik					Total	Catatan
	NRM	Perencanaan	Pelayanan Publik	LED	SJ		
Buton	3		3			6	3 Perdes RPJMDes, 3 SK Kades
Bantaeng		24	2	46		72	22 Perdes RPJMdes & 46 pedes pembentukan Bumdes, 1 Perda perencanaan dan penganggaran partisipatif dan 1 SE Bupati mengenai panduan bagi <i>Musrenbang</i> dan 2 kontrak warga tentang pelayanan kesehatan di <i>Polindes</i> dan prosedur bagi pelayanan administratif dari desa
Jeneponto		17				17	Perdes RPJMDes
Sumba Barat	6	49				55	6 Nota kesepakatan mengenai NRM dan 49 perdes RPJMdes
Lombok Barat		20	4			24	20 Perdes RPJMDes & 4 MOU warga mengenai klinik Kesehatan (Puskesmas)
Lombok Tengah	2					2	SK Bupati tentang manajemen hutan
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	

**Indikator Utama 2: Memfungsikan Mekanisme Penanganan Keluhan Yang Dipimpin Oleh Masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.<sup>10</sup>**

Capaian hingga saat ini:

Mitra ACCESS telah membentuk 327 Pusat Masyarakat untuk menangani keluhan warga terkait dengan pelayanan publik, dan 68 Komite Orang Tua. Dari 327 Pusat Masyarakat, delapan diantaranya fokus hanya pada pendidikan dan 39 lainnya fokus pada kesehatan.

<sup>10</sup> "Mekanisme Penanganan Keluhan" diartikan bahwa terdapat mekanisme untuk dapat memberikan umpan balik – hal ini berarti berupa pusat pengaduan; asosiasi orang tua-guru yang menggunakan CRC; sebuah komisi di tingkat kabupaten; dsb – jadi pada dasarnya kelompok warga terorganisir yang memiliki mekanisme untuk memberikan umpan balik mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Bila dipimpin oleh masyarakat tidak (tidak selalu) termasuk mekanisme keluhan yang dibuat oleh pemerintah.

## 4.2 Pembelajaran Yang Dapat Diambil dari Pelaksanaan Program

Hal di bawah ini memberikan sebuah ringkasan mengenai pembelajaran utama selama masa pelaporan ini.

1. Pemberdayaan warga untuk mempengaruhi agenda pemerintah
  - Perhatian terhadap isu-isu dan tindakan pada penyediaan pelayanan oleh pejabat pemerintah lebih mungkin terjadi ketika warga dapat menunjukkan bukti kesadaran kritis mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab, mereka mampu untuk mengkomunikasikan persoalan dan apresiasi mereka mereka mampu mengorganisir diri sendiri untuk melakukan aksi, mereka dapat menerapkan mekanisme untuk memberikan umpan balik kepada para penyedia pelayanan publik.
  - Warga menjadi lebih ingin menyumbang sumber daya untuk kepentingan bersama ketika mereka menerima perhatian dan apresiasi atas upaya-upaya mereka untuk mendukung proses pembangunan yang lebih terbuka dan transparan.
  - Kepatuhan yang konsisten terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratis memastikan bahwa hal itu dapat diresapi dan dilembagakan dan menjadi bagian dari budaya dimana proses pembangunan terjadi. Tidak ada jalan pintas terhadap proses peresapan nilai-nilai tersebut.
2. Penguatan OMS
  - Perubahan dalam organisasi terjadi ketika individu dalam organisasi memiliki kesempatan dan di tantang untuk mengambil bagian dalam latihan aksi-refleksi-adaptasi yang menganalisa aksi yang diterapkan dan hasil-hasilnya (positif maupun negative) atau perubahan (yang diharapkan atau yang tidak diharapkan) yang muncul dari mereka. Hal itu memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan menterjemahkan analisa ke dalam peningkatan aksi dan memberikan informasi kepada organisasi untuk membuat keputusan strategis.
  - Upaya-upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam pemantauan dan menegakkan toleransi yang tidak ada sama sekali dengan permasalahan korupsi atau manajemen keuangan yang buruk akan memberikan pesan yang benar kepada pelaksana dan pembuat kebijakan dan menghasilkan keputusan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Interaksi diantara OMS dan pemerintah daerah dalam meningkatkan tata pemerintahan lokal yang demokratis
  - Interaksi dan keterlibatan diantara OMS dan pemerintah daerah berakibat pada pengembangan secara berangsur-angsur dari hubungan kepercayaan dan membuka kesempatan bagi kerjasama menguntungkan kedua pihak dan kolaborasi yang lebih mendalam untuk mengembangkan kekuatan dan asset satu sama lain. Pemerintah daerah memberikan dana proyek kepada OMS dan fasilitator OMS yang diundang oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses *Musrenbang* di tingkat kabupaten menunjukkan peningkatan apresiasi untuk kemampuan yang lemah di pemerintah.
  - Sebuah lingkungan kepercayaan diantara pemerintah daerah dan OMS membuka kesempatan untuk bekerja pada pembuatan peraturan yang mendukung tata pemerintahan lokal yang demokratis termasuk *Perda*

mengenai perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan adil, peningkatan penyediaan pelayanan publik, manajemen sumber daya alam dsb.

- Mekanisme umpan balik yang diinisiasi oleh OMS, bahkan bila awalnya terlihat mengancam pegawai pemerintah karena berkaitan dengan kinerja mereka, dapat menjadi forum untuk pertukaran yang menciptakan sebuah pemahaman yang lebih baik terhadap asset yang tersedia dan tantangan yang dihadapi, begitu pula membuka kesempatan untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima kedua pihak.
- Menunjukkan bukti suksesnya yang berpusat pada rakyat, partisipatif dan alternatif yang fleksibel kepada proses 'resmi' pemerintah yang masih dalam kerangka kerja peraturan hukum menarik perhatian begitu pula komitmen pegawai pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya – baik manusia maupun keuangan.

#### 4. Perluasan dampak (Scaling up) dari suksesnya pendekatan

- Untuk menarik perhatian para pembuat keputusan kebijakan dalam pemerintah dan melobi komitmen mereka untuk mereplikasikan keberhasilan pendekatan alternatif, perlu memiliki sebuah proses, hasil (dan bila memungkinkan dampak) dari pendekatan ini terdokumentasikan dengan baik.
- Kolaborasi yang efektif diantara OMS, pemerintah daerah serta lembaga donor membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai stakeholder yang luas yang bermanfaat untuk mengembangkan upaya-upaya. Kolaborasi yang berhasil akan menarik perhatian dan memberikan semangat dan hasil dari pihak luar yang ingin menjadi bagian dari keberhasilan tersebut dan dengan demikian memberikan kontribusi pada sumber daya mereka sendiri.
- Bukti pengembangan pengalaman yang melibatkan orang miskin dan perempuan dan mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang demokratis seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi lebih mudah dan cepat untuk diperluas dampaknya ketika terdapat kerangka kerja peraturan yang melindungi dan mendukung pendekatan itu. OMS dan pemerintah daerah, bersama DPRD perlu untuk terlibat guna memastikan peraturan ini ada.

Beberapa pembelajaran mengenai upaya-upaya untuk mendukung kepemimpinan perempuan datang dari lokakarya AusAID yang difasilitasi oleh ACCESS mengenai kepemimpinan perempuan dan gender yang dihadiri oleh gender focal poin dan staf AusAID lainnya (lihat juga bab 6.1). Di bawah ini adalah diantaranya:

- Terdapat kebutuhan untuk mendukung kepemimpinan perempuan secara terus-menerus karena:
  - Memungkinkan pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dan mengoptimalkan hasil-hasilnya
  - Mempengaruhi pembuat keputusan pada kesehatan dan penanggulangan bencana yang dapat menyelamatkan jiwa (contoh, HIV, kesehatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi dan manajemen bencana)
  - Mendukung agenda mempengaruhi bagi pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan yang inklusif, yang bersifat kritis untuk mengembangkan generasi masa depan

- Mempromosikan pendekatan berbasis hak-hak kepada kepemimpinan (dimana menegaskan lagi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama)
- Memastikan bahwa laki-laki menjadi lebih sadar akan kebutuhan perempuan (dan begitu sebaliknya)
- Memungkinkan perempuan untuk mempengaruhi pergeseran paradigma menuju pembangunan yang lebih inklusif.
- Aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan dari kepemimpinan perempuan:
  - Kepemimpinan perempuan tidak berarti perempuan harus berada pada posisi 'atas', tetapi bahwa mereka secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
  - Kepemimpinan perempuan seharusnya digunakan untuk mengejar keadilan gender tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan dalam peran kepemimpinan
  - Kepemimpinan perempuan harus melibatkan interaksi dengan laki-laki penyokong dan pendukung
  - Upaya-upaya kepemimpinan perempuan perlu untuk berdasarkan pada apa yang telah dicapai (termasuk pembuatan ulang bahan-bahan/ sumber daya yang berguna yang sudah tidak ada lagi salinannya).

## 5 Keberlanjutan

Pendekatan Program ACCESS dan pelaksanaan strategi dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung kepemilikan dengan cara:

- **Mitra ACCESS** termasuk penyedia layanan pengembangan kapasitas serta Mitra pelaksanaan di 16 kabupaten
- **Pemerintah daerah** melalui PAK serta melalui alokasi anggaran secara khusus untuk pelaksanaan Rencana Aksi OMS yang telah mereka buat, dan
- Yang paling penting dengan cara mitra utama penerima manfaat yang didukung untuk belajar mengenai sistem untuk interaksi yang aktif dengan pemerintah pada isu-isu yang beragam yang bermanfaat bagi mereka.

Pengalaman dari tiga faktor ini khususnya yang terkait dengan interaksi diantara mereka dan kepemilikan yang dibangun dari permulaan merupakan jaminan akhir dari keberlanjutan.

Strategi ACCESS bagi keberlanjutan seperti yang dijelaskan dalam laporan sebelumnya tidak berubah dan tetap fokus pada memastikan bahwa staf kita sendiri, serta Mitra pelaksanaan ACCESS, berinteraksi terus-menerus pada:

Membangun Modal Sosial dengan cara memberikan kesempatan pengembangan kapasitas bagi penduduk desa, anggota Organisasi Berbasis Masyarakat, staf OMS, DPRD serta mitra pemerintah.

- Meningkatkan sebuah lingkungan kepercayaan diantara berbagai stakeholder termasuk pegawai pemerintah, OMS, anggota DPRD dan sektor swasta dengan cara menyediakan ruang bagi interaksi dan membangun strategi pengembangan bersama yang dapat didukung oleh seluruh stakeholder.
- Menguatkan sebuah pendekatan berbasis aset yang menghargai sumber daya yang tersedia secara lokal dan itu menjadikan kepemimpinan dan pembuatan keputusan untuk perubahan di tingkat lokal.

ACCESS dan Mitranya mendorong hal ini dengan cara:

- Mendukung pemerintah daerah dengan meningkatkan metodologi (dalam sistem yang telah ada) yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi
- Membangun sistem lokal tetapi meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih adil dan berpartisipasi dalam pendekatannya
- Memastikan penghargaan terhadap apa yang tersedia sebagai sumber utama bagi perubahan
- Mendukung pengembangan kapasitas strategis dengan cara memastikan refleksi dan diskusi yang lebih dalam dan membuka kemungkinan bagi interaksi yang kritis dengan cara membangun hubungan dan interaksi yang telah ada.

Peningkatan perhatian yang diberikan pada masa pelaporan untuk mendukung pengembangan peraturan di tingkat kabupaten dan desa. Di tingkat kabupaten hal ini terjadi dengan cara berinteraksi secara lebih strategis dengan DPRD dan badan pemerintah yang relevan. Di tingkat desa, memang merupakan bagian dari proses yang dilakukan Mitra ACCESS guna memastikan bahwa rencana desa serta anggaran dikelola sesuai dengan peraturan yang relevan yang termasuk diantaranya *Perdes* tentang *RKPD*es dan *APB*Des.

Strategi keberlanjutan direview selama enam bulan sebelumnya dan indikasinya bahwa strategi itu tidak memerlukan revisi pada saat ini.

## 6 Isu-isu Mutakhir

### 6.1 Keadilan Gender

ACCESS sangat dikenal dalam pengarusutamaan gender dalam konteks Program. Pada periode pelaporan ini ACCESS secara terus menerus aktif mempromosikan keadilan gender diantara Mitranya dan mitra penerima manfaat utama, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari kerja pengembangan yang didukung AusAID melalui AIP.

Selama enam bulan terakhir ACCESS telah mendukung pengarusutamaan gender dalam AIP dengan dua cara yang berbeda, pertama dengan cara mendukung pengembangan dan pelaksanaan survey AusAID mengenai penilaian gender terkait dengan penggabungan gender dalam program AIP dan kedua, dengan cara mengadakan lokakarya mengenai pengarusutamaan gender dan kepemimpinan perempuan bagi sekitar 30 orang staf AusAID. Presentasi mengenai pengarusutamaan gender diikuti dengan diskusi kelompok yang fokus pada kepemimpinan perempuan yakni, apa maksudnya, mengapa penting, dan dimana kesempatannya di dalam program untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan.

Dalam konteks Program, ACCESS terus bekerja dengan Mitranya untuk memastikan kebijakan GSI-nya ditegakkan di dalam kegiatan Mitra, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola oleh Mitra Strategis dan pelaksanaan Rencana Aksi lokal oleh Mitra OMS.

Mitra Strategis kami, Gita Pertiwi melakukan sebuah penilaian tentang kepemimpinan perempuan dalam pengembangan ekonomi rumah tangga di Buton dan Muna. Ditemukan bahwa 70-95% dari pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan anak, yang menyoroti peran keuangan kritis yang dimainkan perempuan dalam pendidikan dan kesejahteraan anak mereka.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan strategi GSI, Mitra ACCESS menyumbang melalui empat cara seperti dibawah ini:

- Meningkatkan status ekonomi perempuan pedesaan, khususnya perempuan dari rumah tangga miskin, melalui kegiatan pengembangan kapasitas di dalam manajemen usaha termasuk dalam produksi dan pemasaran. Ribuan perempuan terorganisir dengan lebih baik dan telah mendapatkan kemampuan dasar dalam mengelola usaha mereka dengan cara yang lebih efektif dengan cara mendapatkan bahan-bahan dalam bentuk grosir dan memasarkan produk mereka melalui orang 'sales' yang berdedikasi.
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan telah secara khusus diatasi dengan sejumlah Mitra dalam Rencana Aksinya sebagai sebuah bagian terpadu dari kegiatan dana hibah. Di sejumlah kabupaten forum khusus perempuan telah muncul untuk mendiskusikan strategi dan pendekatan guna memastikan bahwa suara mereka didengar (termasuk di dalam proses *Musrenbang*) dan bahwa aset dan kekuatan yang diidentifikasi secara mandiri dapat digunakan untuk memaksimalkan dampak guna mendukung pembangunan lokal.
- Meningkatkan akses yang seimbang terhadap pelayanan kesehatan dan mempromosikan keterlibatan pria dalam kesehatan dasar terjadi di sejumlah kasus. Pusat pengaduan yang dibangun dengan lebih baik terbukti sukses dalam menegosiasikan pelayanan yang lebih baik dengan Pusat Pelayanan Kesehatan dan rumah sakit. Pusat pelayanan ini telah menjadi alat dalam memantau program pemerintah di sektor kesehatan serta bernegosiasi dengan pemerintah daerah mengenai pelayanan kesehatan.
- Mengurangi kekerasan rumah tangga, yang jumlahnya tinggi di sejumlah kabupaten tempat ACCESS bekerja, meningkat dikarenakan perempuan mendapatkan kemampuan komunikasi yang lebih baik, dapat menggunakan mekanisme pendukung seperti halnya pusat masyarakat dan pusat pengaduan yang selanjutnya dapat merujuk keluhan mereka ke tingkat yang lebih tinggi serta menegosiasikan dengan penegak hukum bagi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi perempuan dan anak.

ACCESS dapat menunjukkan bahwa investasi dalam hal pengarusutamaan gender terbayarkan dalam arti perempuan mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, perempuan mengekspresikan bahwa dampak yang paling penting terhadap mereka tidak hanya tentang mampu menyumbang secara keuangan kepada rumah tangga tetapi lebih pada pengakuan terhadap kontribusi mereka dan menuju kearah kehidupan yang lebih bermartabat.

## 6.2 Lingkungan

Terdapat 10 Mitra yang melaksanakan program dengan topik tematik Manajemen Sumber Daya Alam Yang Dipimpin Oleh Masyarakat (*Community-Led Natural Resource Management/CLNRM*) seperti yang dijelaskan di dalam Tabel 3.

**Tabel 4: Daftar Rencana Aksi dengan Wilayah Tematik Manajemen Sumber Daya Alam**

Nama Mitra	Judul Rencana Aksi	Jumlah Dana Hibah	Provinsi/Kabupaten
Yayasan Bina Cempe	Partisipasi dan keseimbangan diantara perempuan, kaum muda, kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya dan stakeholder lainnya dalam manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan	598,350,000.00	Nusa Tenggara Barat\Dompu

Nama Mitra	Judul Rencana Aksi	Jumlah Dana Hibah	Provinsi/Kabupaten
Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi	Menguatkan Akses dan Kontrol Masyarakat Sipil Melalui Advokasi Manajemen Sumber Daya Alam Yang Berbasis Masyarakat di Lombok Barat	708,565,000.00	Nusa Tenggara Barat\ Lombok Barat
LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Mempercepat Legalitas manajemen Hutan Masyarakat di Mareje Bonga Melalui Manajemen Hutan Yang Berkelanjutan yang Demokratis dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	614,360,000.00	Nusa Tenggara Barat\ Lombok Tengah
Institut Lintas Timor Untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial	Desa Sehat Berbasis Masyarakat	939,900,000.00	Nusa Tenggara Timur\Kupang
PAKTA Sumba Yayasan	Manajemen Sumber Daya Alam Yang Berbasis pada Kaum Miskin dan Perempuan	726,107,500.00	Nusa Tenggara Timur\ Sumba Barat
Lembaga Ekonomi Desa Lolo Gading	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara penguatan kader lingkungan dan menginisiasi kebijakan berbasis pada pengetahuan lokal	538,375,000.00	Sulawesi Selatan\Bantaeng
Lembaga Bumi Indonesia	Konservasi dan penggunaan sumber daya resapan air di Jeneberang	859,875,000.00	Sulawesi Selatan\Gowa
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Jeneponto Hijau dan Bersih	331,002,489.00	Sulawesi Selatan\Jeneponto
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air*	Jeneponto Hijau dan Bersih	467,912,500.00	Sulawesi Selatan\Jeneponto
Lembaga Abdi Masyarakat	Konservasi dan Perlindungan Lingkungan (untuk menciptakan Ruang Hijau, Keamanan Pangan dan Habitat Hidup Yang Bersih)	645,995,000.00	Sulawesi Selatan\Takalar
Bina Potensi Desa Yayasan	Internalisasi prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Lokal Yang Demokratis dalam Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan pengembangan ekonomi desa berdasarkan pada aset lokal di kabupaten Buton.	822,100,000.00	Sulawesi Tenggara\Buton

\* PGA ini merupakan sebuah pembaruan tahunan dari PGA sebelumnya bagi organisasi tersebut.

Tiga Mitra di NTB bekerja di kehutanan rakyat. Dua Mitra memperjuangkan status hukum tentang hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan mengelola sumber daya hutan di wilayah yang dikategorikan sebagai hutan masyarakat<sup>11</sup>, dan pula membantu masyarakat dalam menjaga hutan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Di Lombok Barat, Konsepsi telah sukses dalam membantu sebuah kelompok masyarakat di wilayah Sesaot<sup>12</sup> dalam mengamankan ijin usaha untuk penggunaan hutan masyarakat dengan masa konsesi 35 tahun untuk sebuah daerah yang luasnya 185 hektar. Asosiasi Mareje Bonga di Lombok Tengah telah sukses dalam membantu dua koperasi lokal mendapatkan ijin usaha untuk penggunaan aset hutan masyarakat melalui surat keputusan Bupati<sup>13</sup>. Hanya minggu lalu, dua kelompok lainnya menerima hak yang sama menjadikan jumlah desa yang terlibat menjadi empat.

<sup>11</sup> *Hutan Tanaman Rakyat (HTR) and Hutan Kemasyarakatan (HKm)*

<sup>12</sup> *Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan*

<sup>13</sup> This was done through Bupati Decree SK Bupati no 394 on 8 July 2010 for Tekad Lestari Cooperation and SK Bupati no 395 for Karya Utama Cooperation through the form of a business licence for use of community forestry (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat) in Mangkung village and Pandan Indah village.

Di Sumba Barat, ACCESS mendukung Pakta Sumba di enam desa untuk memperjuangkan NRM yang berkelanjutan. Divisi kehutanan telah memberikan komitmen di enam desa tersebut untuk menanam 25 hektar hutan masyarakat di tiap desa. Pakta Sumba juga telah sukses dalam memfasilitasi sebuah perjanjian diantara masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga sumber daya alam desa dengan cara-cara berikut:

- Pemeliharaan sumber daya air melalui penghutanan kembali rumah tangga dan pengendalian ternak di sekitar daerah resapan;
- Pemeliharaan padang rumput dan hutan melalui pembakaran yang terkendali;
- Perlindungan Fauna dengan cara melarang perburuan dan jual beli binatang liar;
- Perlindungan laut dengan cara melarang penggunaan racun untuk mencari ikan.

Kesepakatan tersebut diresmikan dalam pertemuan perencanaan desa 2011. Menurut Departemen Kehutanan selama sesi pleno di Jakarta 2010, upaya-upaya ini telah menyumbang pada peningkatan cakupan tumbuhan di Sumba dimana telah naik dari 7,5% menjadi 10,5% di bulan November 2010<sup>14</sup>.

Di Sulawesi Selatan, ACCESS mendukung program Mitra terkait dengan NRM di masing-masing empat kabupaten sasaran Jeneponto, Bantaeng, Takalar dan Gowa. Tiga dari Rencana Aksi tersebut memiliki sinergi langsung dengan program pemerintah Hijau dan Bersih, dimana mempromosikan penghutanan kembali. Rencana Aksi itu juga mencari cara untuk menguatkan kebijakan lokal mengenai NRM. Ke empat Rencana Aksi itu sedang dilaksanakan oleh Lembaga Bumi Indonesia di Gowa dan bekerja di 13 desa disepanjang Sungai Jeneberang dan terfokus pada manajemen daerah resapan air yang berkelanjutan.

Di Sulawesi Selatan, salah satu kesuksesan selama masa pelaporan ini berupa Rencana Aksi dari Bina Potensi Desa di Buton, yang telah bekerja di 12 desa melihat pada NRM yang lebih berkelanjutan. Salah satu isu penting di daerah ini adalah penebangan liar dan pembabatan hutan. Salah satu kelompok ekonomi yang didampingi oleh Bina Potensi Desa di desa Wagari telah sukses dalam menciptakan kesempatan melalui produksi rumput laut dan sebagai akibatnya semua kegiatan penebangan liar menjadi berhenti. Gerakan ini telah dikuatkan oleh peraturan desa yang mengatur tentang kegiatan kehutanan. Sukses ekonomi dari inisiatif ini telah menyita perhatian dari desa tetangga, seperti halnya Kamelanta di Kecamatan Kapontori, yang sekarang juga melobi pemerintah desanya untuk peraturan tentang manajemen daerah pantai yang lebih berkelanjutan.

### 6.3 Anti-Korupsi

ACCESS terus melaksanakan Rencana Pengendalian (*Fraud Control Plan*) dan tindakan anti korupsi sesuai dengan kebijakan AusAID. Prinsip panduan transparansi dan akuntabilitas ACCESS telah diterapkan dalam menjalankan ACCESS itu sendiri, seperti yang dibuktikan dalam POH dan FMM. Prinsip-prinsip ini juga dipromosikan bersama Mitra kami, seperti yang dibuktikan dalam Manual Keuangan OMS untuk penerima dana hibah, Panduan Keuangan bagi Mitra Strategis, dan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi Mitra ACCESS, dan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi Mitra ACCESS yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pendanaan.

---

<sup>14</sup> Departemen Perencanaan dan Kementrian Keuangan, Jakarta, November 2010. Foto Area diambil pada November 2010 dan difoto pada saat puncak musim kemarau.

Salah satu tantangan dalam mengelola program dana hibah adalah pengendalian kecurangan, khususnya dengan Mitra yang memiliki kapasitas yang terbatas. Sebagai contoh, penggelembungan dana (*mark-up*) dan penerimaan pembayaran dua kali (*accepting double payments*) (yakni, menerima dukungan gaji penuh dibawah dana hibah dan mengambil fee tambahan bagi Bantuan Teknis dibawah dana hibah yang sama) dianggap sebagai cara penggalangan dana yang bisa diterima oleh banyak OMS. Untuk mencegah hal ini, ACCESS menggunakan berbagai manajemen strategi, termasuk:

- Memiliki kontrak yang jelas dalam Bahasa Indonesia, yang secara jelas menyebutkan tanggung jawab penerima dana hibah, khususnya pelaporan keuangan dan panduan kecurangan
- Memiliki kontrak 'sosialisasi' dengan Mitra potensial sehingga mereka sadar terhadap isi kontrak sebelum menandatangani
- Memiliki saksi dari masyarakat penerima dan/atau pemerintah daerah yang menyaksikan persetujuan dana hibah
- Memberikan pelatihan keuangan wajib secara satu-persatu terhadap organisasi Mitra ketika kontrak ditandatangani guna memastikan bahwa organisasi tersebut mengerti persyaratan laporan keuangan dan panduan kecurangan.
- Penyediaan Manual Manajemen Keuangan bagi OMS
- Mendorong penggunaan informasi masyarakat di desa penerima dana hibah, dimana data keuangan yang berkaitan dengan dana hibah dapat dicatat dan tersedia untuk dilihat oleh siapapun
- Diperlukan laporan keuangan dana rutin (setiap bulan) dan memberikan umpan balik yang rinci pada laporan keuangan organisasi
- Penjadwalan audit secara penuh (termasuk program dan audit keuangan) paling tidak satu kali selama masa dana hibah
- Pemantauan rutin kegiatan dana hibah oleh staf ACCESS

---

*Saya merasa gugup mengenai audit tetapi setelah itu semua kami merasa senang karena bukan hanya bersifat audit keuangan tetapi juga audit terhadap program. Sekarang kami mengerti hubungan diantara pelaporan program dan pelaporan keuangan dan belajar lebih banyak mengenai penerapan dari nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. (Mareity Wala, Bendahara, Yayasan Pakta Sumba)*

---

Selama masa laporan ini, 33 audit Dana Hibah Proyek masa pertengahan dilaksanakan disemua kabupaten sasaran. Dari 33 audit tersebut, empat audit penyelidikan dilaksanakan berdasarkan pada kecurigaan telah terjadi kecurangan. Di keempat contoh, audit penyelidikan menyimpulkan bahwa isu-isu awalnya diidentifikasi merupakan hasil dari manajemen keuangan yang buruk dan dianggap bukan sebagai kecurangan. Di keempat kasus tindakan perbaikan telah dilakukan dan pelatihan lebih lanjut diselenggarakan bersama Mitra. Tim keuangan terus memberikan dukungan pendampingan kepada semua mitra untuk setiap bulannya.

Program menemukan bahwa penerapan yang konsisten dan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur ACCESS terkait dengan manajemen keuangan yang baik berakibat pada manajemen keuangan program Mitra yang lebih transparan dan akuntabel. Mitra, khususnya di kabupaten yang lama, saat ini siap menerima audit sebagai cara menunjukkan internalisasi mereka atas praktek manajemen yang baik.

## 6.4 Kemitraan

Strategi yang dijelaskan dalam kesepakatan kemitraan diantara GOI dan SOA seperti yang dijelaskan dalam Strategi Program Negara AusAID 2008-2013 memandu upaya-upaya ACCESS untuk mendukung pendekatan kemitraan.

Strategi 1. Membantu Indonesia menggunakan sistem dan sumber daya mereka sendiri secara lebih efektif

Sejumlah strategi yang telah terbukti yang dibuat di bawah Program memiliki potensi yang secara mendasar menyumbang pada target kemiskinan yang lebih efektif dan telah dihargai oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan juga nasional (pusat) dan stakeholder sejenis. Untuk menyebutkan beberapa – peningkatan pengembangan kapasitas bagi fasilitator pengembangan seperti yang diatur dalam *Permendagri 7/2007*; pemetaan sosio-ekonomi secara partisipatif terhadap desa untuk meningkatkan target kemiskinan dan bantuan langsung kepada yang miskin dan pihak yang tidak diuntungkan di masyarakat; pembuatan *RPJMDes* yang partisipatif dan pembuatan *RKPDes* dan *APBDes (PP 72/2005)* oleh fasilitator desa untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan oleh departemen teknis serta inisiatif dari kabupaten dan provinsi lebih terarah secara efektif; mendukung perencanaan tingkat kabupaten (seperti yang diatur dalam *Surat Edaran Bersama*).

Sejumlah kabupaten saat ini mengalokasikan dana APBD untuk memastikan bahwa pendekatan-pendekatan yang sudah terbukti ini direplikasikan di kabupaten (meningkatnya jumlah fasilitator desa yang terlatih, meningkatnya jumlah desa yang memiliki peta sosio-ekonomi yang lebih baik untuk target kemiskinan seperti yang dituangkan dalam *RPJMDes*).

Menerima kunjungan dari para pembuat keputusan dari Jakarta (PMD-Moha-BAPPENAS, TNP2K, dsb) merupakan cara lain dalam memastikan bahwa lebih banyak orang, khususnya para pembuat kebijakan (termasuk satu yang dari provinsi), mendapatkan akses untuk membuktikan pendekatan yang memungkinkan mereka menggunakan sumber daya mereka secara lebih efektif.

Strategi 2. Secara aktif berinteraksi dengan Masyarakat Sipil guna menguatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi dan perubahan kebutuhan.

ACCESS dirancang sebagai sebuah Program penguatan masyarakat sipil dan mayoritas dari kegiatannya berkaitan dengan strategi ini. ACCESS mendokumentasikan perilaku yang baik dan menyiapkan panduan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari keterlibatan masyarakat sipil pada proses kabupaten terlihat dengan jelas.

Pelaksanaan lebih dari 60 Rencana Aksi oleh Mitra lokal semuanya terkait dengan peningkatan partisipasi warga, membantu pembentukan mekanisme yang saling menguntungkan dalam penyediaan pelayanan publik, dan memastikan penggunaan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap dana publik.

Strategi 3. Keselarasan lembaga donor untuk meningkatkan efektifitas bantuan

ACCESS memiliki sebuah strategi yang jelas untuk mereplikasi proses dan pendekatan dan mempengaruhi lembaga donor lainnya dan program lainnya di tingkat nasional maupun di tingkat lokal (kabupaten dan provinsi).

Kolaborasi secara khusus dicari dengan program dan lembaga donor untuk memecahkan isu-isu tata pemerintahan yang lebih baik (dan keterlibatan masyarakat sipil) dan pengurangan kemiskinan. Kesempatan juga dicari pada pertukaran pengalaman, informasi, perilaku yang baik, pembelajaran, serta berbagi pendekatan, strategi dan alat. Sejumlah contoh telah disoroti di bagian lainnya dari laporan ini (lihat pada bagian 2.2.4 untuk lebih jelasnya).

Arahan yang ditentukan oleh Direktur Bagian DPRRD AusAID untuk meningkatkan dalam mengumpulkan pengetahuan dan berbagi pengalaman dan kesuksesan dengan pengembangan stakeholder lainnya merupakan tahap berikutnya menuju penggunaan dana pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

## 7 Manajemen Resiko

ACCESS menggunakan Pertemuan Perencanaan Tahunan dan CLM untuk mereview Matrik Manajemen Resiko dan mendiskusikan berbagai resiko yang muncul. Sebagian besar resiko yang diidentifikasi dalam laporan enam bulan sebelumnya masih tetap ada dan telah disertakan dalam Matrik Pemantauan Resiko yang telah diperbarui dan dapat ditemukan di Rencana Tahunan APY4<sup>15</sup>. Tabel dibawah ini menjelaskan resiko baru yang diidentifikasi selama masa pelaporan ini.

**Tabel 5 Resiko yang Diidentifikasi selama Masa Oktober 2010-Maret 2011**

<b>Resiko</b>	<b>Potensi Dampak</b>	<b>Tindakan Manajemen</b>
Reaksi politik yang tidak baik pada ACCESS dikarenakan kegiatan yang sensitif oleh hak milik orang Australia (sebagai contoh pertambangan di Sumba dan Kupang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMS yang didanai ACCESS melakukan kerja advokasi yang keras</li> <li>• Gangguan terhadap kegiatan yang didanai oleh ACCESS karena sumber daya manusianya dialihkan ke hal lain</li> <li>• Mencegah orang yang mau menjalankan tugas ACCESS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACCESS menjaga posisi yang netral</li> <li>• Memastikan staf terbiasa dengan Rencana keamanan</li> <li>• Memastikan OMS jelas berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang didanai ACCESS dan ketaatan pada Kode Etik</li> </ul>
Banyaknya kejadian kecurangan keuangan di kabupaten sasaran yang baru sebagai hasil dari audit tahun pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemungkinan Rencana Aksi yang tertunda bila kasus kecurangan terbukti</li> <li>• Pembatalan PGA</li> <li>• Perlu untuk mengganti anggota staf OMS yang terlibat didalam kegiatan curang menjadikan proyek tertunda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penyegaran mengenai sosialisasi PGA dan panduan keuangan, termasuk kebijakan tentang kecurangan</li> <li>• Pendampingan staf keuangan oleh tim keuangan ACCESS</li> <li>• Penyebarluasan pembelajaran yang dating dari proses audit kepada seluruh Mitra ACCESS.</li> </ul>
Pemerintah nasional tidak menerima nilai yang cukup dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan dukungan dari pemerintah nasional</li> <li>• Perjanjian ACCESS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaksi yang meningkat dengan PMD dan AKLN</li> <li>• Mendorong kunjungan</li> </ul>

<sup>15</sup> Diajukan ke AusAID pada 31 Maret 2011

Resiko	Potensi Dampak	Tindakan Manajemen
Program bagi pegawai pemerintah	dibatalkan	<p>pemantauan lapangan oleh rekanan pemerintah nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan juara-juara pemerintah untuk mempromosikan pendekatan ACCESS didalam pemerintahan</li> <li>• Mempromosikan hubungan yang kuat diantara kegiatan ACCESS dan <i>tupoksi PMD</i></li> </ul>
Pemilihan pemerintah daerah di Kabupaten Buton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMS meluangkan lebih banyak waktu pada kegiatan yang terkait dengan pemilihan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program</li> <li>• Upaya-upaya untuk mengkooptasi ACCESS oleh kepentingan politik yang berbeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua staf Program siaga terhadap resiko ini sehingga tidak masuk kedalam situasi yang kompromistis</li> <li>• Program Officers memastikan pemantauan proyek Mitra</li> </ul>
Pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pelarangan Ahmadiyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan daerah di beberapa kabupaten sasaran ACCESS seperti Lombok, Bima dan Dompu</li> <li>• Proses demokratisasi yang didukung oleh ACCESS akan mengalami langkah mundur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus mempromosikan nilai-nilai ACCESS melalui forum multi stakeholder seperti halnya FLA</li> <li>• Mengadakan <i>soft advocacy</i> pada isu-isu demokratisasi yang lebih luas</li> </ul>
Kehilangan staf OMS terhadap Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua pengetahuan dari OMS lokal hilang</li> <li>• Ketidakmampuan dalam menemukan pengganti staf OMS penting di kabupaten mengakibatkan penundaaan proyek dan berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan proyek oleh OMS Mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PO ACCESS agar mendorong OMS untuk melaksanakan rencana suksesti</li> <li>• Menekankan pada pelembagaan pembelajaran dari program CB ACCESS</li> <li>• Terus terfokus pada transfer keahlian kepada staf yang pengalamannya kurang</li> </ul>

## 8 Manajemen Program

### 8.1 Perekrutan Staf Program

ACCESS saat ini memiliki 42 orang staf lokal, termasuk 14 orang staf yang berada di Bali dan 28 staf yang berada di provinsi, dan dua staf internasional.

Selama masa pelaporan ini, restrukturisasi kantor NTB diinisiasi dengan pengaturan seperti dibawah ini:

- PO di Bima mengambil posisi sebagai Koordinator Provinsi untuk NTB.
- Dua orang PO baru direkrut dan masing-masing memulai kerjanya di Sumbawa dan Lombok
- Koordinator Provinsi sebelumnya untuk Sumbawa mengambil posisi sebagai Senior Technical Officer (STO) MEL berbasis di Bali.

Perekrutan lainnya selama periode pelaporan termasuk diantaranya:

- Penunjukkan yang sukses *STO Documenting, Influencing and Profiling/DIP*
- Perekrutan tambahan PO di Sulsel (diisi secara internal)
- Perekrutan pengganti PAO untuk Sulsel setelah promosi PAO menjadi PO, dan di Kupang setelah pengunduran diri PAO sebelumnya
- Perekrutan seorang Penjaga malam untuk kantor Sultra

Moral dan antusiasme di dalam tim ACCESS saat ini tinggi, meskipun beban kerja masih berat.

Bantuan teknis jangka pendek berikut disediakan selama masa pelaporan:

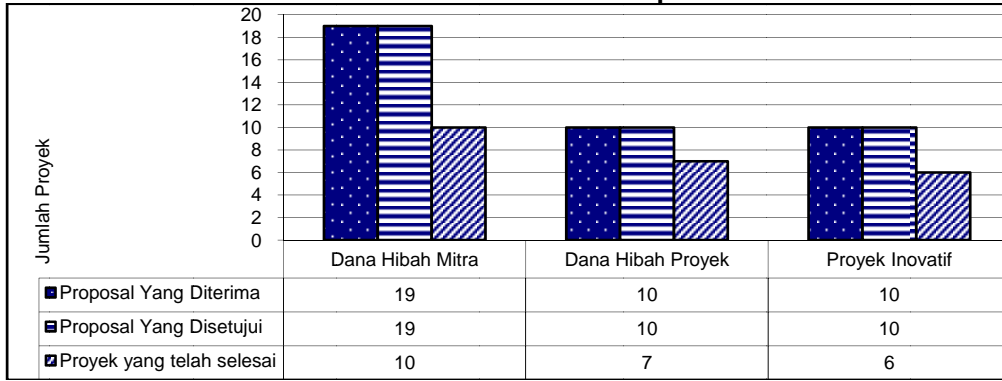
- Masukan oleh CE/Gov Advisor, Greg Rooney, pada kapasitasnya yang jangka pendek khususnya dalam memfasilitasi pertemuan Mitra Strategis Tahunan, dan memberikan bantuan kepada Pertemuan Perencanaan Tahunan dan persiapan Rencana Tahunan.
- Masukan oleh MEL Advisor, Nina Shatifan, dalam merevisi PAMELS dan memulai kerja pada sejumlah studi untuk melakukan penilaian dampak yang muncul
- Bantuan oleh Ahli Perencanaan dan Tata Pemerintahan Desa, I Nyoman Oka, dalam menyelesaikan kerangka kerja dan manual untuk penggabungan RPJMDes; memberikan bantuan teknis khusus dalam kaitannya dengan Rencana Aksi di wilayah perencanaan dan penganggaran; memfasilitasi sejumlah kegiatan ACCESS termasuk pertemuan tematik untuk perencanaan dan penganggaran, dan beberapa sesi teknis selama Pertemuan Mitra Strategis dan lokakarya Perencanaan Tahunan.
- Kerja lebih lanjut oleh Konsultan Pendekatan Berbasis Kekuatan, Chris Dureau, membantu Mitra Strategis dalam memahami dan menerapkan pendekatan berbasis kekuatan. Chris mengadakan klinik SBA bagi semua Mitra Lokal yang fokus pendekatan berbasis aset pada isu teknis khusus dari tiap mitra diselesaikan.

## 8.2 Manajemen Dana Hibah

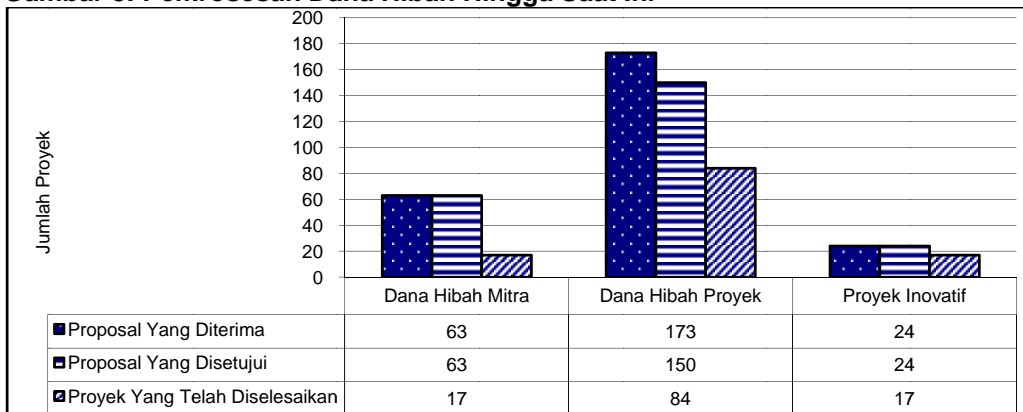
### 8.2.1 Pemrosesan Dana Hibah

Selama masa pelaporan, 39 usulan diterima, 39 disetujui dan 23 proyek diselesaikan. Gambar 7 dan 8 memerikan rincian mengenai proses dana hibah berdasarkan jenis dana hibah untuk periode pelaporan ini dan jumlah total hingga saat ini. Lampiran 5 memuat secara lebih rinci mengenai semua usulan yang diterima, disetujui dan diselesaikan pada periode pelaporan.

**Gambar 7: Pemrosesan dana hibah Pada Masa Pelaporan Ini**



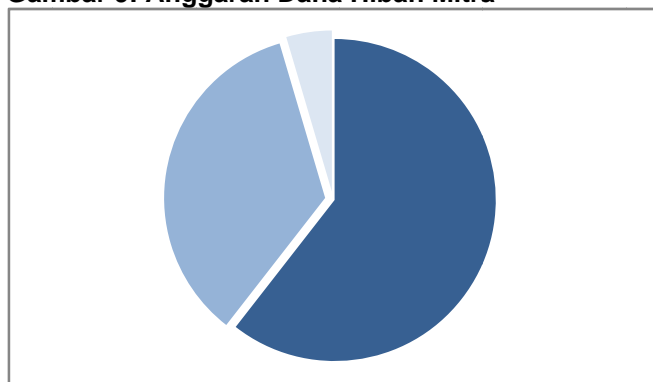
**Gambar 8: Pemrosesan Dana Hibah Hingga Saat Ini**



### 8.2.2 Pengeluaran Dana Hibah

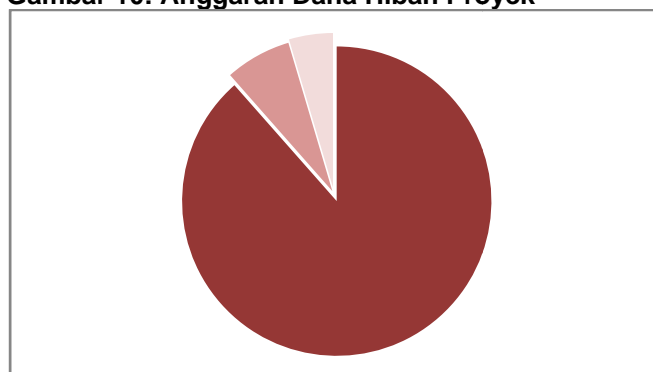
Program telah berada pada jalurnya dalam mengeluarkan anggaran dana hibah pada tahun 2013. Hingga saat ini sebagian besar dana bagi Mitra dan Dana Hibah Proyek telah dialokasikan, dengan 88.5% dana bagi dana hibah proyek telah dikontrakkan (lihat gambar 9-11). Sebagian besar pengeluaran bagi dana hibah inovatif akan terjadi selama dua tahun masa Program termasuk untuk peningkatan jumlah lokakarya sharing dan pembelajaran serta potensi mengadakan sejumlah studi untuk menentukan dampak pendekatan ACCESS. Dengan sebagian besar dana telah diperuntukkan bagi kegiatan khusus, tidak ada lagi dana khusus yang dapat digunakan untuk merespon isu-isu yang muncul. Hal ini sudah disampaikan kepada semua mitra-mitra ACCESS.

**Gambar 9: Anggaran Dana Hibah Mitra**



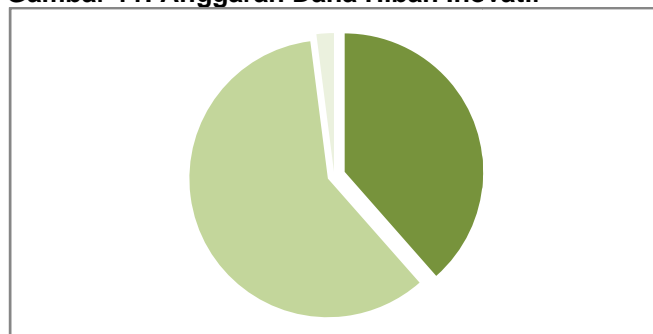
<b>PGA yang ditandatangani</b>	\$	<b>3,427,517</b>	<b>60.2%</b>
<b>Yang Direncanakan</b>	\$	<b>2,029,258</b>	<b>35.6%</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	\$	<b>235,725</b>	<b>4.1%</b>

**Gambar 10: Anggaran Dana Hibah Proyek**



<b>PGA yang ditandatangani</b>	\$	<b>5,037,418</b>	<b>88.5%</b>
<b>Yang direncanakan</b>	\$	<b>392,941</b>	<b>6.9%</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	\$	<b>262,141</b>	<b>4.6%</b>

**Gambar 11: Anggaran Dana Hibah Inovatif**



<b>PGA yang ditandatangani</b>	\$	<b>507,661</b>	<b>40.1%</b>
<b>Yang direncanakan</b>	\$	<b>784,120</b>	<b>62%</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	\$	<b>-26,781</b>	<b>-2.1%</b>

## Lampiran 1: Daftar Istilah

- Boundary Partners** : OMS lokal yang berbagi nilai-nilai yang dipromosikan oleh ACCESS Tahap II dan utamanya mereka yang terfokus pada pergeseran hubungan kekuasaan untuk menciptakan keadilan gender dan sosial yang lebih besar didalam dampak pembangunan lokal. Berdasarkan pada hasil Rencana Interaksi Warga Kabupaten (District Citizens Engagement Plan/PAK), organisasi tersebut akan berjanji untuk secara aktif memecahkan isu-isu yang dihadapi kabupaten dengan cara berinteraksi dengan perorangan, organisasi warga dan jaringan mereka, dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya yang tertarik didalam tata pemerintahan lokal yang demokratis. ACCESS Tahap II mendukung organisasi tersebut dengan menciptakan ruang dan memberikan kesempatan untuk merefleksikan, untuk belajar, untuk bertindak guna meningkatkan kinerja. ACCESS Tahap II menegosiasikan secara langsung dengan organisasi tersebut untuk menentukan jenis perilaku yang ingin/mau mereka pengaruhi secara eksternal dan bagaimana mereka ingin merubahnya secara internal guna untuk mempengaruhi perubahan ini. ACCESS Tahap II akan mendukung secara langsung melalui pengembangan kapasitas individu dan dana hibah untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria Program sesuai dengan prinsip-prinsip panduannya.
- CSO/OMS** : Civil Society Organisations (CSOs)/ Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan kelompok atau asosiasi yang terorganisir yang terpisah baik dari Negara maupun pasar, memiliki otonomi dalam kaitannya dengan Negara dan dibentuk (secara sukarela) oleh anggota masyarakatnya untuk melindungi dan memperluas kepentingan, nilai-nilai atau identitas mereka. Kecuali disebutkan didalam dokumen ini, dalam konteks ACCESS Tahap II, OMS termasuk LSM, Organisasi Berbasis Masyarakat dan organisasi anggota lainnya
- Seluruh Kabupaten** : Termasuk tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- Penerima Dana Hibah** : Sebuah organisasi atau perorangan yang menerima Mitra atau Perjanjian Dana Hibah Proyek dari ACCESS Tahap II, Didanai dari Fund Imprest Account Dana Hibah ACCESS Tahap II. Ini termasuk penerima Mitra, Proyek dan Dana Hibah Inovatif.
- Kabupaten baru** : Ini merupakan delapan kabupaten tambahan yang telah disetujui untuk Tahap II dan termasuk diantaranya Kupang dan TTS (NTT), Bima dan Dompu (NTB), Takalar dan Gowa (Sulawesi Selatan), Kota Bau-Bau dan Buton Utara (Sulawesi Tenggara).

- Kabupaten lama : Ini termasuk kabupaten sasaran sewaktu masa Tahap I : Sumba Barat dan Timur (NTT); Lombok Barat dan Timur (NTB), Jeneponto dan Bantaeng (Sulsel); Muna dan Buton (Sultra).
- Mitra Strategis : Organisasi dengan kemampuan tertentu yang dipilih karena kemampuan mereka yang sudah terbukti untuk membantu pelaksanaan Program. Mereka akan bekerja dengan ACCESS Tahap II dan Boundary Partner-nya melalui dengan cara menyediakan bantuan teknis, pelatihan dan pendampingan kepada Boundary Partner untuk mengembangkan kapasitas, mengadakan penelitian dan data dasar dan menghasilkan bahan-bahan pembelajaran dalam rangka mendukung tujuan Program secara keseluruhan. Mereka juga akan membantu Boundary Partner ACCESS Tahap II didalam menilai jaringan penting dan para pelaku yang beroperasi ditingkat provinsi dan nasional.
- Kabupaten Sasaran : 16 kabupaten tempat dimana ACCESS Tahap II mendapat mandat untuk bekerja.
- Mitra Penerima Manfaat Utama : Mitra Penerima Manfaat Utama adalah mereka yang berinteraksi dengan Boundary Partner kita yang mengupayakan peningkatan tata pemerintahan yang demokratis, termasuk warga, khususnya perempuan dan kelompok terpinggirkan, dan pemerintah daerah maupun nasional/pusat.

## Lampiran 2: Matrik Pemantauan Perkembangan

Matrik Pemantauan Perkembangan melacak perkembangan dibandingkan dengan kegiatan didalam, Rencana Tahunan untuk masa pelaporan ini dan dibandingkan dengan indikator capaian didalam PAMELS. Kegiatan yang direncanakan bagi masa pelaporan ini disoroti dengan warna kuning.

Capaian Wilayah Fungsional 1: ACCESS melaksanakan dan memperbarui sistem dan panduannya mendapatkan sumber daya dan administrasi program		
Indikator Capaian	Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
Buku Panduan Operasi Program (Program Operations Handbook/POH) dan Strategi Program diperbarui bila diperlukan	Revisi FMM dan POH	FMM dan POH diperbarui
Jumlah pengunjung Website ACCESS	Pembaruan setiap bulannya terhadap Ersula, website, GMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,640 pengunjung website</li> <li>• Ersula diperbarui setiap bulannya</li> <li>• Website diperbarui setiap bulannya</li> <li>• GMS diperbarui setiap bulannya</li> </ul>
	Memperbarui strategi Program	<i>Tidak direncanakan pada masa pelaporan ini</i>
Laporan kepada AusAID disampaikan dengan tepat waktu dan berkualitas tinggi	Persiapan dan pengajuan Rencana Tahunan	Semua laporan kontrak kepada AusAID diajukan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo.
	Persiapan dan pengajuan laporan bulanan dan laporan enam bulanan	2 laporan enam bulanan disiapkan dan diajukan kepada AusAID pada tanggal jatuh tempo
	Pengadaan barang bagi Kantor ACCESS	Semua kantor terbentuk dan dilengkapi dengan peralatan
	Audit Eksternal dan Internal	<i>Tidak direncanakan pada masa pelaporan ini</i>
	Penilaian kinerja bagi semua staf	Enam staf dinilai sebelum masa kontrak mereka selesai
% Anggaran yang dialokasikan/dikeluarkan		95.8% dana hibah Mitra dialokasikan 95.4% dana hibah Proyek dialokasikan 100% dana hibah Inovatif dialokasikan

<b>Capaian Wilayah Fungsional 2 : ACCESS berinteraksi dengan OMS dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
	Membantu pembaruan stakeholder utama (pemerintah daerah, OMS dsb) dan mengadakan pemetaan stakeholder (setelah Review PAK)	Stakeholder utama diidentifikasi disepanjang periode.
DSC berfungsi di 16 kabupaten bersama masyarakat sipil, pemerintah daerah dan partisipan dari sektor swasta	Konsolidasi FLA untuk mewakili Masyarakat Sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta di kabupaten baru. Pertemuan rutin FLA di semua kabupaten untuk berdialog mengenai isu-isu, untuk berbagi pembelajaran dengan pandangan pada aksi	16 FLA terbentuk.  49 pertemuan FLA diadakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 di NTB - 4 di Lombok Barat, 4 di Bima, 4 di Dompu.</li> <li>• 7 di NTT - 5 di Sumba Barat, 2 di TTS.</li> <li>• 9 di Sulsel - 2 di Gowa, 2 di Takalar, 2 di Bantaeng, 3 di Jenepono.</li> <li>• 21 di Sultra - 5 di Buton, 4 di Muna, 7 di Bau-Bau, 5 di Buton Utara.</li> </ul>
16 rencana PAK terbentuk dan diperbarui sesuai dengan nilai-nilai ACCESS Tahap II	Review tahunan terhadap kinerja dan proses perencanaan PAK di semua kabupaten	16 PAK terbentuk. Lima review PAK diselenggarakan di Buton, Muna, Buton Utara, Kupang dan TTS.
	Menyajikan hasil-hasil PAK yang telah direvisi kepada pelaku utama untuk membangun dukungan (Setelah Review PAK) (terkait dengan Pembaruan di 2.1.1)	Review PAK didiskusikan didalam pertemuan FLA.
	Pendampingan dan dukungan diberikan oleh staf ACCESS sesuai	Dukungan pendampingan diberikan, khususnya bagi FLA yang masih kesulitan dengan perannya.
	Pertemuan Nasional FLA	Pertemuan Nasional FLA diadakan dengan 67 peserta (37 Laki-laki : 30 Perempuan) dari OMS,

<b>Capaian Wilayah Fungsional 2 : ACCESS berinteraksi dengan OMS dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
		pemerintah daerah, DPRD Universitas dan warga.
<b>Capaian Wilayah Fungsional 3 : ACCESS mengembangkan kapasitas OMS dan jaringannya demi peningkatan LDG</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
	Berdasarkan pada PAK mengadakan penilaian CB dan analisa persyaratan pengembangan kapasitas di semua kabupaten	Penilaian CB diadakan di 16 kabupaten
	Memberikan umpan balik terhadap hasil-hasil Penilaian Kapasitas kepada mitra	Umpan balik diberikan kepada 14 kabupaten melalui pertemuan para Direktur. Di Lombok Barat dan Lombok Tengah hasilnya disampaikan kembali di pertemuan Mitra.
	Menerbitkan perjanjian dana hibah mitra dan Catatan Tugas	3 PGA untuk Mitra Strategis dibuat dan 14 Catatan Tugas diterbitkan pada masa ini.
	Pertemuan rutin bersama masing-masing mitra strategis	Pertemuan rutin diadakan bersama Mitra Strategis untuk mendiskusikan Catatan Tugas dan pelaksanaannya di lapangan.
	Pertemuan Tahunan SP bersama Pertemuan Perencanaan Tahunan ACCESS	Pertemuan SP diadakan di bulan Maret yang dihadiri oleh 12 Mitra Strategis.
Rencana Pengembangan Kapasitas Kabupaten terbentuk dan diperbarui bersama mitra OMS lokal	Mengadakan rencana CB tiap kabupaten di kabupaten lama dan kabupaten baru, lihat 3.1.1	16 Rencana CB Kabupaten terbentuk
	Menyiapkan panduan, metode dan alat untuk mendukung Pengembangan Kapasitas bagi Pemantauan, SBA, Gender dan kepemimpinan perempuan	3 modul / alat terbentuk pada masa ini termasuk: modul pendidikan kesehatan dasar (CD Bethesda), modul usaha (Gita Pertiwi), modul rancangan peraturan (PSHK)

<b>Capaian Wilayah Fungsional 2 : ACCESS berinteraksi dengan OMS dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
Jumlah dan jenis kegiatan CB yang diadakan bagi Mitra CSO	Melaksanakan dan memantau kegiatan CB dalam mendukung Boundary Partners	45 kegiatan CB dilaksanakan termasuk: 9 Bantuan Teknis; 6 pelatihan dalam kelas; 30 lokakarya
	Pelatihan dan Pendampingan untuk mendukung Boundary Partners menyelenggarakan kegiatan CB	Pelatihan dan pendampingan diberikan oleh staf ACCESS, termasuk pelatihan keuangan
	Penilaian tentang kondisi Kaum Muda di kabupaten ACCESS	<i>Tidak dilaksanakan pada masa pelaporan ini. Akan diselesaikan pada bulan April 2011</i>
	Mengidentifikasi pemimpin perempuan yang potensial dan mengembangkan kapasitas mereka	Pelatihan kepemimpinan perempuan dilaksanakan pada masa pelaporan dan pemimpin perempuan yang potensial teridentifikasi.
Jumlah dan % pelatih/fasilitator laki-laki/ perempuan untuk melatih Boundary Partners		Dua pelatihan dilaksanakan pada masa pelaporan ini melibatkan 44 peserta (23Laki-laki: 21Perempuan) dimana 48% perempuan.
Jumlah hari pelatihan berdasarkan gender untuk pelatihan Boundary Partners		3,450 jumlah total hari pelatihan pada masa pelaporan ini (1,467Laki-laki: 1,983Perempuan)
Kepuasan partisipan (berdasarkan gender) dengan kegiatan CB		Responden laki-laki 47% sangat puas 47% puas 6% sebagian besar merasa puas 0% tidak puas  Responden perempuan 61% sangat puas 33% puas 6% sebagian besar merasa puas

<b>Capaian Wilayah Fungsional 2 : ACCESS berinteraksi dengan OMS dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
		0% tidak puas

<b>Capaian Wilayah Fungsional 4: ACCESS mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya is pengembangan mandiri</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
	Memberikan bantuan teknis tentang konsep paper dan penilaian penulisa usulan (diseluruh kabupaten)	Tidak dapat diterapkan pada masa ini
Jumlah desa (total dan tiap kabupaten) yang dicakup didalam Rencana Aksi		781 desa
Jumlah penerima manfaat pada kegiatan tingkat desa berdasarkan gender		Penerima Manfaat : 2,471,750 (1,209,875 Laki-laki: 1,261,876 Perempuan)
	Bantuan teknis kepada Boundary Partners pada proses penilaian	TA terus-menerus diberikan kepada 2 mitra pada masa ini oleh Tim Provinsi dan TAT mengenai penilaian dan perencanaan rencana aksi.
	Bantuan teknis kepada pada proses perencanaan berdasarkan pada OM	2 mitra menerima pendampingan rutin oleh staf ACCESS didalam proses pengembangan usulan berdasarkan pada lokakarya perencanaan OM selama masa ini.
	Dukungan dana hibah untuk penilaian dan perencanaan aksi kepada boundary partners guna memastikan bahwa masyarakat terlibat didalam mengartikan tujuan, hasil, dan kegiatan yang akan menyumbang pada pemberdayaan mereka.	2 PGA diberikan untuk penilaian dan perencanaan
	Memberikan manajemen lokal dan dukungan pendampingan (melalui staf ACCESS) kepada OMS lokal didalam proses persiapan usulan	Staf ACCESS memberikan bantuan teknis dan pendampingan intensif kepada 7 OMS lokal didalam persiapan usulan pada masa pelaporan ini.
	Menilai dan memberikan umpan balik pada usulan guna memastikan nilai-nilai utama dipromosikan dan diutamakan dan berkualitas tehnik tinggi	7 usulan proyek diterima untuk Rencana Aksi selama masa pelaporan dimana dinilai didalam satu bulan sejak diterima.

**Capaian Wilayah Fungsional 4:****ACCESS mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya is pengembangan mandiri**

<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
Jumlah dan jenis Rencana Aksi (berdasarkan wilayah tematik)	Menegosiasikan, menyiapkan dan mengeluarkan PGA	12 PGA dikeluarkan pada masa pelaporan ini untuk Rencana Aksi (5 PGA memiliki tanggal mulai pada 1 Oktober 2010 sehingga perencanaan dan penilaian untuk hal ini diselesaikan pada masa pelaporan sebelumnya).  Hal ini menjadikan jumlah total Rencana Aksi hingga saat ini berjumlah 63.  PGA saat ini berdasarkan wilayah tematik hingga saat ini termasuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• 19 PGA saat ini untuk Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif;</li><li>• 19 PGA untuk Peningkatan Penyediaan Pelayanan Publik;</li><li>• 10 PGA untuk Manajemen Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat;</li><li>• 9 PGA untuk Pengembangan Ekonomi Lokal dan</li><li>• 6 PGA untuk Keadilan Sosial</li></ul>
	Mengadakan pelaporan rutin, analisa dan umpan balik kepada boundary partners	Staf provinsi ACCESS memberikan pendampingan yang intensif bagi 63 boundary partners mengenai pelaporan, analisa dan umpan balik terhadap rencana aksi.
	Pertemuan bagi pimpinan OMS mitra (Direktur & Manajer Program) ditingkat provinsi/ nasional	Pertemuan Direktur diadakan di semua Provinsi ACCESS selama masa ini.
	Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada	Bantuan teknis diberikan kepada 63 boundary

<b>Capaian Wilayah Fungsional 4: ACCESS mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya is pengembangan mandiri</b>		
<b>Indikator Capaian</b>	<b>Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini</b>	<b>Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini</b>
	boundary partners untuk pelaksanaan proyek	partners
	Memberikan dukungan bagi pelaporan naratif dan keuangan guna memastikan kualitas dan akuntabilitas	Umpan balik bulanan terhadap laporan keuangan diberikan kepada semua Mitra. Umpan Balik diberikan pada laporan perkembangan tiga bulanan. 33 audit keuangan dan program dilaksanakan.
	Memberikan pendampingan kepada Boundary Partners tentang pemantauan, evaluasi dan berbagi pembelajaran.	Staf Provinsi ACCESS dan STO memfasilitasi 32 PPR. Mentoring yang terus-menerus didalam M&E diberikan kepada seluruh Mitra disepanjang masa pelaporan.
	Lokakarya mengenai wilayah tematik utama untuk menajamkan strategi rencana aksi mitra.	Dua pertemuan tematik diadakan 1) mengenai Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dan 2) Penyediaan Pelayanan Publik

**Capaian Wilayah Fungsional 5:****ACCESS mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan kebijakan dan perubahan perilaku baik secara internal maupun eksternal**

Indikator Capaian	Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
	Menyiapkan panduan manajemen kualitas data bagi staf	<i>Tidak direncanakan pada masa pelaporan ini</i>
	Memasukkan data ERSULA bagi Dana Hibah dan Kegiatan CB	ERSULA diperbarui setiap bulannya
	Laporan bulanan mengenai data dari GMS dan ERSULA II	Laporan bulanan (6) dihasilkan untuk AusAID dan pemerintah daerah
	Mengadakan pemeriksaan kualitas tiga bulanan mengenai data ERSULA (Lihat 1.2.5)	Dua pemeriksaan Kualitas Tiga Bulanan diadakan
	Merevisi dan melaksanakan Alat Snapshot Pengembangan Masyarakat	<i>Diadakan pada masa pelaporan sebelumnya</i>
	Mengadakan Pertemuan Pembelajaran dan Koordinasi (CLM) bersama manager ACCESS dan TAT	CLM diadakan di bulan Desember 2010 di Bali bagi semua provinsi. Dua CLM provinsi diadakan di NTB dan Sulawesi Selatan
	Mengadakan pemantauan enam bulanan Perkembangan Mitra untuk masing-masing Mitra Boundary (bertahap pada seluruh Mitra)	32 PPR diselesaikan
	Penyebarluasan hasil-hasil IMS dan mendukung penguatan kapasitas OMS lokal untuk menggunakan IMS sebagai alat bagi interaksi dengan pemerintah daerah.	Hasil-hasil IMS disebarluaskan
	Mengadakan dan mempublikasikan paling tidak dua kegiatan penelitian di wilayah strategis (lihat juga 3.4.1)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil dari studi <i>RPJMDes</i> dipublikasikan pada masa pelaporan ini.</li><li>• Studi dilaksanakan dalam peran manajemen ekonomi rumah tangga</li><li>• Studi saat ini sedang menuju kearah revitalisasi</li></ul>

**Capaian Wilayah Fungsional 5:****ACCESS mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan kebijakan dan perubahan perilaku baik secara internal maupun eksternal**

Indikator Capaian	Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
		posyandu
Number and type of activities undertaken through Innovative and Knowledge Sharing grants	Mengelola paling tidak empat Dana Hibah Inovatif termasuk advokasi tingkat nasional	10 usulan diterima dan 10 PGA diterbitkan
	Menyusun alat dan metodologi penilaian dampak	Saat ini sedang dalam perkembangan dan rancangan peta jalan bagi evaluasi termasuk evaluasi dampak terbentuk.
	Mengadakan Studi Kasus	Kerja lapangan untuk studi kasus mengenai usaha ekonomi perempuan dimulai pada masa pelaporan ini
	Mencetak 3 edisi Bulletin ACCESS dan menyebarkan ke stakeholder kabupaten, provinsi dan nasional dan program lembaga donor lainnya.	3000 kopi dari edisi keenam Bulletin ACCESS dicetak dan didistribusikan.
	Mengadakan Survey Pembaca untuk Bulletin	Hasil dari survey pembaca dipublikasikan di edisi 6 Januari 2011
Jumlah publikasi yang berkualitas dihasilkan (contoh, mengenai alat dan pendekatan ACCESS, perilaku yang baik, cerita sukses dan dokumen penelitian)	Menghasilkan paling tidak 5 publikasi mengenai perilaku yang baik, studi kasus, studi penelitian dan cerita sukses.	Lima publikasi dikeluarkan pada masa pelaporan ini (lihat Lampiran 4). Sejumlah serita perubahan diterima dan umpan balik diberikan oleh STO.
Pembelajaran dari ACCESS Tahap II dibagi dengan mitra OMS, stakeholder GOI dan lembaga donor.	Mengadakan lokakarya pembelajaran provinsi tahunan bersama mitra OMS dan pemerintah daerah	2 pertemuan tematik diadakan
	Mengadakan paling tidak 2 presentasi nasional mengenai pendekatan dan hasil-hasil ACCESS Tahap II (termasuk Bakti Expo)	2 presentasi internasional diadakan 2 presentasi nasional, termasuk tentang penyasaran kemiskinan PNPM dan forum Bakti

**Capaian Wilayah Fungsional 5:****ACCESS mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan kebijakan dan perubahan perilaku baik secara internal maupun eksternal**

Indikator Capaian	Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
		KTI
	Mengidentifikasi kesempatan bekerjasama dengan PNPM ditingkat kabupaten dan berbagi pembelajaran dengan PNPM tingkat nasional	Kesempatan bagi kerjasama dengan PNPM diidentifikasi selama masa ini. Di Dompu ACCESS telah mendorong Pemda untuk membuat sebuah proyek percontohan di kecamatan Manggalewa untuk kerjasama PNPM-ACCESS. Kerjasama terus berjalan di semua provinsi ACCESS.
	Mengidentifikasi kesempatan untuk menyajikan pendekatan dan hasil-hasil ACCESS Tahap II melalui pertemuan pemerintah provinsi dan nasional (pusat)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra di Sulawesi Selatan menyajikan kepada pegawai dari kementerian Kesejahteraan Rakyat dan BAPPENAS selama peresmian <i>PanduGerbangKampung</i>.</li><li>• Sejumlah pemerintah daerah yang didukung ACCESS telah setuju untuk ambil bagian didalam survey "<i>Diagnosa tentang pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada bukti dibawah desentralisasi</i>" dimana dilaksanakan sebagai bagian dari "<i>Revitalisasi Sektor Pengetahuan Indonesia untuk Kebijakan Pembangunan</i>", sebuah studi yang diadakan oleh AusAID bekerjasama dengan BAPPENAS.</li></ul>
	Mengembangkan hubungan baru dan hubungan yang telah ada bersama AusAID (contoh, AIPMNH, ANTARA, AIPD, SADI dan AIPBEP) dan program lembaga donor lainnya di provinsi ACCESS (sebagai contoh, TAF, Oxfam, CIDA, UNFPA)	<ul style="list-style-type: none"><li>• AIPD bekerjasama dengan ACCESS dalam kerjanya di Lombok Tengah</li><li>• Bekerjasama dengan AIFDR mengenai pemetaan sosial</li><li>• Salah satu Mitra lokal ACCESS, Mitra Turatea,</li></ul>

**Capaian Wilayah Fungsional 5:****ACCESS mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan kebijakan dan perubahan perilaku baik secara internal maupun eksternal**

Indikator Capaian	Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
		bekerjasama dengan Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia <ul style="list-style-type: none"><li>• ACCESS bekerjasama dengan AIPMNH di Sumba didalam memfasilitasi proses <i>RPJMDes</i>.</li><li>• ACCESS memberikan masukan mengenai substansi dari peraturan kabupaten yang baru tentang kesehatan ibu hamil dan anak bersama AIPMNH di Sumba Barat dan Sumba Timur</li><li>• Alat MKPPDes terbdntuk dalam kerjasamanya dengan AIPD yang saat ini sedang diuji di lapangan di Bantaeng dan Sumba Barat.</li></ul>
	Mengadakan lokakarya pembelajaran Nasional bersama MOHA dan pemerintah daerah	2 pertemuan tematik diadakan dimana mengundang pemerintah daerah dan nasional rekanan.
	Menyumbang pengembangan dan pelaksanaan AIPD AusAID dan program lainnya bila perlu	<ul style="list-style-type: none"><li>• AIPD bekerjasama dengan ACCESS dalam kerjanya di Lombok Tengah</li><li>• Bekerjasama dengan AIFDR mengenai pemetaan sosial</li><li>• Salah satu Mitra lokal ACCESS, Mitra Turatea bekerjasama dengan Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia</li><li>• ACCESS bekerjasama dengan AIPMNH di Sumba didalam memfasilitasi proses <i>RPJMDes</i>.</li><li>• ACCESS memberikan masukan mengenai substansi peraturan kabupaten yang baru tentang kesehatan ibu hamil dan anak bersama</li></ul>

**Capaian Wilayah Fungsional 5:****ACCESS mempromosikan pembelajaran yang berkelanjutan dan kebijakan dan perubahan perilaku baik secara internal maupun eksternal**

Indikator Capaian	Kegiatan Yang Direncanakan Berdasarkan Pada Rencana Tahunan Lihat kotak yang diberi warna kuning untuk Masa Pelaporan Ini	Perkembangan Pada Masa Pelaporan Ini
		AIPMNH di Sumba Barat dan Sumba Timur. • Alat MKPPDes terbentuk dalam kerjasamanya dengan AIPD dan saat ini sedang diuji di lapangan di Bantaeng dan Sumba Barat.
	Mengidentifikasi paling tidak satu kesempatan untuk berpartisipasi didalam sebuah evaluasi eksternal dan independen tentang tata pemerintahan demokratis di Indonesia (sebagai contoh, UNDP; PNPM; AIPD, World Bank dsb) - waktunya tergantung pada kesempatan yang ada.	Sebagian kabupaten ACCESS terlibat didalam survey " <i>Diagnosa tentang pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada bukti dibawah desentralisasi</i> " dimana dilaksanakan sebagai bagian dari " <i>Revitalisasi Sektor Pengetahuan Indonesia untuk Kebijakan Pembangunan</i> ", sebuah studi yang diadakan oleh AusAID bekerjasama dengan BAPPENAS.

**Lampiran 3: Perkiraan Pendanaan Enam Bulanan**

**RINGKASAN YANG TELAH DIBAYARKAN & PERKIRAAN  
PENGELUARAN  
OKTOBER 2010 - SEPTEMBER 2011**

Perkiraan nilai  
tukar : Rp8,500

<b>PERIODE</b>	<b>JENIS DANA HIBAH</b>			<b>T O T A L</b>
<b>BULAN</b>	<b>DANA HIBAH MITRA</b>	<b>DANA HIBAH PROYEK</b>	<b>DANA HIBAH INOVATIF</b>	
<b>Okt'10-Mar'11</b> <i>(telah dibayarkan)</i>	\$848,506	\$942,876	\$193,769	<b>\$1,985,151</b>
<b>Apr'11-Sept'11</b> <i>(Perkiraan Pengeluaran)</i>	\$913,562	\$1,054,918	\$263,112	<b>\$2,231,592</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$1,762,068</b>	<b>\$1,997,794</b>	<b>\$456,881</b>	<b>\$4,216,743</b>

#### **Lampiran 4: Dokumen Yang Dihasilkan Selama Periode Pelaporan Ini**

Laporan dan dokumen dibawah ini dihasilkan selama masa pelaporan Oktober 2010 hingga Maret 2011

##### **Dokumen Kontrak kepada AusAID**

- Laporan Dana Hibah Bulanan (September 2010-Februari 2011) kepada AusAID dan pemerintah provinsi dan kabupaten
- Tabel Ketidakberesan Keuangan (September 2010- Februari 2011)
- Catatan Pertemuan PCC yang ke-5
- Rancangan Rencana Tahunan Tahun ke-4 (diajukan 31 Maret 2011)

##### **Dokumen Lainnya**

- Bulletin ACCESS Tahap II (Edisi 5 dan 6)
- Catatan mengenai Pertemuan Tematik tentang Penyediaan Pelayanan Publik
- Catatan mengenai Pertemuan Tematik tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif
- *Panduan Praktis Menuju Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas* (Januari 2011) (Practical Guide for Fair and Quality Public Services) hanya berbahasa Indonesia
- *Buku Studi RPJM-Desa Suara Warga Suara Pembangunan* (Januari 2011) (Studi tentang RPJMDes – Voice of the People Voice of the Village) hanya berbahasa Indonesia
- *Komunikasi Masyarakat: Panduan Dasar untuk Organisasi Masyarakat Sipil* (People's Communication: A Basic Guide for Civil Society Organisations) hanya berbahasa Indonesia
- Video 'Semangat Perubahan Perempuan Turatea'
- Poster – Apa Yang Dikatakan Oleh Penerima Manfaat Kita
- Poster – Apa Yang Dikatakan Oleh Rekanan Pemerintah Kita
- Poster – Apa Yang Dikatakan Oleh AusAID dan Lembaga Donor Lainnya
- Mengembangkan Kapasitas Fasilitator ACCESS didalam Program ACCESS

##### **Sumbangan Terhadap Dokumen Eksternal**

- *Panduan Praktis untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Tinggi dan Adil oleh MP3*

## Appendix 5: PGAs Issued this Reporting Period

Report Period: 1/10/2010 - 31/03/2011

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
<b>Partner Grant</b>				
<b>Projects In Progress</b>				
11/02/2009	YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi)	Iko	Application of Civil Society Index for ACCESS Phase II	7,500,000,000
31/03/2009	Mitra Samya (Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi)	Purnama Sidhi	Strengthen NGOs/CSOs to Improve the Participation of the Community Towards Better Local Democratic Governance	4,020,724,012
21/08/2009	Inspirit Innovation Circle	Ma. Rita Budhita Kismadi	Capacity Building Support in Assets Based Approaches	2,000,000,000
3/11/2009	Burnet Institute	Amanda Morgan	HIV Mainstreaming Support for ACCESS Phase II	772,358,500
20/11/2009	ICW	Danang Widoyoko	Capacity Building activities in the area of budgeting and advocacy for public policy	1,500,000,000
8/02/2010	Remdec	Handoko Soetomo	Capacity Building for CSO Partners in the area of Community Organizing, governance within CSO, GSI, and Monitoring and Evaluation	4,250,000,000
3/03/2010	Gita Pertiwi	Rossana Dewi	Capacity Building for CSO partners in the Area of Natural Resources Management, Village Economic Development, and Women's Leadership	2,500,000,000
1/07/2010	Kawanusa	Yoga Atmaja	Improving the capacity of ACCESS Partners in the area of Community Organising, Learning, Local Village Economy and Advocacy for Public Policy	1,610,000,000
20/08/2010	PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional	Ilham Cendikia	Capacity Building for CSO Partners in The Area of Gender and Social Inclusion	750,000,000
1/11/2010	YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi)	Francisca Fitri	Capacity Building for CSO partners in the area of budgeting, democratic, local governance, learning, advocacy for public policy and monitoring evaluation for boundary partners	850,000,000
18/11/2010	PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)	Ronald Rofiandri	Technical Assistance and Support for ACCESS Partners in Legal Drafting	415,000,000
7/01/2011	CD Bethesda	Paula Hartyastuti	Capacity Building for CSO partners in the area of facilitation	478,544,000
			<b>Projects: 12</b>	<b>Total Value: 26,646,626,512</b>

## Project Grant

### Projects In Progress

5/11/2008	ACCESS	Johnly E.P. Poerba	Provincial Coordinator Capacity Building Support for South East Sulawesi	90,000,000
5/11/2008	ACCESS	Sartono	Provincial Coordinator Capacity Building Support for South Sulawesi	90,000,000
5/11/2008	ACCESS	Ferdinandus Rondong	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTT (Sumba)	90,000,000
20/04/2009	ACCESS	Silvester Fallo	Provincial Coordinator Capacity Building Support for NTT (Timor)	60,000,000
1/09/2009	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Rosdiana	Productive Economic Businesses Based on Local Potential	271,775,000
1/09/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Amri	Program of Community Economic Empowerment Through Management of Village Owned Businesses (BUMDes) that is Democratic, Transparent, Participatory and Promotes Citizen Independence	367,355,000
1/09/2009	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Turatea-Binamu (GP3A Turbin)	Ahmad Faisal	Jeneponto Green and Clean	331,002,500
2/09/2009	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukas	Program to Improve the Quality of Public Services Through Community Participation in Local Good Governance	367,060,000
2/09/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI) Yayasan	Mas'ud	Community and Local Organisation Strengthening Program to Improve Local Democratic Governance	934,647,500
28/09/2009	Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (STIMULANT Institute)	Stepanus Makambombu	Empowering the Public Who are Not Given a Voice Through Engagement with Local Institutions	716,005,000
16/10/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok	Suhaimi	Optimising the Role of the Community Centre in Promoting Citizen's Basic Rights and Improved	749,915,000

16/10/2009	Barat (Solidaritas Perempuan Mataram) ASPUK (Asosiasi Perempuan Usaha Kecil Wilayah Nusa Tenggara)	Ririn Hayudiani	Service Delivery in West Lombok Strengthening the Capacity of Women's Micro Credit Groups by Developing a Sustainable Cooperative Network that Promotes Local Democratic Governance in Central Lombok	910,934,000
20/10/2009	Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA) Yayasan	Jafar	Improve the Participation of Citizens and Their Organisations in the Implementation of Basic Education in Buton District	931,855,000
6/11/2009	Berugak Dese	Naspiah	Increase the Capacity of Village Facilitators and Health Cadre to Encourage Community Participation in Clean and Healthy Lifestyles as a Part of Local Democratic Governance	380,532,500
17/11/2009	Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI)	Rahmat Sabani	Strengthen the Access and Control of Civil Society Through Advocacy of Community Based Natural Resource Management at West Lombok	708,565,000
16/12/2009	Yayasan Wali Ati (Yasalti)	Ninu Rambu W. Lodang	Citizen Empowerment for Local Democratic Governance Through Participatory Planning and Budgeting	878,629,500
1/02/2010	PAKTA Sumba Yayasan	Amos Siwa Wunu	Sustainable Natural Resource Management Based on the Poor and Women	726,107,500
11/02/2010	Bina Potensi Desa (Sintesa) Yayasan	Syukri Rauf	Internalisation of principles of Local Democratic Governance in Sustainable Natural Resource Management and the development of the local village economy based on local assets in Buton District	822,100,000
25/02/2010	LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Ali Wardana	Accelerate the Legality of Community Forest Management in Mareje Bonga Through Sustainable Forest Management that is Democratic and Improves the Livelihood of the Community	614,360,000
5/05/2010	Yayasan Kritik (Kelompok Kerja untuk Transparansi dan Partisipasi Publik)	La Ode Muammar Kadhafi	Strengthening Student Parent's Groups and Teacher's Groups to Improve Basic Education Services in Muna District	841,833,500
26/05/2010	YAKIIN (Yayasan Kreasi Insani Indonesia)	Marlin Ramli	Implementation of Principles of Local Democratic Governance in Participatory Village Planning and Budgeting in North Buton	1,485,585,000
4/06/2010	Lembaga Abdi Masyarakat (LAM)	Baharuddin	Environmental Conservation and Protection (To Create Green Space, Food Security and Clean Living Habits)	645,995,000
13/06/2010	Pusat Telaah dan Informasi Regional Jeneponto-Jakarta (Pattiro Jeka)	Edwin Sutte	Increase Quality Public Services That are Pro Poor, Women and Other Marginal Groups	900,360,000
14/06/2010	Lembaga YKM Kabupaten Gowa	Nurliah Ruma	Strengthening Women's Groups and the Poor to Increase Their Family Income Through a Self- Sustaining Community Economic Program	603,560,000
21/06/2010	Lembaga LPMT Kabupaten Takalar	Husain Mabe	Program for Public Service Delivery in Health which is Participatory, Transparent and Accountable and Promotes a Critical and Self-Sustaining Community	663,520,000
23/06/2010	Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (YISA)	Abdul Haris	Optimalise School Committees to improve the quality of educational services to ensure democratic, transparent, accountable and equitable school governance by improving the quality of education in 16 pilot schools	534,963,000
23/06/2010	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Participatory Education for Quality Education in Gowa District	704,965,000
23/06/2010	Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD)	Safriatna Ach	Strengthening Village Women's Movement to Improve Public Services as well as Protection for Women and Children	599,995,000
23/06/2010	Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB	Akhdiansyah, S.HI	Advocacy for participatory planning and budgeting that is pro-women and poor	495,695,000
28/06/2010	Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga (FP3M)	Dahlia Jufri	Improving the knowledge and skills of village women in an effort to reduce poverty levels in the villages of Ndano, Madawau, Dena and Woro	214,380,000
28/06/2010	Forum Masyarakat Tani "Paju Rasa" Kabupaten Bima	Hasan Kasim	Strengthening the capacity of the Area Coordinator for the Farmers Forum 'Paju Rasa' in an effort to promote the rights of farmers in Bima district	225,280,000
28/06/2010 795,480,000	Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LEMBARA)	Faisal Amir	Mainstreaming women and child rights	
28/06/2010	Yayasan Bina Cempe (YBC)	Hadijatul Qubrah	Participation and equity between women, youth, the poor and other marginal groups and other stakeholders in the sustainable management of natural resources	598,350,000
28/06/2010	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Ir Bambang Yusuf	Strengthen the capacity of village cadre to promote development that is democratic	1,166,922,500
28/06/2010	Lembaga FIK-KSM Kabupaten Takalar	Nurlinda	Program to increase the capacity of citizens and optimalise public policy to support the local development process that is participatory, transparent and accountable in Takalar	903,480,000
29/06/2010	Lembaga WAKIL Kabupaten Gowa	Kaharuddin Miji	Participatory planning to develop village mid term development plans( RPJMDes) and a village data	1,035,367,500

29/06/2010	Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Ina Fo'a Kupang	Martha Kewua	bank system Strengthen the role of women's small businesses to promote women's independence in Kupang district	179,090,000
1/07/2010	Lembaga YBC Kabupaten Gowa	Mohammad Hatta	Strengthening the Participation of Citizens to Improve the Quality of Basic Health Services and Understanding of Reproductive Health as Part of Local Democratic Governance at the District Level	624,950,000
4/07/2010	Lembaga YBS Kabupaten Takalar	Bambang Sul	Strengthening Household Economies Using Micro Finance Organisations That Are Managed Professionally in Supporting Village Economic Initiatives and Creating Room Creativity and Economic Opportunities	557,607,500
5/07/2010	Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL)	M.Sapri S	Increase the participation of the community in law enforcement and services in Gowa district	514,100,000
13/07/2010	INCREASE ( Institute of Cross Timor for Economic and Social Development)	Siprianus Damai Nar	Community Based Healthy Villages	894,880,000
13/07/2010	Yayasan Aksi Kemanusiaan (ANIMASI)	Marselinus Supardi Ganar	Community and community organisation empowerment in food security	900,245,000
13/07/2010	SDM Kupang	Rita Kefi	A collective effort to bring about village development (planning, budgeting, implementation and monitoring and evaluation) in a sustainable and equitable manner	941,620,000
29/07/2010	Sanggar Suara Perempuan	Ir Rambu Atanau Mella	Build Local Democratic Governance Through Gender Equity Initiatives	947,685,000
29/07/2010	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)	Ervyn Kaffah, ST	Promote the fulfilment of budgetary rights by increasing the access and control of the poor and women to democratic budget management	858,275,000
4/08/2010	Perkumpulan Serabut (Sekolah Rakyat Butuni)	M. Abdi Hayat	Increase the participation of citizens in village development planning and budgeting in Bau-Bau	789,695,000
5/08/2010	Forum Perempuan Peduli Korban Kekerasan (FP2KK)	Ida Wahyuni	Strengthening women's organisations to increase the role and number of women in development through Community Centres	216,696,000
6/08/2010	Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (LPMP) Dompu	Drs. Mahdi Salman	Strengthen the capacity of citizens and their organisations to support the improvement of quality health services in four subdistricts in Dompu	518,720,000
9/08/2010	Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)	Zulkarnain, S.Sos	Strengthening the Capacity of Citizen in Participatory, Transparent, and Accountable Planning and Budgeting to Encourage Local Democratic Governance in Dompu District	997,506,000
18/08/2010	Yayasan Lambu Ina	Yustina Fendrita C.	Strengthen the capacity and role of health post cadre in an effort to improve the quality of maternal and child health service delivery in Muna	680,525,000
24/08/2010	Lembaga Ekonomi Desa (LED) Lolo Gading	Andi Sukri	Improve the quality of the environment by strengthening environmental cadre and initiating policies based on local knowledge	538,375,000
24/08/2010	LSM Pelangi	Harun Anggo	Strengthen the role and access to information for youth regarding reproductive health in an effort to reduce sexually transmitted diseases and HIV & AIDS in Bau-Bau	591,590,000
27/08/2010	Bengkel " Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung' (Bengkel APPEK-NTT)	Vinsen Bureni	Empowering citizen groups through building the capacity of village facilitators/motivators to promote democratic village development and proportional budget allocation in Kupang district	963,985,000
27/09/2010	Karaeng Opu Yayasan	Supriadi Ukkas	Program to Improve the Quality of Public Services Through Community Participation in Local Good Governance	431,350,000
27/09/2010	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	Patje Saubaki, SH	Improved Citizen and Village Government Participation in Development Planning and Budgeting Processes in the Health, Environment and Education Sectors in Villages/kelurahan in Kupang District	875,840,000
28/09/2010	Jalarambang Indonesia (Yajjalindo) Yayasan	Husni Alam	Program to Increase the Capacity of Citizens and Public Policy Institutions to Support Local Development that is Participatory, Transparent and Accountable at Bantaeng District	899,465,000
29/09/2010	Aliansi KSM (Koperasi Tani Assamaturu)	Rosdiana	Productive Economic Businesses Based on Local Potential	486,590,000
29/09/2010	Jaringan Masyarakat Sipil (Jaring Mas)	Amri	Program of Community Economic Empowerment Through Management of Village Owned Businesses (BUMDes) that is Democratic, Transparent, Participatory and Promotes Citizen Independence	430,677,500
30/09/2010	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Turatea-Binamu (GP3A Turbin)	Ahmad Faisal	Jeneponto Green and Clean	467,912,500
6/10/2010	Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPAK) Buton	Rosni	Increase the role and function of the Posyandu as an effort to improve citizen access to quality basic health services that are affordable in Bau-Bau municipality	666,500,000
15/10/2010	ACCESS	Arief Mahmudi	Provincial Coordinator Capacity Building Support for West Nusa Tenggara	30,000,000

1/11/2010	Mitra Turatea-Yayasan	Abdul Rahmat	Strengthen the Capacity of the Poor and Women in Planning and Budgetting that is Transparent, Accountable, Participatory and Inclusive	708,197,500
7/03/2011	Perkumpulan SWAMI	Wa Ode Rulia Paymand	Strenthening community organisations and the village government to improve forest management that is sustainable and strengthens local economies	611,490,000
9/03/2011	Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat Indonesia (LEPPMI)	Asdin Satria	Improve access of citizens to quality and affordable basic health services by improving the function and role of the health posts in North Buton	453,190,000
10/03/2011	Bina Potensi Wanita (Yasinta) Yayasan	Irham Pinjais	Improve the role and function of the health post by pushing for quality and equitable health services in Buton	467,750,000
11/03/2011	Bina Potensi Desa (Sintesa) Yayasan	Syukri Rauf	Improve the empowerment of citizens in managing asset-based household economies through the establishment of small business groups	459,523,500
16/03/2011	Koslata	Ahmad Junaedi	Increasing the capacity of citizens, in particular the poor, women and other marginal groups as well as village social organisations, to ensure that planning and allocation of the village budget is gender sensitive and pro-poor	561,080,000

**Projects: 67**                      **Total Value: 41,721,685,500**  
**(4 project in the process of being closed following reconciliation)**

### Innovative Project

#### *Projects In Progress*

28/07/2009	Sloka Institute	Anton Muhajir	Development of the ACCESS Bulletin as a Tool for Learning and Sharing Knowledge to Scale-up Program Impacts	498,925,000
20/09/2010	Gita Pertiwi	Ir Juni Thamrin, M.Sc	Review on women's leadership and their role in management of village household economy	393,035,000
25/10/2010	Inspirit Innovation Circle	Dani Wahyu Munggoro	National DSC Meeting	378,234,740
10/01/2011	Kawanusa	IBK Yoga Atmaja	Publication of Community Communication Book	50,000,000
10/01/2011	Inspirit Innovation Circle	Rita Kismadi	Publication of the Handbook for District Stakeholder Committee Facilitators	28,750,000
9/02/2011	CD Bethesda	Paula Hartyastuti	Assessment into the efforts of revitalising health posts based on local assets by using a Strengths Based Approach	444,530,000
9/02/2011	Yayasan Sosial Donders	P Mikhael Molan Keraf, CSsR	Empowerment of Special Needs Groups Through a Community Centre (Umma Peghe) as a Medium for Revitalisation and Transformation of Sumba Cultural Values and as a Participatory Community Learning Centre	301,742,000

**Projects: 7**                      **Total Value: 2,095,216,740**